



PEMERINTAH KOTA MADIUN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 37 Madiun, Kode Pos 63116 Jawa Timur
Telepon (0351) 462756, Fax (0351) 457331
Website <http://www.madiunkota.go.id>

Madiun, 31 Oktober 2022

Nomor : 188/887 /401.013/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peraturan Walikota Madiun

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Madiun
di

MADIUN

Bersama ini disampaikan Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 tentang *Masterplan Smart City* Kota Madiun Tahun 2019-2024 setelah mendapatkan Asmanan Bapak Walikota Madiun dan penomoran dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya, sedangkan untuk penggandaan/penyebarluasannya harus mendapatkan legalisir dari Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Demikian untuk menjadikan periksa dan seperlunya

a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT


dr. AGUNG SULISTYA WARDANI, M.MKes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630106 198903 2 007



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG MASTERPLAN SMART CITY

KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perubahan situasi dan kondisi saat ini perlu penyesuaian program kerja dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam matriks *Roadmap* pembangunan program *smart city* jangka menengah dan jangka panjang, sehingga mampu memberikan manfaat yang maksimal untuk kepentingan masyarakat di Kota Madiun;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 tentang *Masterplan Smart City* Kota Madiun Tahun 2019-2024 sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 tentang *Masterplan Smart City* Kota Madiun Tahun 2019-2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;




16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;
21. Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 tentang *Masterplan Smart City* Kota Madiun Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2020 tentang *Masterplan Smart City* Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 32/G), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 Agustus 2022



Diundangkan di Madiun
pada tanggal 30 Agustus 2022



BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 45/G

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berbasis *Smart City* telah menjadi tren pembangunan kota di dunia dan menjadi keniscayaan yang harus diadaptasi daerah, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia. Dengan berkembangnya masyarakat urban, tantangan dan masalah baru dalam perencanaan urban (*urban planning*) memerlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan lintas sektor diantaranya ekonomi, sosial, dan pemerintah. Namun dalam praktiknya, penerapan *Smart City* di Pemerintah Daerah membutuhkan perencanaan yang matang karena konsep tersebut menekankan pada pentingnya inovasi untuk permasalahan khas tiap kota/kabupaten dengan memanfaatkan teknologi terkini (seperti sensor, *data analytic*).

Dalam rangka mengembangkan *Smart City* di Indonesia, pada tahun 2017 Kementerian Kominfo bekerja sama dengan kementerian lain menginisiasi Gerakan menuju 100 *Smart City* atau mendorong terciptanya 100 kota cerdas pada tahun 2019. Pemerintah Daerah menyambut baik program tersebut dan melaksanakan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai pelaksanaan Program Menuju 100 *Smart City* pada tahun 2018. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan *Smart Nation* yang dirangkai dari *Smart Cities* maka Pemerintah Daerah melakukan akselerasi pembangunan dengan konsep pemanfaatan teknologi informasi untuk mengembangkan Kota Madiun *Smart City*. Dimensi *Smart City* yang menjadi prioritas perubahan meliputi tata kelola birokrasi (*Smart Governance*), permukiman penduduk (*Smart Living*), lingkungan masyarakat (*Smart Society*), dan pemeliharaan lingkungan (*Smart Environment*).

Serangkaian bimbingan teknis untuk perencanaan kota cerdas telah diikuti oleh segenap perwakilan instansi daerah Kota Madiun di tahun 2019. Konsep *Smart City* yang dinamis dan memfokuskan diri pada inovasi, solusi dan pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya teknologi secara optimal. Ide-ide, inovasi, kreativitas untuk menjadikan Daerah menjadi lebih baik berupaya diwujudkan dan dilaksanakan. Awalnya dengan mengedepankan ciri khas Daerah sebagai **Kota Pecel** dan **Kota Pendekar**, Pemerintah Daerah berencana untuk mengembangkan inovasi, ide, dan kreativitas Pecel serta pencak silat sebagai ciri khas utama Daerah, melalui hadirnya **Peceland**, dengan adanya perubahan situasi dan kondisi saat ini serta penyesuaian terhadap perubahan peraturan dan kebijakan, maka rencana pengembangan inovasi ide, dan kreatifitas tersebut berubah menjadi **Pahlawan Street Center (PSC)**.

/

Pengembangan inovasi, ide dan kreativitas *PSC* kemudian akan dituangkan dalam *masterplan Smart City* sebagai pedoman dalam pengembangan menuju Kota Madiun *Smart City*. *Masterplan* ini diharapkan akan menjadi panduan daerah dalam melakukan implementasi pembangunan berbasis kota cerdas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yang akan direview secara periodik setiap tahun sesuai dinamika kebutuhan, peraturan dan kebijakan pemerintah terkini.

1.2 Tujuan Masterplan Smart City

Tujuan dari penyusunan *masterplan Smart City* Kota Madiun adalah sebagai dasar, acuan, perencanaan pembangunan dan pengembangan *Smart City* Kota Madiun. Penyusunan *masterplan* dilakukan secara sistematis, logis, kondisional dan realistis sesuai dengan kebutuhan Pemerintahan Kota Madiun sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemerintahan menjadi lebih baik. Untuk lebih detail tujuan penyusunan *masterplan Smart City* Kota Madiun akan diuraikan dibawah ini.

- a. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan dan pengembangan *Smart City* Kota Madiun;
- b. Menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan daerah berdasarkan konsep *Smart City*;
- c. Menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan dokumen *masterplan Smart City* Kota Madiun;
- d. Mendorong proses pengembangan *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan *masterplan Smart City* Kota Madiun adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;



- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- h. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- k. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
- l. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
- m. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
- n. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-



2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;

1.4 Kerangka Pikir *Smart City*

Smart City merupakan topik yang kepentingannya semakin dikenal di berbagai disiplin akademis dan perencanaan Kota. Kerangka pikir (*frameworks*) *Smart City* atau Daerah Pintar telah dikembangkan oleh banyak pakar dan akademisi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa lembaga seperti Smart Cities Council, CISCO, Uni Eropa, dan IEEE telah mengembangkan kerangka pikir terhadap pembangunan *Smart City*. Selain lembaga-lembaga tersebut terdapat kerangka pikir yang dikembangkan oleh lembaga *think tank* dalam negeri dimana kerangka pikir yang dikembangkan tersebut telah disesuaikan dengan konteks Indonesia dan menjadi acuan bagi Panduan Penyusunan Masterplan *Smart City* ini.

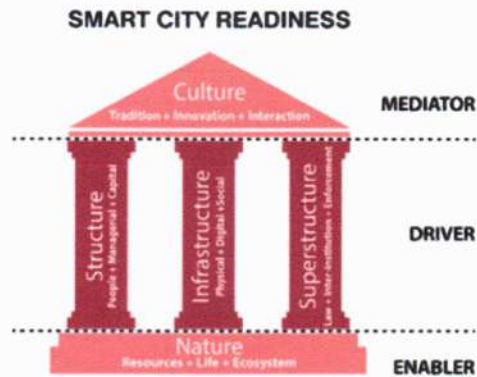
Istilah *smart* dalam bahasa Indonesia disebut dengan “pintar”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pandai; cakap”, “cerdik; banyak akal”, dan “mahir (melakukan atau mengerjakan sesuatu)” atau “cerdas” yang diartikan sebagai “sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya); tajam pikiran” dan “sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat)”. Kata “Kota Pintar” dipilih untuk menunjukkan pengertian yang lebih luas dari kata cerdas atau “intelligent”. Namun demikian penggunaan kata “Kota Cerdas” juga diperkenankan jika ada daerah yang memilih menggunakan istilah tersebut.

Smart City mendasari strategi kota dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di beberapa bidang seperti ekonomi, lingkungan, mobilitas dan pemerintahan untuk mengubah infrastruktur kota dan layanan. *Smart City* mengilhami visi ruang di mana komponen utama infrastruktur dan layanan lingkungan, tanggap darurat, lalu lintas dan manajemen energi yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga fitur dan aplikasi dapat dengan mudah dikombinasikan dengan kemampuan yang ada.

Dalam membangun *Smart City*, terlebih dahulu suatu kota/kabupaten harus memiliki Kesiapan Daerah Pintar atau *Smart City Readiness*. Terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan daerah pintar, yaitu potensi alam (*nature*); struktur daerah (*structure*); infrastruktur (*infrastructure*); suprastruktur (*superstructure*); dan budaya (*culture*).



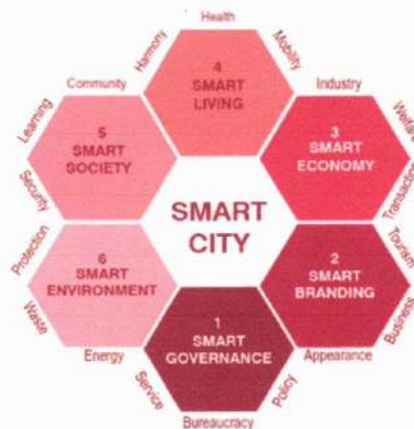
Untuk keperluan penyusunan Masterplan ini, kajian *Smart City Readiness* difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur. Ilustrasi elemen kesiapan daerah pintar tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Elemen Smart City Readiness (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

- a. Struktur: pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (*people*) dan penerima manfaat *Smart City*, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;
- b. Infrastruktur: pembangunan infrastruktur pendukung *Smart City* yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur social untuk kepentingan umum;
- c. Suprastruktur: penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan *Smart City*.

Dari kerangka berikir *Smart City Readiness*, kerangka berpikir selanjutnya adalah dimensi – dimensi yang terdapat dalam *Smart City* itu sendiri yang dijelaskan pada Gambar 1.2.

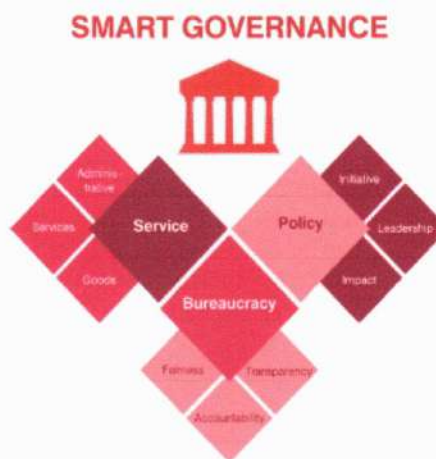


Gambar 1.2 Dimensi Smart City (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

1.4.1 Kerangka Pikir *Smart Governance*

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. *Smart Governance* di dalam dimensi *Smart City* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan business process yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.

Smart Governance harus dapat dimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*) seperti terlihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3 *Smart Governance* (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

Inisiatif pembangunan *Smart Governance* diantaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

1) **Pelayanan Publik (*Public Service*)**

- Pelayanan administrasi kepada masyarakat: produk ini meliputi status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen - dokumen resmi seperti Surat Izin Berusaha, ijin trayek, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya.
- Peningkatan dan monitoring sarana prasarana penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat misalnya sembilan bahan pokok, air bersih, dan lain-lain.
- Peningkatan dan monitoring sarana prasarana penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya transportasi, hiburan, informasi, listrik, internet, dan lain-lain



- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat misalnya sembilan bahan pokok, air bersih, dan lain-lain.
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya jaringan telepon, listrik, internet, dan lain-lain.

2) **Manajemen Birokrasi Yang Efisien (*Bureaucracy*)**

Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (*fairness*), bertanggung-jawab (*accountability*) dan keterbukaan (*transparency*). Misalnya: sistem *e-planning*, *e-budgeting*, *e-money* dan lain-lain.

Pengembangan aplikasi e-gov harus diarahkan menuju *integrated & inter-operability e-Gov* atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan *Smart e-Gov*. Pelayanan *Smart e-Gov* ini perlu didukung dengan sebuah "*City Operation Center (COC)*".

3) **Efisiensi Kebijakan Publik (*Public Policy*)**

- Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan.
- Sistem informasi kebijakan pemerintah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.
- Peningkatan partisipasi warga dalam perumusan kebijakan publik.

Adapun layanan publik dari pemerintah haruslah memenuhi unsur-unsur kualitas. Unsur – unsur kualitas yang bisa menjadi alat ukur bagi layanan publik antara lain:

- a) Convenience** (kenyamanan) yaitu pengukuran tentang nilai yang berhubungan kemudahan akses dan *availabilitas* untuk digunakan oleh penduduk.
- b) Security** (keamanan) yaitu pengukuran tentang nilai yang berhubungan dengan rasa aman dan kepercayaan penduduk saat menggunakan layanan dari pemerintah.
- c) Reliability** (kehandalan) yaitu pengukuran tentang nilai yang berhubungan dengan ketepatan sasaran dan ketepatan waktu.
- d) Personal** yaitu pengukuran tentang nilai yang berhubungan dengan kecocokan informasi yang diberikan dan juga kesesuaian layanan dengan kebutuhan.

- e) **Problem-solving** yaitu pengukuran tentang nilai yang berhubungan dengan kemampuan adaptasi layanan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul.
- f) **Fairness** yaitu pengukuran tentang nilai yang berhubungan dengan unsur keadilan dan kesamarataan layanan untuk semua lapisan masyarakat.
- g) **Fiscal** yaitu pengukuran tentang nilai yang berhubungan dengan kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran dimana asalnya adalah dari masyarakat.
- h) **Citizen Influenced** yaitu pengukuran tentang nilai yang berhubungan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan dari pemerintah daerah.

Selain berusaha untuk memberikan nilai tinggi pada masing-masing faktor di atas, layanan government juga harus mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan paradigma sistem informasi. Di sektor pemerintahan, perubahan tersebut tertuang dalam konsep *e-Gov 2.0* dan *e-Gov 3.0* (lihat Tabel 1.1).

Tabel 1.1 Perubahan konsep e-Gov 1.0 hingga e-Gov 3.0 mengarah ke Smart Governance

Konsep Elemen	e-Gov 1.0	e-Gov. 2.0	e-Gov 3.0
Tujuan Utama	Layanan yang lebih baik	Keterbukaan dan kolaborasi	Penyelesaian masalah sosial, kesejahteraan masyarakat, optimisasi sumber daya
Metode	Pemerintah yang saling terhubung	Pemerintah yang terbuka dan kolaboratif	Pemerintah yang Pintar (Smart Governance)
Level	Nasional	Lokal dan Nasional	Lokal hingga Internasional
Tool	Portal	Social Media	Smart Services/Devices / Apps
Risiko	Mental melayani public	Mental melayani public	Mental melayani public
Sumber daya TIK	Infrastruktur dan Organisasi	SDM dan Data	Machine Intelligence dan IoT
Disiplin ilmu terkait selain TIK	Manajemen	Sosiologi	Segala disiplin ilmu


Tujuan utama *e-Gov 2.0* adalah keterbukaan layanan dan peningkatan integrasi atau kolaborasi sistem-sistem yang ada, memanfaatkan social media dalam menunjang pelayanan publiknya. Sedangkan untuk *e-Gov 3.0* memberikan layanan yang sifatnya lebih personalize, disesuaikan dengan kebutuhan per individu penduduk. Karena per individu, maka gadget yang dimiliki oleh masing-masing individu akan lebih dimanfaatkan.



Oleh karena itu perlu diadakan pengumpulan data yang dapat membantu memperbaiki kebijakan publik dengan menggunakan teknologi seperti *machine learning* dan *IoT*. Partisipasi masyarakat yang sudah mulai dibuka pada eGov 2.0 harus lebih ditingkatkan lagi pada eGov 3.0 karena komunikasi dan aplikasi lebih dekat dengan setiap individu. Saluran komunikasi tiap individu ke pemerintah terbuka dan aplikasi atau layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah bersifat *customized* tergantung karakteristik individu tersebut. Layanan-layanan yang sifatnya sosial yang membantu kehidupan masyarakat akan lebih meningkat. *Smart Governance* sebagai salah satu dimensi *Smart City* akan sangat berperan di *e-Gov 3.0* ini sehingga dapat membentuk pemerintahan yang berbasis layanan kepada masyarakat.

1.4.2 Kerangka Pikir *Smart Branding*

Dimensi kedua dalam *Smart City* adalah *Smart Branding*, yaitu *branding* daerah yang pintar. Yang dimaksud dengan *Smart Branding* adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. *Smart Branding* menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal-nya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya. Pada dasarnya konsep branding daerah memiliki kemiripan dengan konsep *branding* di dalam korporasi, hanya saja perbedaannya adalah apabila di dalam branding korporasi tujuannya adalah meningkatkan *brand value* perusahaan yang berujung pada meningkatnya *income* dan *profit* perusahaan, pada branding daerah, tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan *brand value* daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.





Gambar 1.4 Smart Branding (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

Inisiatif pembangunan *Smart Branding* dilakukan pada beberapa indikator seperti terlihat pada Gambar 1.4 yang akan dipaparkan lebih lanjut sebagai berikut.

1) **Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (*Tourism Branding*)**

- Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan (*destination*).
- Menggali *diferensiasi* yang khas dari Kota Madiun agar terlihat berbeda dengan kota-kota lainnya.
- Membangun dan mengembangkan identitas visual kota yang dapat menjadi kunci bagi orang banyak agar mudah mengenali berbagai macam potensi yang ada di Kota Madiun.
- Mengembangkan dan memperkenalkan beragam kesenian khas asli Kota Madiun kepada masyarakat luas. Hal tersebut termasuk kuliner khas berupa pecel, tarian daerah seperti Solah Madiunan, Kebudayaan lainnya seperti Silat, dan lain-lain.
- Mendukung masyarakat kota dan berkolaborasi untuk membuat berbagai event untuk mempromosikan *destination tourism* yang ada di Kota Madiun.
- Menyusun strategi brand aktivasi dari Kota Madiun dan mengkomunikasikannya kepada khalayak ramai.
- Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan (*amenities*) misalnya jalan, transportasi, hotel/motel/*bedding & breakfast* (B&B), restoran, dan lain-lain.
- Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung (*hospitality*) termasuk kemampuan berbahasa asing, ketersediaan tour-guide dan lain-lain.



2) Membangun *platform* dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (*Business Branding*)

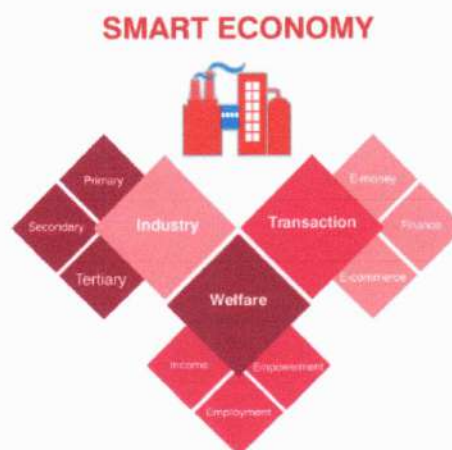
- Membangun *platform* dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya *marketplace* daerah.
- Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif, misalnya *Investment Lounge*, *Dashboard*, dan Portal Investasi Daerah.
- Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah. misalnya kuliner, kriya, fashion, digital, dan lain-lain.

3) Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (*City Appearance Branding*)

- Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.
- Membangun batas wilayah (*edge*), membangun penanda sebuah lokasi yang penting, berkesan bagi pengunjung (*landmark*), menyediakan navigasi yang unik menuju kota (*signage*), struktur jalan yang teratur (*path*), dan titik simpul kota (*node*) seperti alun-alun, simpang dan lain-lain.

1.4.3 Kerangka Pikir *Smart Economy*

Dimensi ketiga dalam *Smart City* adalah *Smart Economy* atau tata kelola perekonomian yang pintar. *Smart Economy* dalam dalam *Smart City* dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini.



Gambar 1.5 Smart Economy (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

Sasaran dari dimensi *Smart Economy* di dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam *Smart Economy*, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan seperti terlihat pada Gambar 1.5. Inisiatif pembangunan *Smart Economy* diantaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut.

1) Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*Industry*)

Membangun daya saing industri daerah pada *leading sector* industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lainlain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, *packaging* dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah).

2) Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (*Welfare*)

- Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (*income*).
- Program peningkatan penyerapan angkatan kerja (*employment*).
- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (*empowerment*).

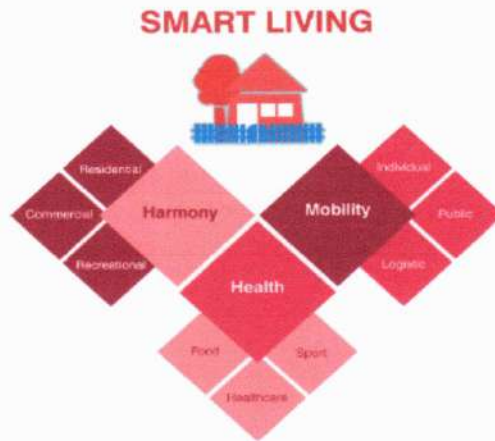
3) Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (*Transaction*)

- Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang *less cash*.
- Mewujudkan masyarakat yang bankable dan memiliki akses terhadap permodalan
- Mewujudkan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong industri *ecommerce* dan *marketplace*.

1.4.4 Kerangka Pikir *Smart Living*

Smart Living menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah *Smart City* (lihat Gambar 1.6).





Gambar 1.6 Smart Living (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

Sasaran dari *Smart Living* di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. Inisiatif pembangunan *Smart Living* dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut.

1) Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*)

Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman (*residential*), lingkungan pusat kegiatan bisnis (*commercial*) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (*recreational*).

2) Mewujudkan Prasarana Kesehatan (*Health*)

Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (*food*), akses terhadap pelayanan kesehatan yang (*healthcare*), dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (*sport*).

3) Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*)

Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas (*mobility*) bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah.

1.4.5 Kerangka Pikir *Smart Society*

Smart Society sebagai bagian dari *Smart City* merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah *Smart City*, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosioteknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.



Sasaran dari *Smart Society* dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Sasaran dari *Smart Society* tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam *Smart Society*, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*) – seperti terlihat pada Gambar 1.7. Inisiatif pembangunan *Smart Society* dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut.

1) Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (*Community*)

- Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (*digital*) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Contoh: berbagai program untuk mendukung berbagai kemajuan *Smart City* misalnya program-program kepemudaan, peningkatan keahlian UKM dan lain-lain.
- Pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif.



Gambar 1.7 Smart Society (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

2) Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien (*Learning*)

- Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non formal untuk memberi kesempatan yang seluasluasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus.



BAB II **VISI SMART CITY KOTA MADIUN**

Dalam mengembangkan visi dan misi *Smart City* harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- 1) Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang tercantum di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
- 2) Visi dan Misi Pembangunan Nasional;
- 3) Harapan warga masyarakat;
- 4) Analisis Faktor eksternal di masa depan

Sedangkan untuk penyusunan visi *Smart City* terdapat kriteria dalam perumusannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*);
- 2) Menjawab permasalahan pembangunan *Smart City* Kota Madiun dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- 3) Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (*articulative*);
- 4) Disertai penjelasan mengapa visi *Smart City* tersebut dibutuhkan di Kota Madiun, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di Kota Madiun; dan
- 5) Sejalan dengan visi dan arah pembangunan Kota Madiun dan nasional.

2.1 Visi Smart City Kota Madiun

Visi Kota Madiun seperti terlihat sebagai berikut:

“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”

Berdasarkan visi Kota Madiun didapatkan kata kunci untuk merumuskan visi *Smart City* seperti terlihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Elemen Visi Smart City

Elemen Visi Kota Madiun	Elemen Visi Smart City	Dimensi Smart City
“Bersih”	“Layanan Berbasis Teknologi”	<i>Smart Governance</i>
“Berwibawa”	“Kharismatik dan Produktif”	<i>Smart Branding, Smart Economy, Smart Environment</i>
“Sejahtera”	“Kehidupan Masyarakat Berkualitas Menuju Kota Kelas Dunia”	<i>Smart Society, Smart Living</i>



- Membangun platform edukasi bagi masyarakat misalnya *Smart School*, *Smart Campus*, *Smart Pesantren*, *Smart Training Program* dan lain-lain.

3) Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (*Security*)

Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau *Internet of Thing (IoT)*.

1.4.6 Kerangka Pikir *Smart Environment*

Dimensi keenam dalam sebuah *Smart City* adalah pengelolaan lingkungan yang pintar, dimana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar dari smart environment di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang *Smart City* yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.



Gambar 1.8 *Smart Environment* (Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN))

✓

Sehingga rumusan Visi Smart City Kota Madiun adalah:

“Menciptakan Madiun Kota Pintar yang Produktif Didukung Layanan Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas Menuju Kota Kelas Dunia”

2.2 Misi Smart City Kota Madiun

Misi Kota Madiun:

Misi ke-1: Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)

Misi ke-2: Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Misi ke-3: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun

Misi ke-4: Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Berdasarkan misi tersebut, disusunlah misi *Smart City* Kota Madiun dengan mempertimbangkan dimensi berikut.

1. **Smart Governance**

Misi ke-1: Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akuntabel

2. **Smart Branding**

Misi ke- 2: Penguatan identitas daerah

3. **Smart Economy**

Misi ke- 3: Ekosistem industri yang berdaya saing

4. **Smart Living**

Misi ke- 4: Harmonisasi tata kota yang nyaman

5. **Smart Society**

Misi ke- 5: Interaksi sosial masyarakat yang terbuka dan cerdas

6. **Smart Environment**

Misi ke- 6: Sistem ekonomi berputar (*Circular Economy*)

2.3 Tujuan dan Sasaran Smart City Kota Madiun

Dari kerangka pikir *Smart City* di bab sebelumnya, selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan *Smart City* di Kota Madiun sebagai upaya mewujudkan Kota Madiun yang bersih, berwibawa, dan sejahtera sesuai dengan potensi yang telah dipetakan dalam “Buku 1 Analisis Strategis *Smart City* Kota Madiun” ke dalam 6 (enam) dimensi, yaitu:

- a. *Smart Governance*
- b. *Smart Branding*
- c. *Smart Economy*
- d. *Smart Living*
- e. *Smart Society*
- f. *Smart Environment*

a. Smart Governance

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. *Smart Governance* di dalam dimensi *Smart City* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan business process yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan. Adapun tujuan dan sasaran *Smart Governance* seperti terlihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Tujuan dan Sasaran *Smart Governance*

<p>Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan pembangunan, dan pertanggungjawaban untuk mendukung pelayanan publik yang prima dengan dukungan TIK.</p> <p>Yang dapat didetailkan sebagai sasaran-sasaran sebagai berikut:</p>
<p>a. Pelayanan Publik (<i>Public Service</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1. G1. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat2. G2. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat3. G3. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok
<p>b. Manajemen Birokrasi (<i>Bureaucracy Management</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1. G4. Menciptakan Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (fairness), bertanggung-jawab (accountability) dan keterbukaan (transparency) dengan dukungan TIK.
<p>c. Kebijakan Publik (<i>Public Policy</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">1. G5. Mengambil kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat2. G6. Mengembangkan Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

7

b. Smart Branding

Smart Branding adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. Tidak hanya memanfaatkan potensi lokal, tetapi juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan di Kota Madiun. Adapun tujuan dan sasaran *Smart Branding* seperti terlihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Tujuan dan Sasaran *Smart Branding*

Tujuan: Peningkatan daya saing daerah dengan pengembangan budaya kearifan local untuk penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup local, nasional maupun internasional
Yang dapat didetailkan sebagai sasaran-sasaran sebagai berikut:
a. Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (<i>Tourism Branding</i>)
1. B1. Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan (destination). 2. B2. Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan 3. B3. Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung
b. Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (<i>Business Branding</i>)
1. B4. Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif
c. Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (<i>City Appearance Branding</i>)
1. B5. Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.



c. *Smart Economy*

Smart Economy atau tata kelola perekonomian yang pintar. *Smart Economy* dalam dalam *Smart City* dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini. Tujuan dan sasaran *Smart Economy* terlihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5 Tujuan dan Sasaran *Smart Economy*

<p>Tujuan: Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan <i>financial literacy</i> masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan <i>less-cash society</i>, keterbukaan informasi pasar dan pemanfaatan teknologi secara maksimal.</p> <p>Yang dapat didetailkan sebagai sasaran-sasaran sebagai berikut:</p>
<p>a. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (<i>Industry</i>)</p>
<p>1. E1. Membangun daya saing industri daerah pada leading sector industri tertentu yang terintegrasi dalam suatu rantai nilai.</p>
<p>b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat (<i>Welfare</i>)</p>
<p>1. E2. Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (income)</p>
<p>c. Membangun ekosistem transaksi keuangan (<i>Transaction</i>)</p>
<p>1. E3. Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang less cash dengan didukung oleh usaha-usaha yang melek keuangan (financial literate) dalam suatu ekosistem keuangan yang terpadu</p>

d. *Smart Living*

Smart Living bertujuan untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah *Smart City*. Tujuan dan sasaran *Smart Living* seperti terlihat pada Tabel 1.6.



Tabel 1.6 Tujuan dan Sasaran *Smart Living*

<p>Tujuan: Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, aman, nyaman, dan efisien.</p> <p>Yang dapat didetailkan sebagai sasaran-sasaran sebagai berikut:</p>
<p>a. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (<i>Harmony</i>)</p>
<p>1. L1. Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman (residential), lingkungan pusat kegiatan bisnis (commercial) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (recreational).</p>
<p>b. Mewujudkan Prasarana Kesehatan (<i>Health</i>)</p>
<p>1. L2. Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (food), akses terhadap pelayanan kesehatan yang (healthcare), dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (sport)</p>
<p>c. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (<i>Mobility</i>)</p>
<p>1. L3. Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas (mobility) bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah.</p>

e. Smart Society

Smart Society sebagai bagian dari *Smart City* merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah *Smart City*, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi. Tujuan dan sasaran *Smart Society* seperti terlihat pada Tabel 1.7.



Tabel 1.7 Tujuan dan Sasaran *Smart Society*

<p>Tujuan: Mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi.</p> <p>Yang dapat didetailkan sebagai sasaran-sasaran sebagai berikut:</p>
<p>a. Mewujudkan Interaksi Masyarakat yang Efisien (<i>Community</i>)</p>
<ol style="list-style-type: none">1. S1. Mewujudkan interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (digital) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah2. S2. Mengembangkan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif
<p>b. Membangun Ekosistem Belajar yang Efisien (<i>Learning</i>) dan Komprehensif</p>
<ol style="list-style-type: none">1. S3. Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat yang difable.2. S4. Membangun platform edukasi bagi masyarakat
<p>c. Mewujudkan Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat (<i>Security</i>)</p>
<ol style="list-style-type: none">1. S5. Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintahmaupun teknologi sensor digital atau <i>Internet of Thing (IoT)</i>.



f. Smart Environment

Pengelolaan lingkungan yang cerdas memberikan perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang *Smart City* yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.

Tabel 1.8 menunjukkan tujuan dan sasaran dimensi ini.

Tabel 1.8 Tujuan dan Sasaran *Smart Environment*

<p>Tujuan: Mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, terpadu, dan mandiri (<i>Madiun Health and Comfort City</i>)</p> <p>Yang dapat didetailkan sebagai sasaran-sasaran sebagai berikut:</p>
<p>a. Mengembangkan Program Perlindungan Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none">1. EN1. Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara sertamengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara, misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada <i>Internet of Thing (IoT)</i>2. EN2. Membangun ruang terbuka hijau3. EN3. Mengembangkan restorasi sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi4. EN4. Mengendalikan polusi udara
<p>b. Mengembangkan Tata Kelola Sampah (Waste)</p> <ol style="list-style-type: none">1. EN5. Mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga (<i>household</i>)2. EN6. Mengembangkan sistem tata kelola limbah industri (<i>industrial</i>)3. EN7. Mengembangkan sistem tata kelola limbah dan sampah publik (<i>public</i>)4. EN8. Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar tidak mengganggu pemandangan, tidak merusak indra penciuman, dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran-saluran air pembuangan limbah atau sirkulasi air residensial serta ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga, industri dan publik yang baik dan bertanggung-jawab.

1

**c. Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab
(Energy)**

1. **EN9.** Memanfaatkan energi yang efisien dan bertanggungjawab
2. **EN10.** Mengembangkan energi alternatif yang ramah lingkungan (*environmentally friendly*) dan berkelanjutan (*sustainable*) serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya pemanfaatan limbah/sampah sebagai biogas, energi surya, tenaga angin, biomassa (tumbuhan dan hewan) dan lain-lain.



BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY

Dalam melakukan strategi pembangunan *Smart City*, beberapa ahli mengutarakan bahwa menciptakan kota yang cerdas merupakan suatu hal yang kompleks, membutuhkan proses jangka panjang, dan keberhasilannya tergantung pada komitmen berkelanjutan untuk aksi yang jelas, antara lain:

- a. Kepemimpinan terpadu.
- b. Visi inspiratif yang jelas.
- c. Satu arah strategi dan tujuan yang jelas.
- d. Penciptaan model tata kelola yang sesuai dan dapat diterima.
- e. Perkembangan kasus bisnis dan penilaian ekonomi untuk menilai dampak dari pembangunan.
- f. Sebuah pemahaman yang jelas tentang pembangunan perkotaan, transportasi dan infrastruktur strategi dan model regenerasi.
- g. Sebuah pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana teknologi dapat diintegrasikan seluruh fungsi kota dan departemen untuk menciptakan sinergi dan wawasan baru.
- h. Apresiasi saat ini dan muncul praktek terbaik dalam penggunaan sistem cerdas dalam layanan, infrastruktur, dan bangunan.
- i. Apresiasi konteks dan pemahaman tentang kepentingan stakeholders, budaya dan adat istiadat setempat dapat memiliki pengaruh besar pada apa yang dapat diterima.
- j. Pemahaman tentang kepemilikan, keselamatan, keamanan dan penggunaan data serta model pendanaan untuk infrastruktur baru.

Sedangkan strategi untuk kota cerdas juga harus mencakup:

- a. komunikasi yang jelas
- b. sebuah visi pemersatu melalui siklus hidup.
- c. integrasi dengan kebijakan dan struktur tata kelola.
- c. pemahaman holistik yang jelas tentang bagaimana data ditransfer dan ditangkap antara teknologi dan sistem dan bagaimana ia digunakan oleh pengambil keputusan.



Strategi ini didapatkan dari kondisi eksisting Kota Madiun yang dianalisis dengan menggunakan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat*). Dari hasil SWOT, akan didapatkan strategi pembangunan *smart city* Kota Madiun. Secara umum, strategi pembangunan *Smart City* Kota Madiun menetapkan dimensi **Smart Branding** atau pemasaran cerdas Kota Madiun sebagai “lokomotif” pendorong pembangunan dimensi-dimensi *Smart City* lainnya sekaligus sebagai Quick Win *Smart City* Kota Madiun. Pembangunan branding Kota Madiun ini akan bertumpu pada tiga identitas Kota Madiun, yakni: kuliner **Pecel**, budaya dan olah raga **Pencak Silat**, serta pusat industri dan pendidikan **kereta api** nasional.

Secara lebih detail, SWOT dan strategi pembangunan *Smart City* berdasarkan dimensinya akan diuraikan sebagai berikut.

2.4 Smart Governance

Tujuan *Smart Governance* adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan pembangunan, dan pertanggungjawaban untuk mendukung pelayanan publik yang prima dengan dukungan TIK.

2.4.1 Analisis Strategi Smart Governance

Penyusunan strategi pada dimensi *Smart Governance* akan diuraikan pada Tabel 0.1.



Tabel 0.1 Matrik SWOT Smart Governance

TOWS MATRIX - SMART GOVERNANCE KOTA MADIUN	Strength			Weakness		
	Public Service	Birokrasi	Kebijakan	Public Service	Birokrasi	Kebijakan
SP.1 Area pelayanan (demografi Kota Madiun) tidak terlalu luas	SB.1 Kemudahan pengurusan	SK.1 Transparansi standar pelayanan kepada masyarakat	WP.1 Masih belum ada pelayanan yang terintegrasi, masih terpisah-pisah (1)	WB.1 Masih ada pelayanan yang belum sesuai standar pelayanan	WB.2 Masih ada pelayanan yang manual	WK.1 Sering terjadi benturan kebijakan daerah dan pusat
SP.2 Transportasi mudah terjangkau	SB.2 Sudah banyak inovasi untuk pemangkasan birokrasi	SK.2 Komitmen pimpinan	WP.2 Beberapa layanan masih lama (1)	WB.3 Jumlah SDM terbatas (5 dan 6)	WB.4 Masih ada ego sektoral (5)	
SP.3 Jumlah penduduk sedikit	SB.3 Anggaran mencukupi	SK.3 Ketersediaan regulasi	WP.3 Transparansi pelayanan ada yang masih kurang jelas (1)	WB.5 Masih ada budaya birokrasi yang belum mengarah ke pelayanan prima		
SP.4 Infrastruktur bagus			WP.4 Masih ada layanan yang berbayar (1 dan 2)			
SP.5 Pelayanan cepat			WP.5 Manajemen antrian belum semuanya terukur (1)			
SP.6 Pelayanan tuntas (pendaftaran sampai resep obat keluar dalam sehari)			WP.6 Masih ada layanan yang belum sesuai			

			SP.7 Di beberapa pelayanan SDM cukup mumpuni			dengan standar pelayanan yang ditetapkan (1)		
Opportunity	Public Service	OP.1 Dimungkinkan untuk terbitnya Satu Kartu untuk semua pelayanan	Menciptakan Layanan Publik yang Efektif dan Efisien [SP.5, SP.6, SP.7 - OP1]					
	Birokrasi	OB.1 Birokrasi sudah mulai mewedahi kemajuan teknologi		Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Publik [SB.1, SB.2; SK.1 - OB.1]		Meningkatkan Ketersediaan Informasi Penyediaan Kebutuhan Bahan dan Jasa Pokok [WP.1 - OB.1]	Menguatkan Tata Kelola Birokrasi [WB.1, WB.2, WB.3, WB.5 - OB.1]	Meningkatkan Efisiensi Kebijakan Publik [WK.1 - OB.1]
	Kebijakan	OK.1 Komitmen pimpinan saat ini sudah cukup tinggi OK.2 Koordinasi antar OPD sudah mulai berjalan						
Threats	Public Service	TP.1 Adanya calo pelayanan (1) TP.2 Oknum petugas pelayanan yang masih profit oriented (3)						

/

		TP.3 Masih ada perbedaan perlakuan bagi kalangan/kelompok social tertentu (3)							
	Birokrasi	TB.1 Kurang tegasnya penegakan sanksi bagi SDM pelayanan yang melakukan pelanggaran (8)		Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia [SB.3; SK.2, SK.3 - TB.1]					
	Kebijakan	TK.1 Masih adanya budaya sungkan dalam penegasan aturan pelayanan							

2.4.2 Strategi Smart Governance

Strategi yang disusun pada dimensi *Smart Governance* seperti terlihat pada Tabel 0.2.

Tabel 0.2 Strategi Smart Governance

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi Smart City
Pelayanan Publik (Public Service)				
PS01	G1. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	G1S1. Menciptakan Layanan Publik yang Efektif dan Efisien G1S2. Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Publik	Misi 1 Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akuntabel

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi <i>Smart City</i>
PS02	G2. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat	Indeks Harga Konsumen (IHK)	G23S1. Meningkatkan Ketersediaan Informasi Penyediaan Kebutuhan Bahan dan Jasa Pokok	Misi 1 Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akuntabel
PS03	G3. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok			
Manajemen Birokrasi Yang Efisien (<i>Bureaucracy</i>)				
BR01	G4. Menciptakan Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (<i>fairness</i>), bertanggung-jawab (<i>accountability</i>) dan keterbukaan (<i>transparency</i>) dengan dukungan TIK..	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	G4S1. Menguatkan Tata Kelola Birokrasi G4S2. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Misi 1 Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akuntabel
Efisiensi Kebijakan Publik (<i>Public Policy</i>)				
PP01	G5. Mengambil kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat	Tingkat Keterbukaan Kebijakan Publik	G56S1. Meningkatkan Efisiensi Kebijakan Publik	Misi 1 Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akuntabel
PP02	G6. Mengembangkan Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.			



2.5 *Smart Branding*

Tujuan yang disusun pada *Smart Branding* adalah Membangun citra positif kota Madiun sebagai *destination tourism* kepada khalayak ramai.

2.5.1 Analisis Strategi *Smart Branding*

Smart Branding adalah upaya membangun reputasi yang baik dari sebuah kota. Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dan observasi di lapangan, Kota Madiun memiliki kekhasan budaya yang dapat menjadi ruh dari *Smart Branding* Kota Madiun. Kuliner pecel yang khas, seni tari, pencak silat, gedung-gedung kuno, industri Kereta Api (KA) hingga sejarah kotanya. Dari riset- riset tersebut ditemukanlah alternatif -alternatif *tagline* untuk mengkomunikasikan karakteristik dan potensi kota madiun sebagai sebuah brand:

Madiun Kampiun Madiun Kota Pendekar

Kota Madiun dikenal sebagai pusat dari beberapa perguruan pencak silat besar yang nasional. Dan berangkat dari hal ini serta semangat Kependekaran yang melegenda dari para pendahulu Madiun maka slogan Kota Madiun Kota Pendekar berkumandang.

Semangat kependekaran itulah yang kemudian menjadi motor penggerak dari setiap sendi kegiatan yang harapannya adalah menjadikan Madiun sebagai pemenang (*champion*).

Kata kampiun merupakan serapan dari Bahasa asing yakni *Champion*. Yang memiliki arti juara. Kampiun adalah juara. Tagline ini lebih bersifat lokal dan nasional. Dengan *tagline* Madiun Kampiun, diharapkan persepsi positif dibenak masyarakat akan beragam potensi yang dimiliki kota Madiun mudah diingat dan menarik khalayak untuk berkunjung ke kota Madiun. Bahwa kota Madiun memang Kampiun, Kampiun Kulinerinya, Kampiun Budayanya, Kampiun Tariannya, Kampiun Sejarahnya, Kampiun Taman kotanya, Kampiun gedung-gedungnya, Kampiun pendekarnya, kampiun lingkungannya, kampiun warga kotanya, kampiun kotanya.

Menggambarkan Kota Madiun Kampiun *tagline*berbahasa Indonesia ini sangat mudah untuk diingat dan mampu mewakili karakteristik, semangat dan identitas kota bila dilakukan aktivasi brandnya dengan branding yang sudah melekat yakni **Madiun Kota Pendekar**.



Penyusunan strategi pada dimensi *Smart Branding* akan diuraikan pada Tabel 0.3.

Tabel 0.3 Matrik SWOT *Smart Branding*

TOWS MATRIX - SMART BRANDING KOTA MADIUN	Strength					Weakness						
	TOURISM (Membangun Ekosistem Pariwisata) & APPEARANCE (penataan wajah Kota)	Ruang terbuka Hijau (RTH) sebagai wahana rekreasi keluarga	Cagar Budaya sebagai wahana rekreasi dan edukasi keluarga	Rebranding Sambel, Pecel, Bluder dan Madu mongso sebagai daya tarik wisata kuliner	Rebranding Hotel di Kota Madiun	Batik Khas Madiun sebagai bagian wisata budaya dan fashion	TOURISM (Membangun Ekosistem Pariwisata) & APPEARANCE (penataan wajah Kota)	Ruang terbuka Hijau (RTH) sebagai wahana rekreasi keluarga	Cagar Budaya sebagai wahana rekreasi dan edukasi keluarga	Rebranding Sambel, Pecel, Bluder dan Madumongso sebagai daya tarik wisata kuliner	Rebranding Hotel di Kota Madiun	Batik Khas Madiun sebagai bagian wisata budaya dan fashion
ST.1 terdapat TOL Trans Jawa	SR.1 terdapat TOL Trans Jawa	SC.1 cagar budaya	SK.1 32 Hotel di Madiun	SH.1 TOL trans Jawa	SB.1 TOL trans Jawa	WT.1 belum ada	WR.1 Minimnya rasa	WC.1 Rusa	WK.1 belum ada pusat jajanan	WH.1 Menjamurnya rumah kos	WB.1 belum ada	
ST.2 Stasiun Besar	SR.2 Stasiun Besar	SC.2 Bus Pariwisata	SK.2 Menjamurnya bisnis online	SH.2 Stasiun besar	SB.3 kampung batik	WT.2 bersama	WR.2 Kurangnya kesadaran	WC.2 Rusa	WK.2 oleh-oleh pengemasan belum marketable	WH.2 Menurunnya angka hunian di	WB.2 industri batik	
ST.3. Padepokan	SR.3	SC.3 Komunitas pemerhati budaya	SK.3 e-Commer galery	SH.3 32 Hotel di Madiun	SB.4 10 motif Batik Khas	WT.2 Belum menampakkan	WR.2 Kurangnya kesadaran	WC.2 Rusa	WK.2 oleh-oleh pengemasan belum marketable	WH.2 Menurunnya angka hunian di	WB.2 industri batik	

	Pencak Silat OT.4 Festival Seni Pencak Silat Nusanta ra												
Ruang terbuka Hijau (RTH) sebagai wahana rekreasi keluarga	OR.1 Layanan Bus Pariwisata OR.2 Jum'at bersepeda bersama walikota dan warga ke RTH								Mem per cantik Wajah Kota [WR.1, WR.2 - OR.1]				
Cagar Budaya sebagai wahana rekreasi dan	OC.1 Layanan Bus Pariwisata OC.2 Dibukany			Memperta hankan Kearifan Budaya Lokal [SC.1,									



	edukasi keluarga	a akses ke seluruh cagar budaya OC.3 Pendanaan Rehabilitasi Cagar budaya			SC.2, SC.3 - OC.2, OC.3]								
	Rebranding Sambel Pecel, Bluder dan Madumongso sebagai daya tarik wisata kuliner	OK.1 Festival Pecel Pincuk OK.2 Penyajian menu di hotel dan restoran	Meningkatkan Kualitas Destinasi Wisata Khas Madiun [ST.1, ST.2 - OK.1]										
	Rebranding Hotel di Kota	OH.1 Festival budaya di											Meningkatkan Kemudahan Akses Potensi Wisata [WK.1, WK.2, WK.3; WH.1;



	agenda yang meresahkan													
Ruang terbuka Hijau (RTH) sebagai wahana rekreasi keluarga	TR.1 Rusak karena pengaruh cuaca TR.2 Vandalis me													
Cagar Budaya sebagai wahana rekreasi dan edukasi keluarga	TC.1 Rusak karena pengaruh cuaca TC.2 Vandalis me													
Rebranding Sambel Pecel, Bluder dan Madumo	TK.1 Klaim atas Sambel Pecel TK.2 Mudah													



	ngso bagai daya tarik wisata kuliner	kedaluars a												
	Rebrandi ng Hotel di Kota Madiun	TH.1 menjamur nya rumah kos												
	Batik Khas Madiun sebagai bagian wisata budaya dan fashion	TB.1 Persainga n antar daerah produsen batik												

7

2.5.2 Strategi *Smart Branding*

Strategi yang disusun pada dimensi *Smart Branding* seperti terlihat pada Tabel 0.4.

Tabel 0.4 Strategi *Smart Branding*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi <i>Smart City</i>
Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (<i>Tourism Branding</i>)				
TB01	B1. Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan (<i>destination</i>).	% peningkatan kunjungan wisatawan	B1S1. Meningkatkan Citra Kota Pendekar B1S2. Mempertahankan Kearifan Budaya Lokal B1S3. Meningkatkan Kualitas Destinasi Wisata Khas Kota Madiun	Misi 2 Penguatan identitas daerah
TB02	B2. Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan	Indeks Kepuasan Pengunjung (IKP)	B2S1. Meningkatkan Kemudahan Akses Potensi Wisata	Misi 2 Penguatan identitas daerah
TB03	B3. Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung		B34S1. Meningkatkan Ekosistem Budaya Pariwisata	Misi 2 Penguatan identitas daerah
TB04	B4. Membuat komunikasi yang tepat melalui kegiatan IMC untuk mengkomunikasikan <i>destination tourism</i> yang ada di kota Madiun dengan berbagai media yang dibutuhkan			



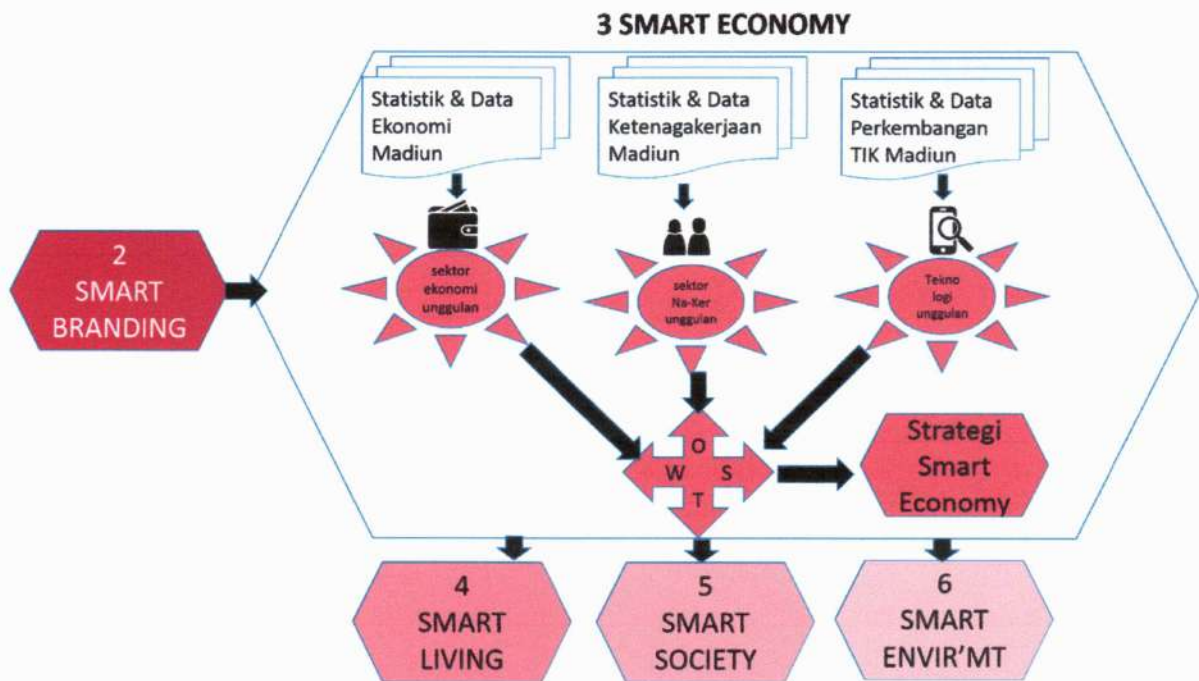
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi Smart City
Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (<i>Business Branding</i>)				
BB01	B5. Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif	% Pertumbuhan Sektor Perdagangan	B5S1. Mengembangkan Industri Kreatif	Misi 2 Penguatan identitas daerah
Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (<i>City Appearance Branding</i>)				
CBO1	B6. Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.	% RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota)	B6S1. Mempercantik Wajah Kota	Misi 2 Penguatan identitas daerah



2.6 Smart Economy

Dimensi ketiga dalam *Smart City* adalah *Smart Economy* atau tata kelola perekonomian yang cerdas. *Smart Economy* bertujuan: Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*, keterbukaan informasi pasar dan pemanfaatan teknologi secara maksimal.

Tujuan dan sasaran tersebut dilakukan melalui tiga pilar *Smart Economy*, yaitu ekosistem **industri**, peningkatan **kesejahteraan** masyarakat, dan ekosistem **transaksi** keuangan. Dalam melakukan penyusunan strategi *smart economy* digunakan metodologi seperti pada Gambar 0.1.



Gambar 0.1 Metodologi penyusunan Strategi Smart Economy

Kondisi eksisting di tiap sub dimensi *Smart Economy* akan dipaparkan lebih lanjut sebagai berikut. Sub dimensi yang dimaksud meliputi industri, kesejahteraan, dan transaksi.

Sub Dimensi Industri (*Industry*)

Pembangunan industri dalam *Smart Economy* bertujuan untuk membangun industri ekonomi yang berdaya saing, yaitu sektor ekonomi yang menunjukkan unggulan daerah yang terintegrasi dalam suatu rantai nilai.



Menurut BPS Kota Madiun mencatat bahwa terdapat 22 sektor ekonomi pembentuk PDRB, namun hanya terdapat 9 (Sembilan) sektor lapangan pekerjaan. Untuk itu, ke-22 sektor ekonomi yang ada di kelompokkan ke dalam sektor kerja, sehingga bisa dapat dibandingkan nantinya untuk mencari sektor ekonomi unggulan.

Secara terperinci pertumbuhan ekonomi di masing-masing sektor ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 0.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2017-2021 (%)

Kategori		2017	2018	2019	2020	2021*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,78	1,78	-0,94	11,57	-7,26
B	Pertambangan dan	2,31	1,07	2,41	-5,65	-4,12
C	Industri Pengolahan	8,00	7,01	4,64	-12,84	6,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,91	5,45	6,69	1,98	2,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	6,84	4,44	4,52	4,86	6,28
F	Konstruksi	5,57	2,03	4,90	-4,71	-0,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	5,83	7,54	6,20	-11,18	10,16
H	Transportasi dan Pergudangan	8,18	8,48	9,11	-4,38	7,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,47	9,23	8,86	-7,98	3,21
J	Informasi dan Komunikasi	6,77	5,34	4,58	16,12	4,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,88	4,08	4,79	-0,66	0,47
L	Real Estate	4,22	3,57	5,96	0,33	1,19
M N	Jasa Perusahaan	6,34	5,31	6,1	-3,18	0,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,46	4,48	3,85	-2,23	-0,99

Kategori		2017	2018	2019	2020	2021*
P	Jasa Pendidikan	4,50	4,21	7,65	1,97	0,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,93	7,38	7,52	9,98	5,46
R, S, T, U	Jasa lainnya	4,14	5,74	6,92	-10,68	4,08
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,93	5,98	5,69	-3,39	4,73

Sumber Data: BPS Kota Madiun

*) Angka Sementara



Dari gambar Tabel diatas terlihat pada tahun 2021 Kota Madiun memiliki 5 (lima) sektor utama pendukung ekonomi yaitu:

1. Sektor Perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi sepeda motor dan mobil, penyediaan akomodasi dan makan minum – dengan kontribusi terhadap PDRB kota Madiun sebesar 25,27%
2. Sektor Transportasi dan Pergudangan dengan kontribusi terhadap PDRB kota Madiun sebesar 17,84%
3. Sektor industri pengolahan – dengan kontribusi terhadap PDRB kota Madiun sebesar 16,02%
4. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan kontribusi terhadap PDRB kota Madiun sebesar 15,62%
5. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan kontribusi terhadap PDRB Kota Madiun sebesar 13,58%.

Dengan sasaran Kota Madiun yang mengedepankan aspek pariwisata sebagai pendorong ekonominya, keseimbangan pembangunan Kota Madiun tidak hanya mengandalkan satu sektor, tetapi didukung oleh sektor-sektor lainnya yang merupakan modal harus terus dijaga. Ekonomi yang memiliki pertumbuhan didukung oleh multi sektor, akan dapat lebih mempercepat pembangunannya.

Jika mengacu kepada struktur industri, maka Kota Madiun merupakan kota yang menjadi pemicu pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya, karena sektor yang tumbuh adalah sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (industri jasa). Sektor primer belum berkontribusi banyak secara ekonomi terhadap PDRB Kota Madiun (bahkan trend pertumbuhannya minus). Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa wilayah perkotaan memiliki lahan yang terbatas untuk industri primer, seperti pertanian dan peternakan /perikanan/kehutanan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang sehat adalah pertumbuhan ekonomi yang juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Untuk itu, sub bab berikut akan membahas dimensi kesejahteraan dalam penyusunan strategi *Smart Economy* kota Madiun.

Sub Dimensi Kesejahteraan (Welfare)

Pembangunan *Smart Economy* yang mengusung aspek kesejahteraan ditujukan agar program-program ekonomi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat secara adil dan merata, yang tercermin dalam pendapatan rumah tangga. Dan pendapatan rumah tangga tercermin dari tingkat serapan ketenagakerjaan yang ada.



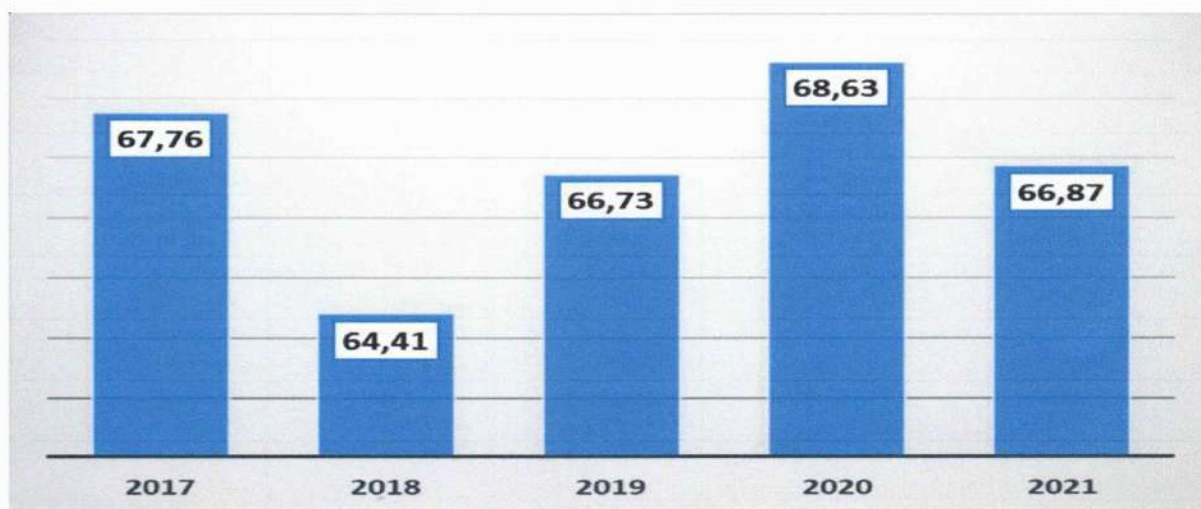
Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Madiun. Penduduk usia kerja pada Agustus 2021 sebanyak 144.219 ribu orang, naik sebanyak 658 orang dibanding Agustus 2020. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 96,44 ribu orang (66,87 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2021 terdiri dari 88,58 ribu orang penduduk yang bekerja dan 7,86 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2020 terjadi penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 2,09 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami penurunan sebanyak 1,75 ribu orang dan pengangguran juga turun sebanyak 336 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2021 sebesar 66,87 persen, turun 1,76 persen poin dibanding Agustus 2020. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 75,16 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 59,31 persen. Apabila dibandingkan Agustus 2020, baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan mengalami penurunan, yaitu masing-masing turun sebesar 3,64 persen poin untuk TPAK laki-laki dan 0,04 persen poin untuk TPAK perempuan.

Grafik 0.1 TPAK Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2017-2021



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka atau sering disebut dengan pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja dan penganggur. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Tabel 0.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2021

KEGIATAN	2020	2021
ANGKATAN KERJA	98.529	96.439
- BEKERJA	90.334	88.580
- PENGANGGURAN	8.195	7.859
BUKAN ANGKATAN KERJA	45.032	47.780
PENDUDUK USIA KERJA	143.561	144.219

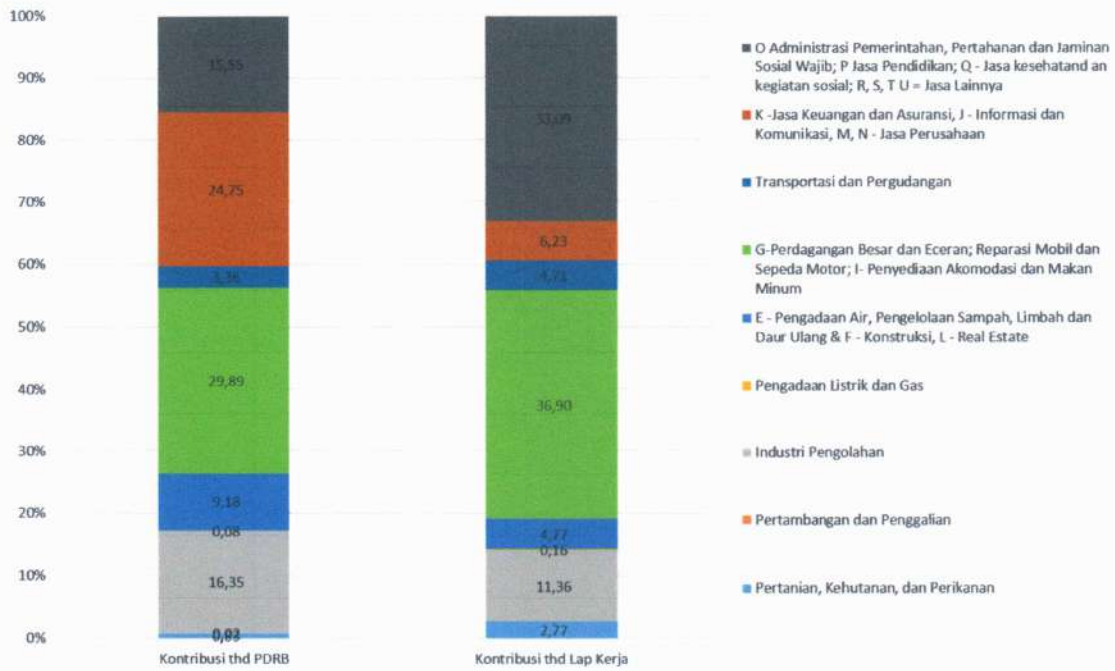
Kota Madiun merupakan kota yang beruntung karena memiliki banyak penduduk di usia produktif (usia 15 s.d 64 tahun) yakni 138.802 atau 68,9% dan akan memiliki bonus demografi karena penduduk usia sekolah sebentar lagi akan memasuki usia produktif.

Di satu sisi, bonus demografi ini merupakan peluang, namun disisi lain, menjadi tantangan bagi Kota Madiun untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduknya. Ancaman yang terjadi jika kota Madiun tidak dapat menciptakan bagi penduduknya adalah akan terjadi *brain drain* (keluarnya penduduk usia produktif, yang berpendidikan dan berkeahlian untuk bekerja diluar Kota Madiun), yang menyebabkan Kota Madiun akan kehilangan tenaga kerja berkualitas yang dimilikinya.

UMK Kota Madiun pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.954.705,-. UMK Kabupaten Madiun yang sebesar Rp. 1.951.588,-, sedangkan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo UMK-nya sama yakni Rp.1.938.321,-. Dan untuk Kabupaten Ngawi dan Pacitan UMK-nya lebih besar dari Kota Madiun yang menjadi pusat dari ex-karesidenan Madiun yakni masing-masing UMK-nya Rp. 1.960.510,- dan Rp.1.961.154,-. Sehingga untuk skala perkotaan di Provinsi Jawa Timur, Kota Madiun merupakan kota dengan Upah Minimum Kota (UMK) yang tergolong rendah.



Kontribusi Sektor terhadap Ekonomi & Lapangan Kerja di Madiun, tahun 2017



Sumber: BPS Kota Madiun, 2018

Dengan karakter wilayah Madiun yang berbasis pertanian, industri pengolahan hasil makanan merupakan unggulan Kota Madiun, seperti sambel pecel dan industri pendukung lainnya (krupuk puli), sedangkan di sektor perdagangan, secara geografis Madiun merupakan wilayah yang berada di jalur utama menuju Surabaya/ Solo, dan jalur kereta api. Sejarah mencatat bahwa kota Madiun merupakan sentral dari Karisidenan Madiun, yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan dan Ponorogo. Kota Madiun berperan sebagai lokomotif ke-6 daerah ini. Meskipun saat ini sudah tidak ada lagi karisidenan, namun hubungan ekonomi antar kota Madiun masih terus berjalan, karena daerah-daerah penyangga ini merupakan sentra industri primer (pertanian/ perkebunan/ perikanan) yang mendukung sektor industri pengolahan dan perdagangan di Kota Madiun.

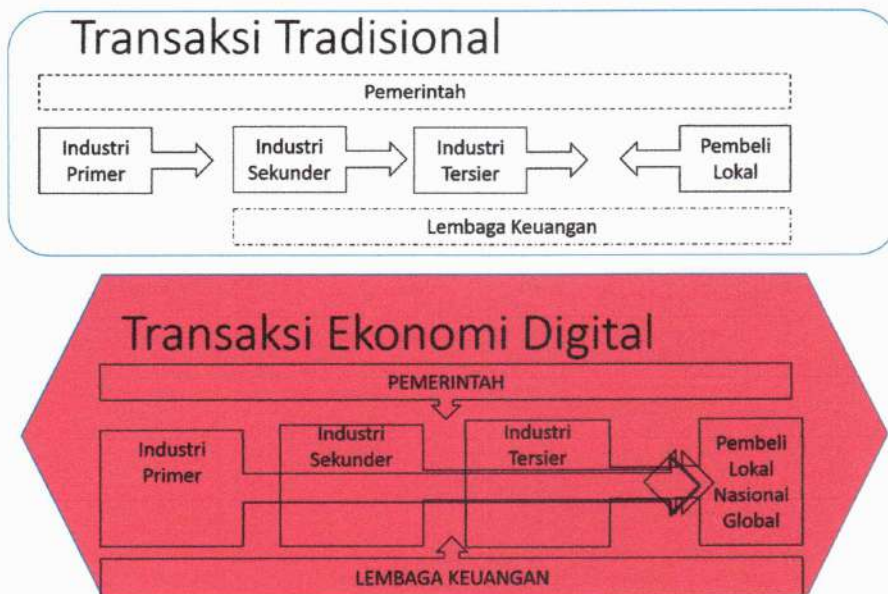
Dari data diatas secara garis besar dapat diindikasikan bahwa sektor pengolahan pangan, merupakan sektor kunci yang sudah terbangun ekosistemnya, dan merupakan sektor unggulan Kota Madiun. **Sambel Pecel** merupakan salah satu produk unggulan dari sektor olahan pangan ini. Selain sambel pecel terdapat juga jajan khas **Madu mongso** dan kue/roti yang saat ini juga sudah menjadi unggulan sebagai oleh- oleh khas Kota Madiun yaitu **Bluder**. Menimbang bahwa olahan khas tersebut bisa dilakukan oleh berbagai jenis skala industri, mulai dari mikro hingga menengah, maka ideal jika menjadikan sambel Pecel, Madu Mongso dan Bluder sebagai *icon* produk utama Kota Madiun.



Bluder telah menjadi buah tangan milenial yang menarik saat ini dari mereka yang datang ke Kota Madiun. Sedangkan Pecel dan Madu Mongso yang identik dengan makanan rakyat, perlu diperkenalkan lebih intensif kepada para anak muda, sebagai generasi penerus ekonomi Madiun dan daerah sekitarnya. Perlu suatu terobosan sehingga para generasi muda bangga akan produk lokal, dan tertarik untuk mengembangkannya. Mengambil contoh daerah-daerah lain di Jawa Timur seperti Malang, Batu, Banyuwangi, Surabaya, maka icon ekonomi pun perlu di bangun. “Peceland” merupakan icon yang berasosiasi dengan modernisasi pecel, madu mongso dan warisan khas lainnya, tanpa meninggalkan ke-tradisional-annya.

Sub Dimensi Transaksi (Transaction)

Kegiatan ekonomi dikatakan berhasil jika terjadi transaksi di dalamnya. Dimensi transaksi dalam *Smart Economy* ditujukan untuk membangun ekosistem transaksi keuangan yang cerdas, yaitu yang menjamin kemudahan bertransaksi, melalui transaksi digital yang *less cash* (mengurangi transaksi tunai), dengan didukung oleh usaha- usaha yang melek keuangan (*financial literate*) dalam suatu ekosistem keuangan yang terpadu. Transaksi digital dapat mempermudah usaha mikro - kecil - menengah dan besar dalam mengakses pasar yang lebih luas, mendekatkan hubungan antara pemasok dan pembeli dan menawarkan efisiensi dalam rantai nilai sehingga dapat berdaya saing. Peran lembaga keuangan dan pemerintah dapat lebih optimal, seperti terlihat di Gambar 0.2.



Gambar 0.2 Transaksi Ekonomi Tradisional vs Transaksi Ekonomi Digital



Kegiatan ekonomi digital dapat terjadi jika:

- a) Pengusaha sudah melek teknologi digital
- b) Tersedia infrastruktur teknologi digital meliputi infrastruktur komunikasi maupun platform untuk melakukan transaksi digital

Terdapat 3 jenis digitalisasi ekonomi yaitu:

- a) **Digitalisasi pasar** – meraih pembeli dengan cara digital, seperti dengan berjualan online, melalui pasar digital yang ada, seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, aplikasi Gojek, aplikasi Grab maupun pasar yang dikelola sendiri seperti website, instagram maupun facebook perusahaan.
- b) **Digitalisasi sistem pembayaran** – memudahkan pembeli dalam melakukan pembayaran non tunai, seperti menyediakan pembayaran melalui transfer bank baik rekening sendiri maupun rekening virtual, melalui uang digital (seperti *Go-Pay*, *Ovo*, *Link Aja*) atau pembayaran melalui kartu kredit dan kartu e-money lainnya.
- c) **Digitalisasi pengelolaan keuangan** – memudahkan pengusaha dalam mengelola usahanya melalui pencatatan keuangan, pelaporan dan analisa keuangan digital, seperti dengan menggunakan aplikasi *Zahir Simply* – sistem akuntansi keuangan yang berbasis *cloud* yang mudah dilakukan dan terjangkau bagi pengusaha.

Digitalisasi pengelolaan keuangan akan membantu lembaga di luar rantai nilai, seperti pemerintah dan lembaga keuangan, untuk dapat memberikan dukungan optimal terhadap para pelaku ekonomi, karena mereka akan dapat melihat laporan keuangan yang transparan, serta menilai kinerja perusahaan. Dengan demikian, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan ekonomi yang tepat, seperti insentif pinjaman usaha, pengurangan pajak, dan sebagainya.

Kota Madiun merupakan kota yang sangat dinamis, dipenuhi oleh anak-anak muda yang sangat terbuka untuk maju dan ketersediaan lembaga keuangan yang merespon kebutuhan pasar dan memperkenalkan teknologi digital dalam transaksi keuangan. Pada sektor perdagangan, sudah terlihat transaksi *Go-Jek*, *Grab* yang dijalankan dengan menggunakan pembayaran digital. Di satu sisi, digitalisasi ekonomi ini membuka peluang pasar dan pekerjaan, namun di sisi lain, digitalisasi ekonomi ini juga menyebabkan kesenjangan antara pelaku di pasar. Untuk tetap menjaga ekonomi yang sehat, perlu dibuat suatu strategi agar *Smart Economy* dapat memenuhi ketiga dimensinya seperti didiskusikan diatas.



2.6.1 Analisis Strategi *Smart Economy*

Telaah SWOT dilakukan sebagai upaya untuk memahami kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), kesempatan (*Opportunities*) dan tantangan (*Threats*) dari sektor ekonomi unggulan Madiun, yaitu sektor industri pengolahan khususnya di rantai nilai sambel pecel, madu mongso dan industri perdagangan, yaitu restoran dan rumah makan, maupun toko oleh- oleh yang membantu akses pasar industri pengolahan.

Penyusunan strategi pada dimensi *Smart Economy* akan diuraikan pada Tabel 0.5.



Tabel 0.5 Matrik SWOT Smart Economy

TOWS MATRIX - SMART ECONOMY KOTA MADIUN	Strength			Weakness		
	Industri	Kesejahteraan Masyarakat	Transaksi Keuangan	Industri	Kesejahteraan Masyarakat	Transaksi Keuangan
	KI.1 Banyaknya IKM (1000an) --> industri sekunder KI.2 Banyak petani (peternakan, perikanan) --> industri primer KI.3 Adanya perda yang mengatur pasar modern KI.4 Ikon makanan khas Sambel Pecel, Madu Mongso dan Bluder	KK.1 Banyak pelatihan peningkatan ketrampilan usaha KK.2 Insentif pajak untuk wajib pajak baru (3 bulan bebas pajak) KK.3 Prioritas pencari kerja diutamakan KTP Kota Madiun	KT.1 Fasilitas rekomendasi pendanaan ke bank daerah	KM.1 Kemampuan pelaku industri sekunder terbatas KM.2 Ketersediaan lahan industri primer terbatas KM.3 Area pemasaran industri terbatas KM.4 Belum optimalnya tingkat daya saing produk (belum terstandarisasi) KM.5 Pelaku usaha belum terpusat (karena berawal dari	KS.1 Pola pikir bersaing pelaku usaha kurang (termasuk kesadaran pajak, legalitas, varian produk, kualitas/standarisasi, packaging)	KR.1 Belum siapnya daerah untuk menyediakan sistem yang mempermudah pembayaran pajak (misal: tersedia kode bayar untuk pembayaran pajak) KR.2 Ketergantungan pada petugas pungut pajak maupun retribusi masih tinggi KR.3 Budaya cashless masih rendah

				industri rumah tangga) KM.6 Belum adanya sentralisasi pelaku industri informal (misal: pusat PKL) KM.7 Kesulitan membuat sentra karena pelaku usaha sejenis menyebar di beberapa lokasi KM.8 Belum tegasnya penegakan Perda bagi pelaku industri KM.9 Bahan baku berkualitas tidak tersedia (bergantung daerah lain) KM.10 10 Karakter produk belum kuat belum kuat		
--	--	--	--	--	--	--



						sebagai simbol kuliner khas Kota Madiun		
Opportunitas	Industri	PI.1 Pusat wilayah pengembangan Jawa Timur Bagian Barat PI.2 Sebagai kota transit perdagangan daerah sekitar				Mengembangkan Hub Industri Unggulan [KM.3 - PI.1]		
	Kesejahteraan Masyarakat	PK.1. Banyaknya wisatawan pendatang	Mengintegrasikan RIPDA (Rencana Induk Pariwisata Daerah) dengan membuat destinasi wisata kota yang baru [KI.4 - PK.1]			Menguatkan Karakter Kuliner Khas Madiun [KM.10 - PK.1]		
	Transaksi Keuangan	PT.1 Berkembangnya <i>Fintech</i>			Mengembangkan Sistem <i>Punishment-Reward</i> (pengurangan pajak,			Meningkatkan Kerjasama dengan penyedia transaksi elektronik



					kemudahan ijin, dsb.) bagi pelaku usaha yang menyediakan transaksi cashless [KK.2, PT.1]			[KR.3 - PT.1]
Threats	Industri	AI.1 Kualitas packaging produk kompetitor luar daerah bervariasi dan menarik AI.2 Banyak jenis produk yang sama AI.3 Tenaga kerja industri terampil dari luar wilayah	Meningkatkan Daya Saing Produk [KI.1 - AI.1]	Memberdayaka n SDM Usia Produktif di sektor ekonomi kreatif [KK.1, KK.3 - AI.3]	Meningkatkan Kemampuan Mengelola Transaksi Elektronik bagi pelaku usaha [KT.1 - AI.1]			
	Kesejahteraan Masyarakat	AK.1.SDM berpindah keluar dari Madiun karena kurang						



		tersedianya pekerjaan yang sesuai dengan bakat minat dan keahlian							
	Transaksi Keuangan	AT.1. Belum banyak dan meratanya usaha di Madiun yang menggunakan pembayaran <i>cashless</i> AT2. Belum banyak dan meratanya usaha yang mencatat keuangan secara digital							



2.6.2 Strategi *Smart Economy*

Strategi yang akan dilakukan dalam pembangunan *Smart Economy* seperti dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 0.6 Strategi *Smart Economy*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi <i>Smart City</i>
Membangun Ekosistem Industri yang Berdaya Saing (<i>Industry</i>)				
IN01	E1. Membangun daya saing industri daerah pada leading sektor industri tertentu yang terintegrasi dalam suatu rantai nilai	% peningkatan indeks pendapatan daerah dari sektor industri #industri pengolahan pangan #perusahaan perdagangan hasil olahan pangan	E1S1. Mengintegrasikan RIPDA (Rencana Induk Pariwisata Daerah) dengan membuat destinasi wisata baru E1S2. Memperkuat Karakter Kuliner Khas Madiun E1S3. Meningkatkan Daya Saing Produk E1S4. Mengembangkan Hub Industri Unggulan	Misi 3 Ekosistem industri yang berdaya saing



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi Smart City
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Welfare)				
WF01	E2. Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (income)	indeks kesejahteraan masyarakat # rumah tangga menjadi pemasok industri bumbu pecel dan kuliner khas lain # anak muda (usia 15-24 tahun) memulai wirausaha olahan pangan	E2S1. Memberdayakan SDM Usia Produktif di sektor ekonomi kreatif	Misi 3 Ekosistem industri yang berdaya saing
Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (Transaction)				
TR01	E3. Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang less cash dengan didukung oleh usaha-usaha yang melek keuangan (financial literate) dalam suatu ekosistem keuangan yang terpadu	Rerata Pendapatan Asli Daerah (PAD) # Usaha menerapkan sistem akuntansi digital # Usaha memiliki sistem pembayaran digital	E3S1. Meningkatkan Kemampuan Mengelola Transaksi Elektronik bagi pelaku usaha E3S2. Mengembangkan Sistem Punishment-Reward (pengurangan pajak, kemudahan ijin, dsb.) bagi pelaku usaha yang menyediakan transaksi cashless E3S3. Meningkatkan Kerjasama dengan penyedia transaksi elektronik	Misi 3 Ekosistem industri yang berdaya saing



2.7 Smart Living

Tujuan yang disusun pada *Smart Living* adalah Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, aman, nyaman, dan efisien.

2.7.1 Analisis Strategi *Smart Living*

Smart Living menggunakan solusi cerdas untuk mengoptimalkan infrastruktur dan pemerintahan yang cerdas dan responsif untuk melibatkan warga dalam pengelolaan kota mereka. Sistem sensor, jaringan, dan aplikasi mengumpulkan data yang berguna, seperti kemacetan lalu lintas, penggunaan energi, dan tingkat CO2. Data ini digunakan oleh pemerintah kota untuk meningkatkan kota, termasuk transportasi, bangunan, utilitas, lingkungan, infrastruktur, dan layanan publik. Secara garis besar, sasaran dalam mencapai *Smart Living* terlihat pada Gambar 3.7.



Gambar 0.3 Sasaran Dalam Mencapai *Smart Living*

Pada tingkat strategis, kota harus dapat mencapai keseimbangan antara ketiga tujuan, yaitu *harmony*, *health*, dan *mobility*. Pencapaian ketiga tujuan ini hanya bisa diwujudkan apabila ada integrasi antara *Master Plan* dan rencana Pembangunan yang didukung oleh Pemerintah Kota yang dinamis dan adaptif. Ketiga tujuan dapat tercapai apabila ada sinergi diantara sasaran sasaran program, yaitu peningkatan fasilitas kesehatan, penyediaan infrastruktur, dan pengembangan system keselamatan dan keamanan.

Peningkatan Fasilitas Kesehatan

Pada bagian peningkatan kesehatan, ada tiga komponen utama yang terintegrasi mendukung tercapainya kehidupan yang harmony, yaitu perumahan dan rumah, pemeliharaan kesehatan, dan pendidikan. Perumahan merupakan zona khusus tempat tinggal di mana lokasi perumahan menentukan jarak perjalanan ke lokasi kerja maupun sekolah. Jarak yang jauh mengakibatkan kelelahan dan kemungkinan terpapar emisi kendaraan akan menurunkan daya tahan masyarakat terhadap penyakit. Rumah, desain rumah yang sehat diperlukan untuk menjamin adanya pertukaran udara. Disain rumah yang difasilitasi dengan cahaya dan sirkulasi udara akan menghemat listrik dan mengurangi penggunaan AC.

Pemeliharaan kesehatan merupakan fasilitas penunjang pemeliharaan kesehatan masyarakat. Lokasi puskesmas atau rumah sakit yang tidak jauh dari lingkungan perumahan akan dapat menyegerakan pelayanan kesehatan. Fasilitas pendaftaran online memungkinkan pasien tidak perlu menunggu lama di puskesmas. Pelayanan pengantaran obat juga memungkinkan pasien untuk segera pulang setelah pengurusan resep obat. Poin terakhir adalah pendidikan. Pendidikan menjadi bagian dari Peningkatan Kesehatan (*Health*) terbagi menjadi dua hal, yaitu kualitas masyarakat terdidik meningkat sehingga mampu menjaga kesehatan diri dan keluarganya; sedangkan hal lainnya adalah terkait lokasi sekolah. Lokasi sekolah yang jauh memungkinkan siswa di bawah umur membawa kendaraan sendiri ke sekolah sehingga rawan terjadi kecelakaan. Disamping itu lokasi sekolah yang jauh akan menyebabkan siswa lelah di perjalanan sehingga minat belajarnya turun.

Infrastruktur

Infrastruktur yang perlu disiapkan adalah infrastruktur untuk utilitas, transportasi dan bangunan gedung maupun bangunan lain seperti jembatan, terowongan, dam dan bangunan fisik lainnya. Infrastruktur Utilitas harus menjamin efisiensi dan responsive terhadap kebutuhan pengembangan maupun pemeliharaan. Infrastruktur utilitas ini meliputi infrastruktur air bersih, lampu LED yang responsive terhadap matahari dan cuaca, dan utilitas listrik dan penggunaannya. Pada utilitas air bersih, kualitas air harus secara rutin dapat di monitor, adanya sensor kebocoran maupun aplikasi pelayanan utilitas harus responsif. Pengelolaan limbah air kotor yang arahnya *zero waste* juga disiapkan.



Lampu LED untuk PJU juga harus secara *smart* diketahui jadwal pemeliharaannya dan tingkat responsifnya terhadap perubahan cahaya, sehingga dapat otomatis menyala apabila diperlukan. *Smart Grid* menganalisa konsumsi energi dan menyalurkan kebutuhan listrik secara efisien. Infrastruktur transportasi meliputi *smart parking meter*, sensor kemacetan, aplikasi pelaporan kerusakan jalan, jalur khusus pejalan kaki, pesepeda, transportasi umum, info rute dan jadwal transportasi umum, kondisi drainase jalan untuk pencegah banjir dan kerusakan jalan. Bangunan dalam kota harus memiliki fungsi sebagai *green building* di mana *smart* penggunaan energinya, material yang digunakan adalah material ramah lingkungan, dan dilengkapi *smart utility*. Ada detektor dan pemadam kebakaran yang berfungsi secara *smart*, terdapat sensor polusi udara dan monitor perkiraan cuaca yang ditempatkan di atap gedung sehingga berfungsi untuk kota secara keseluruhan. Gedung juga dilengkapi dengan detektor sampah maksimum sehingga meminimalkan pergerakan truk sampah dalam mengangkut sampah dari gedung ke gedung lain. Terdapat detektor gempa serta sensor kualitas bangunan akibat adanya getaran yang ditimbulkan gempa.

Keselamatan dan Keamanan

Peningkatan kualitas hidup masyarakat perlu ditunjang dengan rasa aman terhadap gangguan kejahatan maupun kemungkinan kecelakaan di jalan. Untuk itu perlu ada *emergency camera*, *facial recognition camera*, dan *wearable detection*. *Emergency camera* memungkinkan untuk penolong dapat menganalisa keparahan kondisi darurat yang ada dan menemukan rute terpendek untuk mencapai lokasi darurat. *Facial recognition camera* membantu untuk mengurangi kejahatan karena adanya kemudahan dalam mengenali pelaku kejahatan. *Wearable detection* akan mendeteksi keberadaan *smartphones* menyediakan *wifi*, dan memungkinkan masyarakat atau pengunjung berkomunikasi dengan kota terkait event maupun fasilitas lain.

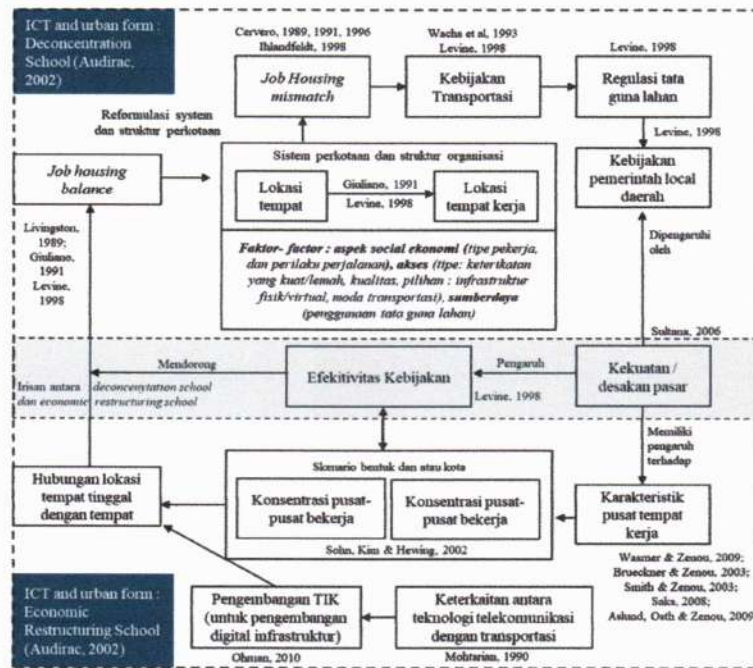
Strategi dalam persiapan Kota Madiun kearah *Smart City* perlu dimulai dengan pendataan kondisi eksisting terkait ketersediaan data, keakurasian data dan kecukupan data untuk digunakan dalam analisis SWOT.

Kesehatan

Sebagaimana telah disampaikan dalam sasaran, bahwa salah satu faktor untuk hidup secara sehat adalah lokasi perumahan dan bagaimana pengaturan tata guna lahan akan berpengaruh pada mobilisasi masyarakat.

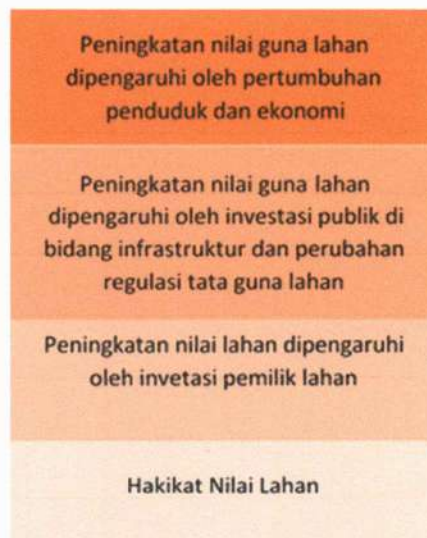


Dalam hal ini pengaturan tata guna lahan harus mempertimbangkan hal tersebut, termasuk aturan RTH. Penataan ini perlu keterlibatan Pemerintah Kota secara aktif. Secara garis besar hubungan antara perkembangan kota secara geografis dan aksesibilitasnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 0.4 Hubungan Antara Perkembangan Kota Secara Geografis dan Aksesibilitas (Sumber: Sutriadi, 2015)

Dalam kaitannya dengan pengaturan lahan, perlu dilihat nilai suatu lahan. Hal ini dimaksudkan agar peruntukan lahan tidak salah dan menjadi beban pemilik atau pemerintah dalam hal memelihara asset. Pemanfaatan asset lahan, dikenal dengan *land value capture*. LV ini dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas yang juga merupakan pengembangan lahan untuk suatu yang bernilai lebih.



Gambar 0.5 Land Value Capture (Sumber: Lubis, 2018)



Peningkatan nilai guna lahan merupakan bagian dari pengembangan kota. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun adalah pengadaan *Peceland*, serta pengembangan destinasi wisata yang *instagramable* di Kawasan Simpang Lima Diponegoro dan Kawasan Jalan Pahlawan. Nilai lahan di sekitar area tersebut otomatis akan meningkat. Perubahan fungsi dan nilai lahan ini yang perlu dikontrol oleh pemerintah dengan Smart untuk menghindari permasalahan kemacetan karena perubahan fungsi lahan. Perubahan fungsi lahan juga harus memperhatikan lokasi sekolah, perkantoran dan pusat kegiatan lainnya untuk menjaga agar infrastruktur transportasi tidak terganggu aksesibilitasnya.



Gambar 0.6 Pengontrolan Fungsi Lahan (Sumber: Lubis, 2018)

Daftar Sekolah

Berdasarkan data dari website Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (diakses pada tanggal 15 Agustus 2022), tercatat bahwa pada semester ganjil 2022/2023 total bangunan sekolah di Madiun adalah 144 sekolah, yang terdiri dari 82 sekolah negeri dan 62 sekolah swasta. Sementara jumlah perguruan tinggi di Kota Madiun adalah 4 universitas, 4 sekolah, 3 politeknik, 2 akademi. Berikut adalah data jumlah sekolah, daftar nama sekolah pada semester ganjil 2022/2023, dan daftar nama perguruan tinggi di Kota Madiun

✓

Tabel 0.7. Jumlah Sekolah di Kota Madiun pada Semester Ganjil 2022/2023

No	Wilayah	Total			SD			SMP			SMA			SMK			SLB		
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S
1	Kec. Kartoharjo	56	33	23	27	19	8	9	6	3	4	4	0	12	3	9	4	1	3
2	Kec. Taman	40	20	20	24	18	6	3	1	2	5	0	5	7	1	6	1	0	1
3	Kec. Manguarjo	48	29	19	22	19	3	11	7	4	3	2	1	10	1	9	2	0	2
Total	Total	144	82	62	73	56	17	23	14	9	12	6	6	29	5	24	7	1	6

Sumber : <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp/2/056200>

Keterangan :

N : Sekolah Negeri

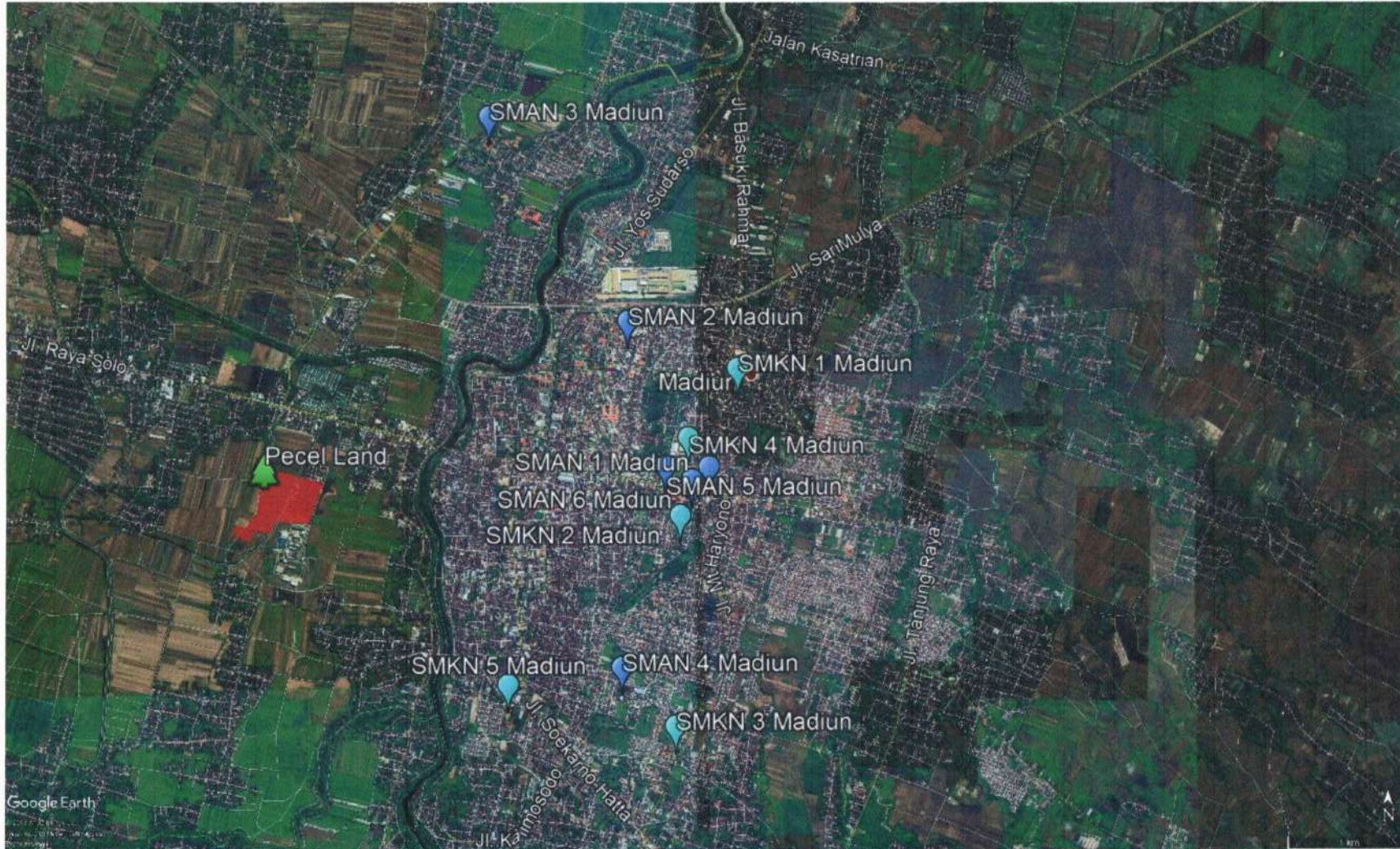
S : Sekolah Swasta



Tabel 0.8. Daftar Nama Perguruan Tinggi Di Kota Madiun

No	Jenis	Nama Perguruan Tinggi
1	Universitasa	Universitas Merdeka Madiun Universitas Katolik Widya Mandala Madiun Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) Universitas Muhammadiyah Madiun
2	Sekolah	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Madiun Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun STKIP Widya Yuwana STIKES Bhakti Husada Madiun
3	Politeknik	Politeknik Negeri Madiun Politeknik Indonesia Madiun Politeknik Perkeretaapian Indonesia
4	Akademi	Akademi Manajemen Koperasi Tantular ASM Widya Mandala Madiun

Dibawah ini merupakan peta akses menuju SMA dan SMK yang ada di Kota Madiun.



Gambar 0.7 Akses Menuju SMA dan SMK di Kota Madiu



Daftar Industri dan Kantor

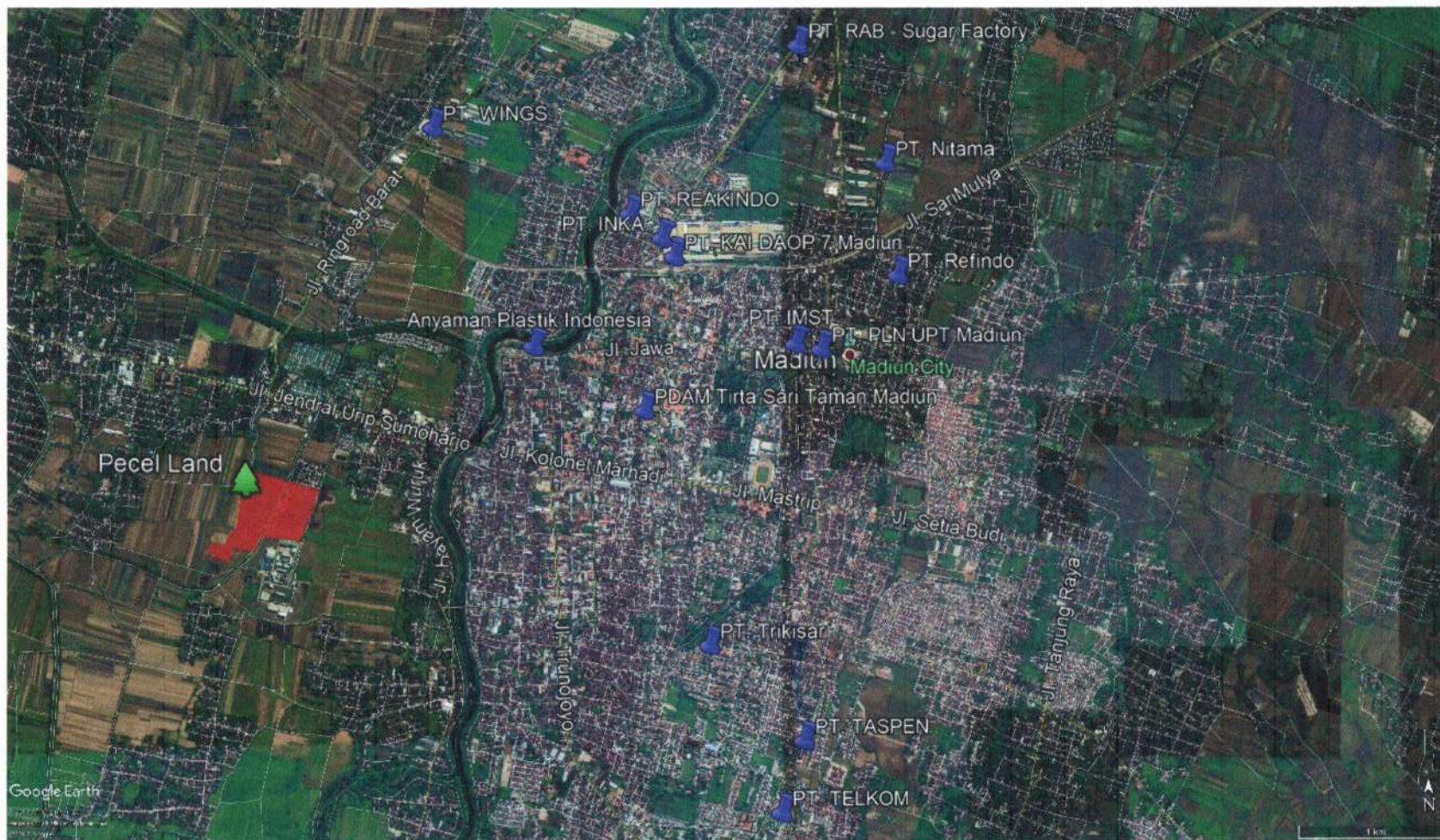
Mengutip dari website www.madiunkota.go.id, terdapat 59 kantor PD di Kota Madiun. Mulai dari kantor Dinas hingga kantor Kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Madiun. Untuk sektor industri, Kota Madiun merupakan salah satu yang berperan besar di dalam industri kereta api. PT. Industri Kereta Api merupakan salah satu perusahaan yang berada di Kota Madiun yang menjadi produsen kereta api terintegrasi pertama di Asia Tenggara. Selain dioperasikan di Indonesia, produk dari PT INKA telah menyebar dan beroperasi di beberapa negara, seperti Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura dan Australia. Selain PT INKA juga banyak perusahaan lain yang bertempat di Kota Madiun. Berikut adalah daftar nama Industri dan Kantor yang berada di wilayah administratif Kota Madiun.





Gambar 0.8 Akses Menuju Kantor OPD Kota Madiun

1



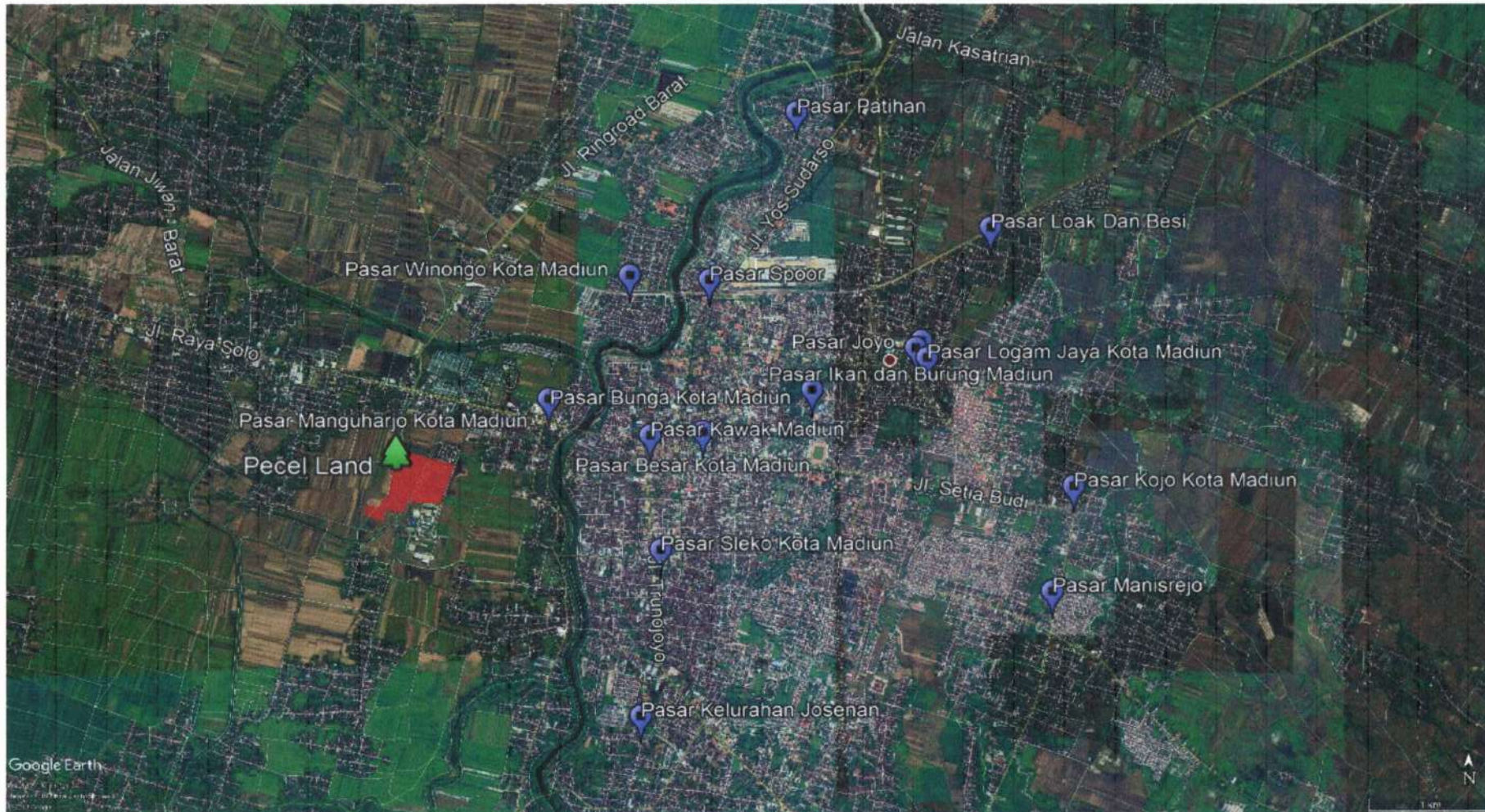
Gambar 0.9 Akses Menuju Beberapa Industri di Kota Madiun



Daftar Pasar/Pusat Perbelanjaan (Mall)

Berdasarkan data pasar/pusat perbelanjaan yang ada di Kota Madiun, dipetakan berdasarkan akses menuju lokasinya seperti dibawah ini.





Gambar 0.10 Akses Menuju Pasar di Kota Madiun

1



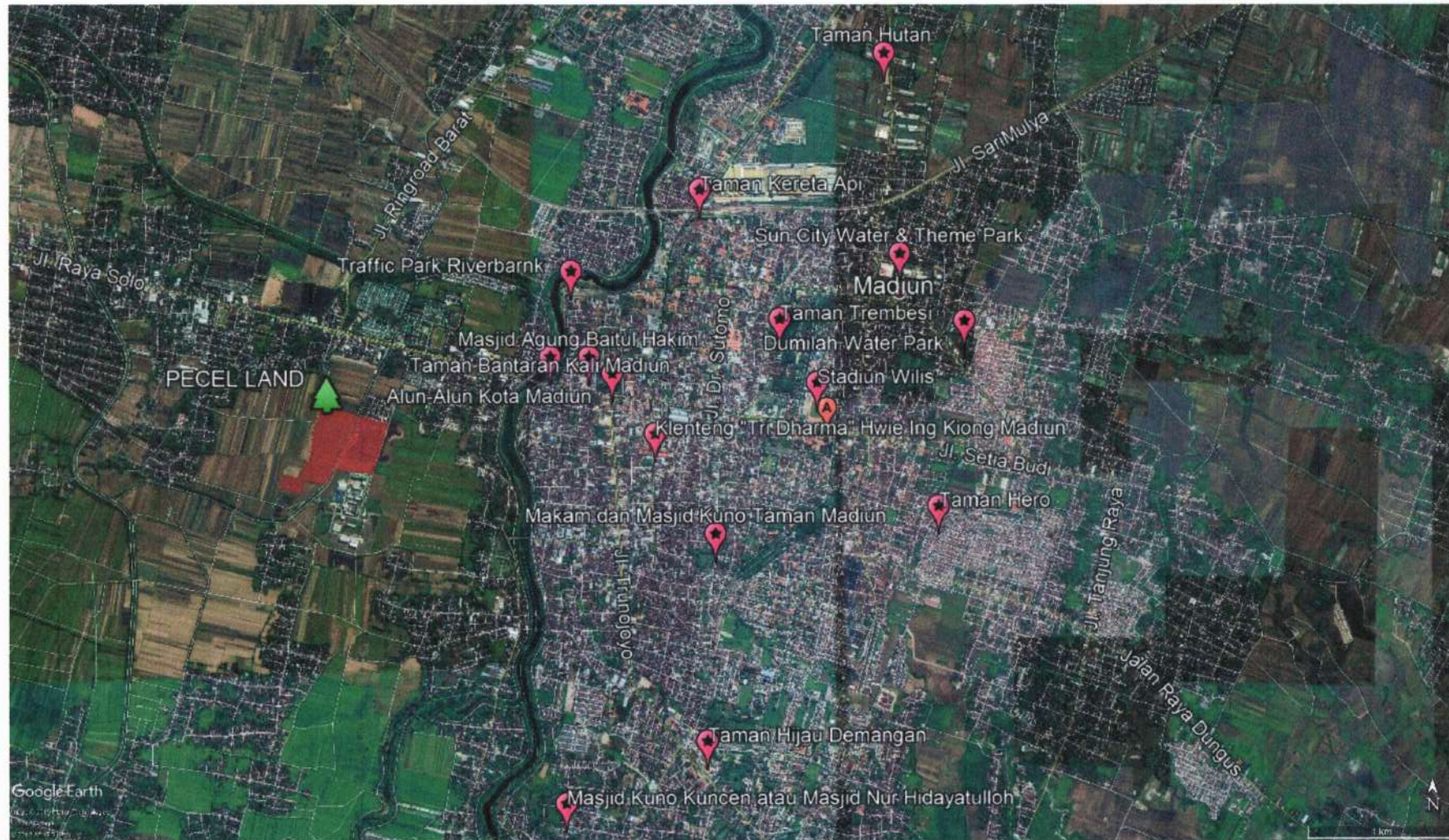
Gambar 0.11 Akses Menuju Pusat Perbelanjaan atau Plaza di Kota Madiun



Daftar Pariwisata

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau dalam suatu kota merupakan salah satu langkah untuk penghijauan kota dan menekan pemanasan global. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. Beberapa taman di Kota Madiun juga menjadi tempat wisata bagi masyarakat. Pemerintah juga sudah menyediakan prasarana yang baik, seperti misalnya tempat duduk dan penerangan yang cukup. Selain taman, wisata di Kota Madiun juga terdapat *water park* dan tempat bersejarah seperti masjid kuno. Berikut adalah daftar pariwisata di Kota Madiun :



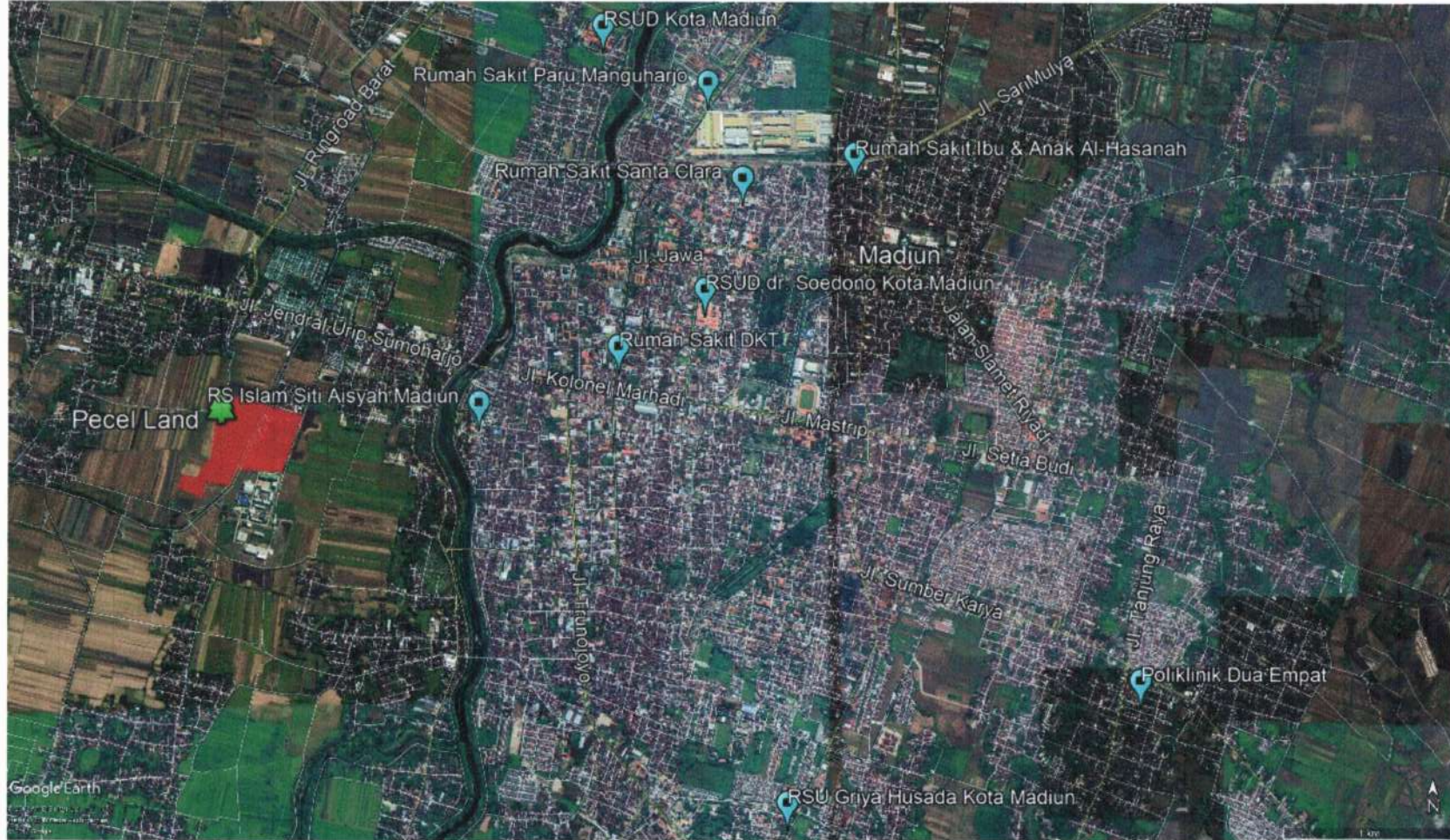


Gambar 0.12 Akses Menuju Pariwisata di Kota Madiun



Daftar Rumah Sakit

Berikut ini merupakan peta daftar rumah sakit dan aksesnya.



Gambar 0.13 Akses Menuju Rumah Sakit di Kota Madiun



Data Demografi

Mengutip dari publikasi Kota Madiun Dalam Angka 2021 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Kota Madiun jumlah penduduk Kota Madiun pada bulan September 2020 menurut hasil SP2020 adalah sebanyak 195.175 jiwa. Dengan luas wilayah 33,23 km² persegi, kepadatan penduduk adalah sebanyak 5.873 jiwa per km². Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk perempuan sebanyak 99.733 jiwa, jumlah ini lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 95.442 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 96.

Berikut adalah data penduduk dari Badan Pusat Statistik Kota Madiun.

Tabel 0.8 Jumlah penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2020

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2020	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Manguharjo	57.779	1,53	29,60	5755	97
Taman	83.698	1,38	42,88	6717	95
Kartoharjo	53.698	0,91	27,51	5004	95
Kota Madiun	195.175	1,29	100,00	5873	96

Sumber Data: Kota Madiun Dalam Angka tahun 2021

Tabel 0.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut di Kota Madiun Tahun 2022

Kecamatan/ Kelurahan	Agama					
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Kec.Kartoharjo						
Oro-Oro Ombo	6.043	259	382	3	2	1
Sukosari	2.711	112	140	3	0	0
Klegen	7.605	296	442	13	10	1
Rejomulyo	9.505	250	505	1	2	0
Pilangbango	4.483	16	56	0	0	0
Tawangrejo	3.928	68	100	1	0	0
Kanigoro	8.472	222	396	3	9	3
Kartoharjo	4.251	251	422	2	39	0
Kelun	4.406	39	146	0	0	0
Kec.Manguharjo						
Manguharjo	7.260	89	234	7	11	0
Sogaten	3.949	53	193	2	0	2
Patihan	4.585	165	298	6	0	0
Ngegong	3.051	26	95	1	0	1
Winongo	7.174	196	323	3	3	0
Madiun Lor	5.838	399	473	1	21	0
Pangongangan	2.902	271	260	4	51	0
Nambangan Lor	11.086	355	927	37	66	1
Nambangan Kidul	8.783	211	667	5	17	1
Kec. Taman						
Mojorejo	10.437	297	501	14	14	2
Pandean	7.916	549	1.297	24	195	6
Banjarejo	8.500	133	242	5	0	0
Kuncen	1.356	3	37	0	0	0

Manisrejo	14.686	510	632	7	12	4
Kejuron	7.794	449	941	2	73	4
Josenan	6.839	72	246	7	4	9
Demangan	9.004	94	325	6	10	1
Taman	11.348	398	851	10	45	1
JUMLAH	183.912	5.782	11.131	167	584	35

Sumber data: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2022

Jumlah penduduk dan pertumbuhannya penting untuk mengukur mobility ke masa depan untuk mempersiapkan pengembangan selanjutnya. Dari data demografi juga akan terlihat tingkat pendidikan masyarakat kota sehingga dapat dilakukan pendekatan yang sesuai untuk partisipasi dalam program *Smart City*.

Lokasi Terminal dan Stasiun

Menurut data dari Dinas Perhubungan di Kota Madiun, sarana transportasi di Kota Madiun sudah cukup memadai. Terdapat terminal bus di Kota Madiun, bernama Terminal Purbaya. Di Kota Madiun juga dilengkapi dengan dua sub terminal, masing-masing adalah Sub Terminal Manis Rejo dan Sub Terminal Mayjen Sungkono. Selain itu, juga terdapat Stasiun Kereta Madiun (MN) yang merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe A dan terbesar yang berada di dalam pengelolaan PT KAI DAOP VII Madiun. Berikut adalah lokasi dari masing-masing terminal dan stasiun di Kota Madiun :

Tabel 0.10 Daftar Terminal dan Stasiun di Kota Madiun

No.	Terminal / Stasiun	Alamat
1	Terminal Purboyo	Jl. Basuki Rahmat, Patihan, Manguharjo
2	Terminal Angkot Manisrejo	Jl. Klp. Sari, Masisrejo, Taman
3	Terminal Angkot Mayjend Sungkono	Jl. Mayjend Sungkono, Manguharjo
4	Stasiun Madiun	Jl. Kompol Sunaryo No. 6A, Manguharjo



Terminal Purboyo



Sub-Terminal Manisrejo



Sub-Terminal Mayjend
Sungkono



Stasiun Madiun

Gambar 0.14 Infrastruktur Transportasi Umum di Kota Madiun



SWOT Smart Living akan diuraikan dibawah ini.

Tabel 0.11 Matrik SWOT Smart Living

TOWS MATRIX - SMART LIVING KOTA MADIUN	Strength				Weakness			
	KEAMANAN	KENYAMANAN	SEHAT	MOBILITY STRENGTH	KEAMANAN	KENYAMANAN	SEHAT	MOBILITY STRENGTH
SK.1 Pemerintah Daerah memiliki Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dalam penegakan PERDA dan penyelenggaraan TIBUMTRAN MAS serta perlindungan masyarakat (SATPOL PP)	SE.1 Akses cukup Penanganan banjir sudah memadai SE.3 Sanitasi sudah ODF,80 persen jambanisasi tinggal 50 kk tahun ini SE.4 Pengelolaan sampah sudah ada satgas dan	SS.1 Kesadaran masyarakat untuk berobat bagus SS.2 Manajerial sudah bagus SS.3 Modal cukup yang pendanaan dari pemerintahan APBD, DBHCHT, DAK, Pajak Rokok, dan Bantuan Keuangan	SM.1 Ketersediaan angkutan umum sudah baik, baik konvensional maupun onlinea	WK.1 Jumlah Aparatur Negara Sipil yang menyelenggara kan penegakan PERDA dan TIBUMTRANM AS sangat terbatas dan kurang	WE.1 Penanganan sampah overload dan kesadaran masyarakat yang kurang dalam penanganan sampah masing masing WE.2 RTH masih kurang dan keindahan perlu ditingkatkan WE.3 Rumah kos	WS.1 Kurangnya prilaku hidup sehat dari masyarakat yang kurang Digital Kurang prasarana olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat	WM.1 Anggaran Kurang, sehingga perencanaan yang ada tak terlaksana (Capital Lemah) WM.2 Pemeliharaan sudah bagus tetapi perlengkapan kurang WM.3 Transportasi umum kekurangannya di	



	dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan SK.3 Adanya prasarana dan sarana dalam mendukung kegiatan pelayanan penyelenggaraan TIBUMTRAN MAS SK.4 Adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur penyelenggaraan	bank sampah yang memadai (memenuhi standard)	(BK Provinsi)			membuat kurang nyaman WE.4 Enforcement nya kurang WE.5 Manajerial kurang WE.6 Dana pengelolaan sampah mahal	Angkot tetapi Transportasi online sudah lebih dari cukup WM.4 Kinerja Ruas Jalan Nasional semakin menurun WM.5 Banyaknya pelajar yang menggunakan kendaraan pribadi (sepeda motor) WM.6 Tingkat disiplin lalu lintas kurang
--	--	--	---------------	--	--	---	---



		TIBUMTRAN MAS							
Opportunity	KEAMANAN	OK.1 Masyarakat kota Madiun yang ramah OK.2 Ada sinergisitas 3 pilar, yaitu Pemerintah Daerah, TNI dan Polri OK.3 Adanya jimpitan pada saat ronda malam sebagai modal untuk menyelenggarakan kegiatan masyarakat dalam memelihara keamanan lingkungan OK.4 Angka kejahatandi kota Madiun	Menguatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengamanan Lingkungan [SK.2, SK.3, SK.4 - OK.3, OK.5]						



	STRENGTH	forum lalu lintas dan angkutan jalan yang melibatkan instansi terkait OM.2 Adanya forum keselamatan di tingkat pelajar dan masyarakat OM.3 Tersedianya angkutan umum sekolah gratis (bus dan angkot)								an Aksesibilitas Masyarakat [WM.3 - OM.1, OM.2, OM.3]
Threat	KEAMANAN	TK.1 Masyarakat belum sepenuhnya mempunyai kesadaran dalam menciptakan keamanan	Mewujudkan Sistem Keamanan Lingkungan Terpadu [SK.2, SK.3 - TK.1, TK.2, TK.3]							



		lingkungan TK.2 Madiun sebagai kota transit sehingga berpotensi untuk rawan gangguan keamanan TK.3 Adanya potensi konflik internal di perguruan pencak silat dan antar perguruan pencak silat.								
	KENYAMANAN	TE.1 Kepedulian Masyarakat dalam pemeliharaan RTH kurang TE.2 Belum adanya investor dalam pengelolaan								



		sampah TE.3 Prilaku masyarakat dalam memproduksi sampah plastik yang masih tinggi								
	SEHAT	TS.1 Perkembangan penyakit tidak menular yang semakin meningkat TS.2 Banyaknya penjual makanan siap saji yang tidak sehat								
	MOBILITY STRENGTH	TM.1 Perkembangan teknologi transportasi yang cepat TM.2 Meningkatnya				Mengoptimal kan Sistem Manajemen Transportans i [SM.1 - TM.1, TM.2]				



	jumlah kepemilikan kendaraan pribadi									
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.7.2 Strategi Smart Living

Strategi yang akan dilakukan dalam pembangunan *Smart Living* adalah sebagai berikut:

Tabel 0.12 Strategi Smart Living

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi Smart City
Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (Harmony)				
1.	L1. Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman (<i>residential</i>), lingkungan pusat kegiatan bisnis (<i>commercial</i>) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (<i>recreational</i>).	% peran serta masyarakat dalam mengembangkan kualitas lingkungan permukiman	L1S1. Menguatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengamanan Lingkungan L1S2. Meningkatkan Kualitas Pemukiman	Misi 3 Harmonisasi tata kota yang nyaman
Mewujudkan Prasarana Kesehatan (Health)				
2.	L2. Mewujudkan akses	Indeks Keluarga Sehat	L2S1. Mewujudkan Masyarakat	Misi 3

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi Smart City
	terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (<i>food</i>), akses terhadap pelayanan kesehatan yang (<i>healthcare</i>), dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (<i>sport</i>)		yang ber-Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) L2S2. Mempermudah Akses Pelayanan dan Informasi Layanan Kesehatan	Harmonisasi tata kota yang nyaman
Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (<i>Mobility</i>)				
3.	L3. Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas (<i>mobility</i>) bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah.	indeks tingkat pelayanan jalan	L3S1. Mengoptimalkan Sistem Manajemen Transportansi L3S2. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat L3S3. Mewujudkan Sistem Keamanan Lingkungan Terpadu	Misi 3 Harmonisasi tata kota yang nyaman

2.8 Smart Society

Tujuan yang disusun pada *Smart Society* adalah Mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi.



2.8.1 Analisis Strategi Smart Society

Matrik SWOT *Smart Society* akan diuraikan dibawah ini.

Tabel 0.13 Matrik SWOT *Smart Society*

TOWS MATRIX - SMART SOCIETY KOTA MADIUN	Strength			Weakness		
	Komunitas	Pendidikan	Keamanan	Komunitas	Pendidikan	Keamanan
SK.1 Terbentuknya komunitas hobi, profesi, pemerhati, relawan sosial, dll secara terstruktur.	SP.1 jumlah perguruan tinggi di madiun cukup banyak SP.2 Madiun menjadi tempat pendidikan yang diminati oleh daerah sekitar Kota Madiun SP.3 dukungan dari pemerintah daerah untuk pendidikan sangat besar SP.4 terdapat	SE.1 pusat data kependudukan yang valid SE.2 SDM bidang keamanan yang cukup SE.3 sistem keamanan yang cukup (institusi)	WK.1 Belum ada prestasi yang menonjol, yang mencerminkan basic komunitas WK.2 Usia produktif lebih sedikit dalam berpartisipasi	WP.1 kualitas perguruan tinggi di madiun belum ada yang bertaraf nasional WP.2 kualitas pendidikan kota madiun belum stabil WP.3 pemanfaatan dukungan dari pemerintah daerah belum terserap secara maksimal WP.4 lembaga pendidikan dan masyarakat	WE.1 ketergantungan terhadap pemerintah pusat di data kependudukan WE.2 Gesekan kepentingan antar SDM keamanan WE.3 kinerja PPSI belum optimal	

1

		<p>banyak sumber belajar di Kota Madiun</p> <p>SP5. terdapat banyak dunia usaha dan dunia industri di kota madiun</p> <p>SP.6 terdapat perpustakaan umum dan taman baca dengan pelayanan yang cukup lengkap di Kota Madiun</p> <p>SP.7 terdapat titik akses internet di hampir semua tempat di Kota Madiun</p> <p>SP.8 ada pusat informasi untuk</p>		<p>belum memanfaatkan sumber belajar secara maksimal</p> <p>WP.5</p> <p>keberadaan dunia usaha dan industry belum dimanfaatkan sebagai mitra dunia pendidikan secara maksimal</p> <p>WP.6</p> <p>keberadaan perpustakaan dan taman baca belum mendukung secara maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan Kota Madiun</p> <p>WP.7 akses internet di</p>	
--	--	--	--	--	--



		<p>mendukung dunia pendidikan Kota Madiun SP.9 pengelolaan informasi dan data sudah cukup baik SP.10 ada upaya untuk melayani difabel di Kota Madiun SP.11 adanya pojok baca di ruang tunggu kelurahan dan kecamatan SP.12 adanya angkutan siswa gratis SP.13 Banyak anak atau remaja Madiun yang punya bakat dan potensi luar</p>		<p>hampir semua tempat di Kota Madiun belum dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan pendidikan WP.8 pusat informasi yang ada belum dimanfaatkan untuk mendukung dunia pendidikan Kota Madiun WP.9 pengelolaan informasi dan data kurang efektif dan rapi WP.10 Pelayanan pendidikan bagi yang kebutuhan khusus di Kota Madiun belum</p>	
--	--	--	--	--	--

7

		biasa SP.14 Pemerintah kota menerbitkan peraturan terkait pendidikan		maksimal WP.11 pojok baca di ruang tunggu kelurahan dan kecamatan belum dimanfaatkan masyarakat WP.12 angkutan siswa gratis belum dimanfaatkan maksimal WP.13 Banyak anak atau remaja Madiun yang punya bakat dan potensi luar biasa belum ditangani secara optimal WP.14 peraturan terkait pendidikan belum	
--	--	---	--	---	--

7

						tersampaikan secara cepat dan merata	
Opportunity	Komunitas	OK.1 Sumber daya manusia yang cukup dan peduli OK.2 Display dari yang sudah berprestasi.	Meningkatkan Kualitas Diseminasi Informasi [SK.1 - OK.1, OK.2]				
	Pendidikan	OP.1 Tren teknologi pendidikan kian beragam OP.2 Gaya belajar anak yang dinamis OP.3 Meningkatnya kesadaran orang tua untuk pendidikan anak OP.4 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ruang untuk orang dengan kebutuhan khusus				Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak [WP.2, WP.13 - OP.1, OP.2, OP.3] Meningkatkan Kualitas Fasilitas Belajar [WP.6, WP.7, WP.9, WP.10 - OP.4]	
	Keamanan	OE.1 keamanan dan ketertiban di masyarakat lebih baik OE.2 terciptanya kerukunan masyarakat yang kuat			Menciptakan Sistem Keamanan Masyarakat yang Dinamis [SE.1, SE.2,		



		OE.3 pencegahan kriminalitas OE.4 kemas wisata budaya dan SDM keamanan			SE.3 - OE.1, OE.2, OE.3]			
Threat	Komunitas	TK.1 antar komunitas ada gap/pembatas, benturan TK.2 kurangnya interaksi sosial karena kemajuan teknologi komunikasi	Meningkatkan Sinergi Antar Instansi serta Kelompok Masyarakat [SK.1 - TK.2]					
	Pendidikan	TP.1 Sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan perguruan tinggi bertaraf nasional/internasional masih sangat jauh dari ideal TP.2 kualitas pendidikan di sekolah-sekolah kota madiun belum merata kualitas SDM dan sarpras belum merata TP.3 kesadaran lembaga pendidikan		Menguatkan Sektor Pendidikan Informal [SP.4, SP.6, SP.7, SP.8, SP.10. SP.11 - TP.4]			Mewujudkan Fasilitas Pendidikan yang Unggul [WP.2 - TP.1, TP.2]	



		<p>dan masyarakat untuk memanfaatkan sumber belajar masih rendah</p> <p>TP.4 kesadaran dunia pendidikan dan dunia usaha dan industri untuk berkerjasama masih rendah</p> <p>TP.5 kesadaran masyarakat dan lembaga pendidikan untuk memanfaatkan perpustakaan dan taman baca masih rendah</p> <p>TP.6 Masyarakat belum tahu dan belum sadar cara pemanfaatan internet untuk meningkatkan kegiatan pendidikan</p> <p>TP.7 belum ada kerjasama pemanfaatan pusat informasi yang ada untuk mendukung dunia pendidikan Kota Madiun</p> <p>TP.8 pengelolaan</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



		<p>informasi dan data belum ditata secara efektif dan rapi dengan memanfaatkan IT yang ada</p> <p>TP.9 Pelayanan pendidikan bagi yang kebutuhan khusus di Kota Madiun belum maksimal</p> <p>TP.10 Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan Pojok baca di ruang tunggu kelurahan dan kecamatan belum maksimal</p> <p>TP.11 keengganan orang tua dan kemauan siswa untuk memanfaatkan angkutan siswa gratis masih rendah</p> <p>TP.12 Belum ada program dari pihak terkait untuk menangani anak atau remaja Madiun yang</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

7

		punya bakat dan potensi luar biasa TP.13 Proses pembuatan dan sosialisasi peraturan terkait pendidikan belum tersampaikan secara cepat dan merata						
	Keamanan	TE.1 Benturan kekuatan antar SDM Keamanan						

7

Strategi Smart Society

Strategi yang akan dilakukan dalam pembangunan *Smart Society* adalah sebagai berikut:

Tabel 0.15 Strategi Smart Society

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi Smart City
Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Community)				
CM0 1	S1. Mewujudkan interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial, dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (digital) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah	Index partisipasi masyarakat	S1S1. Meningkatkan kualitas diseminasi informasi S1S2. Meningkatkan Sinergi Antar Instansi serta Kelompok Masyarakat	Misi 5 Interaksi sosial masyarakat yang terbuka dan cerdas
CM0 2	S2. Mengembangkan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif	index sumber daya masyarakat	S2S1. Menguatkan Sektor Pendidikan Informal	Misi 5 Interaksi sosial masyarakat yang terbuka dan cerdas
Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien (Learning)				
LN01	S3, Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang	akreditasi sekolah dan perguruan tinggi	S34S1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak S34S2. Meningkatkan Kualitas Fasilitas Belajar	Misi 5 Interaksi sosial masyarakat yang terbuka dan cerdas



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi Smart City
	seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat yang difable.		S34S3. Mewujudkan Fasilitas Pendidikan yang Unggul	
LN02	S4. Membangun platform edukasi bagi masyarakat			Misi 5 Interaksi sosial masyarakat yang terbuka dan cerdas
Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (Security)				
SC01	S5. Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda, dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau <i>Internet of Thing</i> (IoT).	indeks ketentraman	S5S1. Menciptakan Sistem Keamanan Masyarakat yang Dinamis	Misi 5 Interaksi sosial masyarakat yang terbuka dan cerdas



2.9 Smart Environment

Tujuan yang disusun pada *Smart Environment* adalah Mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, terpadu, dan mandiri (*Madiun Health and Comfort City*).

2.9.1 Analisis Strategi Smart Environment

Dalam melakukan penyusunan strategi *Smart Environment* digunakan metodologi seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 0.15 Metodologi Penyusunan Strategi Smart Environment

Kajian dimensi *Smart Environment* dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder untuk melakukan penentuan terhadap kondisi eksisting indikator-indikator yang ada dalam dimensi *Smart Environment*. Data primer dilakukan dengan melakukan *Forum Discussion Group* atau FGD dengan dinas-dinas yang terkait, sedangkan data sekunder didapatkan dari laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh dinas-dinas tersebut dengan kurun waktu 1 tahun atau lebih. Selanjutnya data-data yang didapat digunakan untuk mendukung analisis SWOT terhadap dimensi *Smart Environment* yang hasilnya berupa program dan sub program dalam dimensi *Smart Environment* untuk mewujudkan *Smart City Madiun*.

Berdasarkan data lingkungan yang ada di Kota Madiun saat ini, ada beberapa data yang sudah ada. Namun beberapa data belum ada di dinas terkait, seperti data jejak karbon yang ada di Kota Madiun.

7

Tabel 0.14 Penentuan Indikator pada Dimensi Smart Environment untuk Kota Madiun

Sub Dimensi	Indikator	Data	Analisis
Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH)	Indeks Tutupan Vegetasi	Ada	Indeks Tutupan Vegetasi masih kurang
Restorasi tingkat pencemaran sungai	Indeks Pencemaran Air	Ada	81% dari total 91 lokasi titik sampling menunjukkan kondisi air sungai tercemar ringan
Pengendalian polusi udara	Indeks Standar Pencemaran Udara - ISPU	Tidak ada	Selama ini hanya pengukuran paramater SO2 dan NO2 saja
Pengembangan sistem tata kelola limbah atau,	Indeks Pencemaran Air	Ada	81% dari total 91 lokasi titik sampling menunjukkan kondisi air sungai tercemar ringan
Pengembangan sistem tata kelola sampah rumah tangga (household)	Prosentasi Reduksi Sampah Rumah Tangga	Tidak Ada	
	Reduksi Volume Sampah ke TPA	Ada	6% reduksi selama 4 tahun terakhir
Pengembangkan sistem tata kelola limbah industri	Ijin Lingkungan Industri	Tidak Ada	
Pengembangan sistem tata kelola limbah dan sampah publik (public)	Ijin Lingkungan bagi fasilitas umum seperti tempat perbelanjaan/mall, pasar	Tidak Ada	
Penjagaan keseimbangan ekosistem lingkungan dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran-saluran air pembuangan limbah atau sirkulasi air residensial serta ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga, industri dan publik yang baik dan bertanggung-jawab.	Luas area genangan	Ada	Kota Madiun tidak mempunyai genangan setinggi lebih dari 30 cm dan lebih dari 2 jam

Sub Dimensi	Indikator	Data	Analisis
Pemanfaatan energi yang efisien dan bertanggungjawab	Total penggunaan energi perumahan per kapita (kWh/tahun)	Tidak Ada	
	Emisi efek rumah kaca (ton/kapita)	Tidak Ada	
Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (environmentally friendly) dan berkelanjutan (sustainable) serta terjangkau bagi masyarakat.			

Dari penentuan indikator yang sesuai dengan kondisi eksisting Kota Madiun, maka disusunlah SWOT-Matriks *Smart Environment*. SWOT matriks *Smart Environment* akan diuraikan dibawah ini.

1

Tabel 0.15 Matrik SWOT Smart Environment

TOWS MATRIX - SMART ENVIRONMENT KOTA MADIUN	STRENGTH				WEAKNES			
	PROTECTION	WASTE (SAMPAH PADAT)	WASTE (LIMBAH CAIR)	ENERGI	PROTECTIO N	WASTE (SAMPAH PADAT)	WASTE (LIMBAH CAIR)	ENERGI
SP.1 Adanya sumur resapan SP.2 Sudah adanya Perda IMB yang mengatur luasan lahan SP.3 Sudah adanya Perda tentang RTH	SW.1 Ketersediaan TPS sementara yang telah terbagi di beberapa titik SW.2 Armada angkut dan SDM yang cukup SW.3 Pengelolaan anggaran cukup baik SW.4 Sudah ada perda yang mengatur Retribusi SW.5 Pemanfaatan	SC.1 Sudah ada perda yang mengatur untuk ijin IPAL bagi usaha industry SC.2 Telah tersedia komunal (IPAL)	SE.1 Pasokan Listrik stabil SE.2 Pemakaian lampu hemat energi SE.3 Ketersediaan anggaran yang cukup	WP.1 Kurangnya sosialisasi tentang perlindungan lingkungan hidup WP.2 Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	WW.1 Belum ada perda dari sumber (rumah) ke TPS WW.2 TPA sudah <i>Overload</i> WW.3 Pengelolaan sampah belum sanitary (masih control land fill) WW.4 Kesadaran masyarakat untuk pemilahan sampah masih	WC.1 Banyak usaha industri yang belum memiliki pengelolaan limbah (IPAL) WC.2 Pengawasan pembuangan limbah masih kurang WC.3 Belum ada perda yang mengatur	WE.1 Belum menerapkan <i>real metterry</i> (PLN), berapapun pemakaiannya, tagihan masih menggunakan flat tarif. WE.2 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan hemat energi	

7

				sampah organik untuk pupuk kompos SW.6 pemanfaatan gas metan hasil pengolahan sampah				kurang WW.5 Perilaku masyarakat yang belum menerapkan PK5 WW.6 Belum adanya penerapan teknologi pengelolaan sampah di masyarakat	limbah domestik (rumah tangga)	
OPORTUNITI	PROTECTION	OP.1 Adanya kearifan lokal masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan (bersih desa, tanam pohon)	Mengoptimalkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau [SP.3 - OP.3]				Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup [WP.1, WP.2 - OP.1, OP.3, OP.4]			



		OP.2 Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk penelitian pencegahan pencemaran limbah dan sampah OP.3 Peran serta Ormas dan masyarakat sebagai pekerja sosial komunitas berbasis lingkungan OP.4 Pemanfaatan teknologi untuk monitoring								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

7

		kualitas air dan udara							
	WASTE (SAMPAH PADAT)	OW.1 Adanya bank sampah OW.2 Sumber energi alternative dari pengelolaan sampah OW.3 Daur ulang sampah plastic (potensi ekonomi)							
	WASTE (LIMBAH CAIR)	OC.1 Penerapan teknologi pengolah air (limbah cair) OC.2 Partisipasi	Mengoptimalkan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga [SW.2 - OC.2]	Menegakkan Peraturan Terkait Ijin Lingkungan Pada Industri			Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Sekolah, Kantor, dan Pelaku Usaha	Meningkatkan Pengendalian Kualitas Udara [WC.1, WC.2 - OC.1]	



		masyarakat dalam pengelolaan limbah			[SC.1, SC.2 - OC.1]			dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah [WW.4, WW.5 - OC.2]		
ENERGI	OE.1	Pengelolaan sampah menjadi sumber energi alternative				Mengoptimalkan Penggunaan Listrik [SE.2, OE.2]				Menciptakan Energi Alternatif Terbarukan [WE.1 - OE.1]
	OE.2	Pembangunan tiang PJU dekoratif (untuk estetika, penghematan anggaran, kerapian, smart living & branding)								



THREAT	PROTECTION	TP.1 Tingginya konversi lahan pertanian ke non pertanian	Meningkatkan Konservasi Sumber Daya Air [SP.1 - TP.1]					Mengembangkan Keseimbangan Lingkungan [WW.2 - TP.2]		
		TP.2 Pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat berbanding lurus dengan volume sampah	Menciptakan Pengelolaan Bencana Banjir yang Responsif [SP.2, SW.1, SW.5, SW.6 - TP.2]							



2.9.2 Strategi *Smart Environment*

Strategi yang akan dilakukan dalam pembangunan *Smart Environment* adalah sebagai berikut

Tabel 0.16 Strategi *Smart Environment*

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi <i>Smart City</i>
Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (<i>Protection</i>)				
PT01	EN1. Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara sertamengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara, misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada <i>Internet of Thing (IoT)</i>	Indeks kualitas lingkungan hidup	EN1S1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Misi 6 Sistem ekonomi berputar (<i>Circular Economy</i>)
PT02	EN2. Membangun ruang terbuka hijau	Indeks Tutupan Vegetasi	EN2S1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang terbuka hijau	Misi 6 Sistem ekonomi berputar (<i>Circular Economy</i>)
PT03	EN3. Mengembangkan restorasi sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi	Indeks Pencemaran Air	EN3S1. Meningkatkan Konservasi Sumber Daya Air EN3S2. Meningkatkan pengelolaan dan penanganan mitigasi bencana banjir secara responsif.	Misi 6 Sistem ekonomi berputar (<i>Circular Economy</i>)

/

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi Smart City
PT04	EN4. Mengendalikan polusi udara	Indeks Standar Pencemaran Udara - ISPU	EN4S1. Meningkatkan Pengendalian Kualitas Udara	Misi 6 Sistem ekonomi berputar (Circular Economy)
Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (Waste)				
WS01	EN5. Mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga (household)	Prosentasi Reduksi Sampah Rumah Tangga Reduksi Volume Sampah ke TPA	EN5S1. mengoptimalkan pengelolaan sampah rumah tangga	Misi 6 Sistem ekonomi berputar (Circular Economy)
WS02	EN6. Mengembangkan sistem tata kelola limbah industri (industrial)	Ijin Lingkungan Industri	EN6S1. Menegakkan peraturan terkait ijin lingkungan pada industri	Misi 6 Sistem ekonomi berputar (Circular Economy)
WS03	EN7. Mengembangkan sistem tata kelola limbah dan sampah publik (public)	Ijin Lingkungan bagi fasilitas umum seperti tempat perbelanjaan/mall, pasar	EN7S1. Meningkatkan keterlibatan masyarakat, organisasi masyarakat, sekolah, kantor, dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah dan limbah	Misi 6 Sistem ekonomi berputar (Circular Economy)
WS04	EN8. Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar tidak mengganggu pemandangan, tidak merusak indra penciuman, dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran-saluran air pembuangan limbah atau	Luas area genangan	EN8S1. Mengembangkan Keseimbangan Lingkungan	Misi 6 Sistem ekonomi berputar (Circular Economy)



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Referensi Misi Smart City
	sirkulasi air residensial serta ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga, industri dan publik yang baik dan bertanggung-jawab.			
WS05	EN9. Memanfaatkan energi yang efisien dan bertanggungjawab	Total penggunaan energi perumahan per kapita (kWh/tahun) Emisi efek rumah kaca (ton/kapita)	EN9S1. Mengoptimalkan penggunaan listrik	Misi 6 Sistem ekonomi berputar (<i>Circular Economy</i>)
WS06.	EN10. Mengembangkan energi alternatif yang ramah lingkungan (<i>environmentally friendly</i>) dan berkelanjutan (<i>sustainable</i>) serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya pemanfaatan limbah/sampah sebagai biogas, energi surya, tenaga angin, biomassa (tumbuhan dan hewan) dan lain-lain.		EN10S1. Menciptakan energi alternatif terbarukan	Misi 6 Sistem ekonomi berputar (<i>Circular Economy</i>)



BAB IV

RENCANA AKSI SMART CITY KOTA MADIUN

Kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai kegiatan yang ada di masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Terdapat tiga konsep dalam *Smart City*. Pertama, *Smart City* adalah sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola kehidupan masyarakat di perkotaan. Kedua, konsep *Smart City* mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya yang efektif dan efisien. Ketiga, *Smart City* diharapkan mampu menjalankan fungsi penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga.

Dalam rencana aksi ini, ditetapkan dari berbagai goal atau tujuan utama yang bertujuan untuk menjawab *problem statement*, aktivitas, objektif, hingga tugas-tugas (tasks) atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang perlu dan akan dilakukan terkait perubahan yang akan dilakukan. Rencana aksi *Smart City* dibagi dalam 4 (empat) Rencana, yaitu :

1. Pengembangan kebijaksanaan dan kelembagaan *Smart City*;
2. Rencana pembangunan infrastruktur pendukung *Smart City*;
3. Rencanapengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung *Smart City*;
4. Rencana penguatan literasi *Smart City*.

4.1. Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan *Smart City* Kota Madiun

Pembangunan Kota Madiun yang berwawasan *Smart City* pada dasarnya merupakan salah satu upaya dalam rangka pembangunan wilayah dan sumber daya (manusia, alam, dan teknologi) secara optimal, efisien dan efektif. Secara garis besar, pembahasan mengenai spesifikasi tata kelola *Smart City* dibagi menjadi dua bagian, yaitu organisasi pengelola dan tata kelola.

A. Arahan Umum Manajemen *Smart City*

Arahan umum yang terkait dengan Aspek Keorganisasian dalam Tata Kelola *Smart City* adalah sebagai berikut:

/

1. **Kepemimpinan.** Fungsi utama yang harus ada terkait kepemimpinan dalam bidang *Smart City* adalah:
 - Memimpin Organisasi Pengelola, yaitu mengkoordinasi perencanaan, realisasi, operasional harian, dan evaluasi internal.
 - Melakukan komunikasi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder yang menjadi pengguna layanan *Smart City*.
2. **Hubungan yang sinergis.** Dalam rangka memastikan hubungan sinergis antar stakeholder, sebaiknya membentuk **Dewan Smart City**. Dewan *Smart City* merupakan lembaga multi-pihak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola *Smart City*. Pembentukan Dewan *Smart City* Daerah berfungsi sebagai wadah partisipasi antar-sektor dan antar-elemen dalam melakukan percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Daerah di dalam Masterplan (Rencana Induk) *Smart City*. Dewan *Smart City* memiliki tugas dan kewajiban:
 - Memberikan arahan aspek strategis Teknologi Informasi dalam *Smart City* dan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi;
 - Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana *Smart City* Daerah terkait pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* di daerah;
 - Menampung dan membahas usulan, kebutuhan dan aspirasi OPD;
 - Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah untuk mendorong terjadinya percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* di daerah;
 - Menerima saran dan masukan dari masyarakat terkait percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* di daerah;
 - Melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana *Smart City* Daerah terkait pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* sekurang-kurangnya satu bulan sekali;
 - Membahas hasil asesmen/audit internal dan independen sebagai materi evaluasi;
 - Melakukan pelaporan kepada Kepala Daerah terkait perkembangan pelaksanaan *Smart City*.

7

B. Kerangka Organisasi Tata Kelola *Smart City*

Sesuai dengan prinsip pemisahan antara *governance* dan manajemen, maka usulan organisasi tata kelola *Smart City* adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *Governance*, dilakukan oleh 4 pihak :

- Walikota selaku pemegang amanat untuk pengelolaan Kota Madiun (eksekutif).
- DPRD selaku wakil rakyat dan pemegang kekuasaan legislatif.
- Dewan *Smart City* sebagai forum komunikasi dan antar *stakeholder Smart City* untuk dapat saling berkontribusi dalam kemajuan Kota Madiun.
- Tim Pelaksana *Smart City* yang akan mengawal implementasi *Smart City* di Kota Madiun. Tim Pelaksana *Smart City* Daerah dibentuk untuk menjamin terjadinya sinkronisasi antara *Masterplan* (Rencana Induk) *Smart City* dengan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, maupun Renja PD.

2. Fungsi Manajemen. Dilakukan oleh pengelola layanan yang dapat dilakukan oleh beberapa pihak, Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Daerah Kota Madiun maupun pihak lain (*stakeholder*).

C. Manajemen SDM

Untuk menjawab tantangan kebutuhan dan kondisi SDM di Kota Madiun, dapat diterapkan prinsip Pemilahan Tugas. Prinsip pemilahan tugas dilakukan pada kondisi keterbatasan SDM pada organisasi pengelola TI, yakni dengan tujuan untuk:

1. Mendapatkan kinerja yang optimal;
2. Menghindari kemungkinan bertumpuknya tanggung-jawab beberapa fungsi kritis TI pada seorang personil; dan
3. Mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan aset sistem informasi.

4.2. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung *Smart City* Kota Madiun

Rencana pembangunan infrastruktur *Smart City* dibagi menjadi 3, yaitu: infrastruktur Teknologi Informasi, infrastruktur fisik, dan infrastruktur sosial. Pembangunan infrastruktur akan berhasil ketika pemerintah dan masyarakat saling bekerjasama untuk mewujudkan Kota Madiun menjadi Kota cerdas menuju Kota kelas dunia.

2.9.3 Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur TI didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi secara terperinci yang terdiri dari *hardware, software, database*, sumber daya manusia, telekomunikasi, dan prosedur. Rencana aksi pembangunan infrastruktur teknologi informasi terdiri dari pembangunan *data center*, jaringan, *disaster recovery center*, dan *city operation center*.

A. Data Center

Kota Madiun perlu menyediakan *data center* yang dapat diakses bersama oleh seluruh aplikasi penunjang *Smart City*. *Data center* dimaksud akan menyediakan kapasitas penyimpanan (*storage*), pemrosesan (*computing*), dan distribusi data yang dibutuhkan oleh aplikasi-aplikasi *Smart City*. *Data center* dimaksud setidaknya memiliki komponen dan perannya sebagai berikut:

1. *Database Server*. Tempat penyimpanan data pokok, data transaksi, data analisis, dan pelaporan dari semua aplikasi penunjang *Smart City*.
2. *Application Server*. Fasilitas yang menyediakan backend API dan frontend untuk aplikasi *Smart City*.
3. *File Sharing Server*. Fasilitas cloud yang dapat digunakan untuk menyimpan data-data bersama.
4. *Mail Server*. Fasilitas email resmi untuk lingkungan Pemkot Madiun.
5. *Domain Name Server*. Fasilitas untuk nama domain resmi dalam pemberian alamat layanan *Smart City*.

B. Jaringan

Ketersediaan jaringan mutlak diperlukan oleh Kota Madiun untuk pemanfaatan sumber daya yang dibangun melalui inisiatif *Smart City* secara optimal. Infrastruktur jaringan yang akan dibangun dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar yakni: Infrastruktur Jaringan Intra PD (Intranet Pemerintah Kota) dan Infrastruktur Jaringan Internet Masyarakat.

1. Jaringan Intra PD

Jaringan intra PD merupakan jaringan komputer yang menghubungkan seluruh kantor dinas di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Jaringan yang dibangun dapat melalui jalur privat maupun publik. Kapasitas jaringan yang disediakan harus mampu menangani lalu lintas data dalam kapasitas besar, termasuk diantaranya menyediakan jalur komunikasi VoIP dan Video *Conference* dalam lingkungan PD di Kota Madiun.

2. Jaringan Internet Masyarakat

Jaringan internet masyarakat merupakan jaringan internet yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan perangkat pemerintahan hingga tingkat kecamatan/kelurahan. Tersedianya jalur tersebut akan memberikan manfaat antara lain:

- a. Memberikan kemudahan akses layanan bagi perangkat pemerintahan maupun masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan pemerintah.
- b. Memungkinkan pemantauan kondisi daerah terotomasi menggunakan teknologi *Internet of Things*, seperti monitoring cuaca, kondisi lahan pertanian, kondisi aliran irigasi, dan lainnya.
- c. Mendorong perangkat pemerintah setempat untuk memunculkan inovasi dalam pelayanan masyarakat, seperti perpustakaan digital, *public hotspot*, kelas keterampilan digital, dan lainnya.

C. Disaster Recovery Center

Disaster Recovery Center (DRC) merupakan fasilitas replikasi dan backup secara berkala terhadap seluruh data yang tersimpan di *data center*. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi jika terjadi kejadian *force majeure* yang mengakibatkan gagalnya data center dalam menyediakan layanan yang seharusnya. DRC dirancang agar mampu mengambil alih sementara peran data center sampai keadaan layanan pulih kembali.

D. City Operation Center

City Operation Center merupakan pusat kendali operasi *Smart City*, dimana seluruh operasional sistem *Smart City* dapat dimonitoring. Fasilitas ini dilengkapi dengan berbagai tampilan yang menyajikan informasi *real time* dari perangkat dan sistem yang tersebar di seluruh Kota Madiun.



Tabel 0.17 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur

No	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Target	Leading Sector	Anggaran
1	Pengembangan Data Center	Sertifikasi data Center	100%	Dinas Kominfo	APBD
2	Pembangunan Jaringan Komputer yang terkoneksi internet	Persentase kecamatan/ kelurahan yang memiliki akses internet	100%	Dinas Kominfo	APBD
3	Pembangunan Disaster Recovery Center	Sertifikasi DRC	100%	Dinas Kominfo	APBD
4	Pembangunan City Operation Center	Jumlah dashboard sistem informasi yang terintegrasi	100%	Dinas Kominfo	APBD

2.9.4 Infrastruktur Fisik

Infrastruktur fisik merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata dan kegunaannya memang berasal dari bentuk fisik yang dimilikinya tersebut. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Kebanyakan masyarakat juga mengartikan kata infrastruktur sebagai infrastruktur keras. Infrastruktur keras yang mendukung pembangunan *smart city* Kota Madiun adalah sebagai berikut:

A. Destinasi Wisata

Pembangunan destinasi wisata di Kota Madiun bertujuan agar Kota Madiun semakin dikenal dan memiliki positioning yang kuat di masyarakat. Dengan pembangunan destinasi wisata yang memperkenalkan budaya serta kuliner khas menjadikan warisan budaya Kota Madiun dikenal oleh masyarakat luas.

B. Galeri Oleh-Oleh

Pembangunan galeri oleh – oleh merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Madiun. Selain itu juga sebagai media pemasaran kuliner dan cinderamata khas Kota Madiun, Misalnya madumongso, bluder, sambel pecel instan, dan cinderamata minimatur kereta api. Galeri oleh – oleh dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran hasil dari UMKM yang ada di Kota Madiun.

C. Transportasi dan Mobilitas

Rencana pembangunan infrastruktur fisik yang harus disiapkan sebagai strategi, salah satunya adalah fasilitas untuk mobilitas, yaitu sarana dan prasarana transportasi. Sebagai gambaran awal, dengan melalui Google Map, dapat diperkirakan kecepatan rata rata kendaraan di beberapa ruas jalan di Kota Madiun berdasarkan Kajian Kinerja Lalu Lintas Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 0.18 Kecepatan Rata-Rata Kendaraan

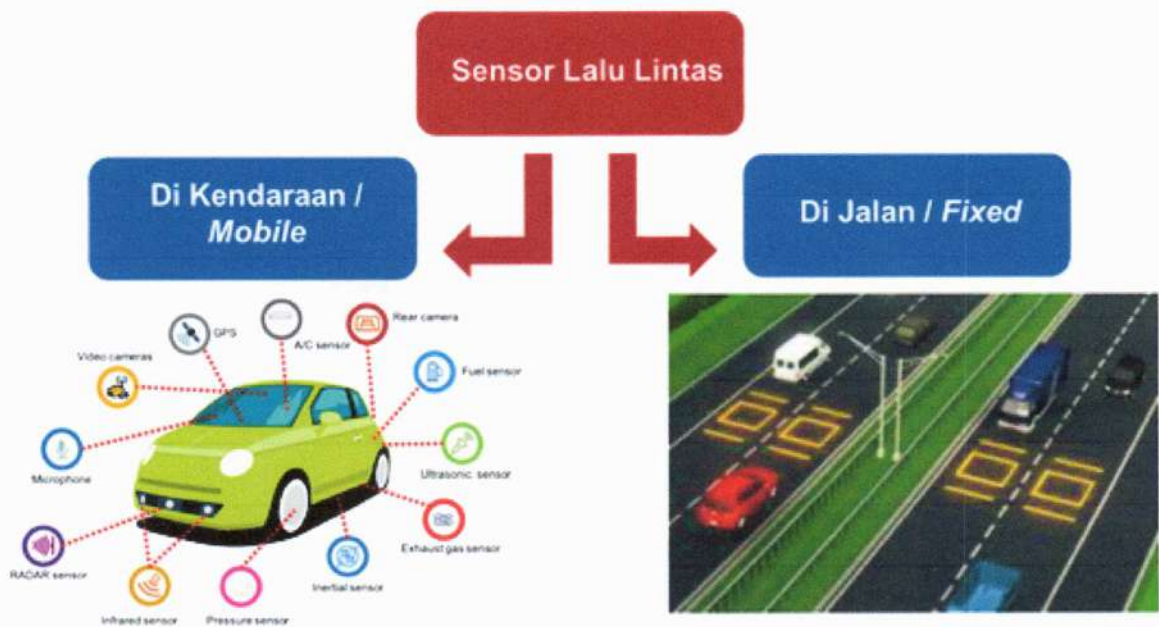
NO	NODE		NAMA JALAN	FUNGSI JALAN	KECEPATAN (kpj)
	AWAL	AKHIR			
1	1201	1205	JL. MT HARYONO	ARTERI	37
2	702	403	JL. YOS SUDARSO 3	ARTERI	38
3	305	306	JL. KOL. MARHADI 2	ARTERI	33
4	705	601	JL. BASUKI RAHMAD 4	ARTERI	36
5	503	1201	JL. THAMRIN	ARTERI	48
6	1205	2304	JL. PANJAITAN	ARTERI	34
7	1302	2012	JL. JEND. SUDIRMAN 4 (Barat)	ARTERI	38
8	306	1010	JL. JEND. SUDIRMAN 1	ARTERI	35
9	101	109	JL. PAHLAWAN 2	ARTERI	37
10	1201	1302	JL. MASTRIP 2 (Barat)	ARTERI	33
11	403	101	JL. PAHLAWAN 1	ARTERI	47
12	301	305	JL. KOL. MARHADI 1	ARTERI	38
13	701	704	JL. BASUKI RAHMAD 1 (Selatan)	ARTERI	38
14	2012	1010	JL. JEND. SUDIRMAN 2	ARTERI	36
15	2012	1302	JL. JEND. SUDIRMAN 3 (Timur)	ARTERI	38
16	702	701	JL. YOS SUDARSO 2 (Utara)	ARTERI	50
17	701	702	JL. YOS SUDARSO 1 (Selatan)	ARTERI	52
18	704	705	JL. BASUKI RAHMAD 3	ARTERI	37

NO	NODE		NAMA JALAN	FUNGSI JALAN	KECEPATAN (kpj)
	AWAL	AKHIR			
19	701	1702	JL. RINGROAD 1 (Barat)	ARTERI	54
20	1302	1201	JL. MASTRIP 1 (Timur)	ARTERI	37
21	704	701	JL. BASUKI RAHMAD 2 (Utara)	ARTERI	39
22	1201	2004	JL. SETIABUDI	ARTERI	35
23	205	202	JL. AGUS SALIM	ARTERI	36
24	1702	701	JL. RINGROAD 2 (Timur)	ARTERI	52
25	408	504	JL. DIPONEGORO	KOLEKTOR	33
26	1010	407	JL. DR SUTOMO 1	KOLEKTOR	36
27	206	205	JL. MUSI	KOLEKTOR	43
28	2010	206	JL. COKROAMINOTO	KOLEKTOR	33
29	4010	2012	JL. BALI	KOLEKTOR	37
30	406	407	JL. DR SUTOMO 2	KOLEKTOR	34
31	208	203	JL. CITANDUI	LOKAL	34
32	408	101	JL. JAWA	LOKAL	37
33	504	2101	JL. SLAMET RIYADI	LOKAL	42
34	403	406	JL. KOMPOL SUNARYO 1 (Timur)	LOKAL	41
35	406	403	JL. KOMPOL SUNARYO 1 (Barat)	LOKAL	42
36	406	409	JL. KOMPOL SUNARYO 2	LOKAL	36

Sumber data : Kajian Kinerja Lalu Lintas Tahun 2021



Kecepatan rata-rata tersebut cukup rendah dan berpotensi pengeluaran emisi yang cukup tinggi. Kecepatan yang rendah ini kemungkinan karena lalu lintas yang cukup padat, walaupun belum ada data berapa volume lalu lintas harian rata-rata di masing-masing ruas jalan tersebut. Perkembangan dari informasi, komunikasi, dan teknologi (ICT) menghasilkan gagasan untuk mengembangkan teknologi sensor yang lebih maju. Integrasi dari informasi, komunikasi dan teknologi di dalam bidang transportasi salah satunya adalah *Intelligent Transportation System (ITS)*, yang dapat membuat kondisi berkendara (*travelling experience*) menjadi lebih baik, lebih aman dan lebih efisien.



(Joelianto, 2018)

Gambar 0.16 Sensor Lalu Lintas

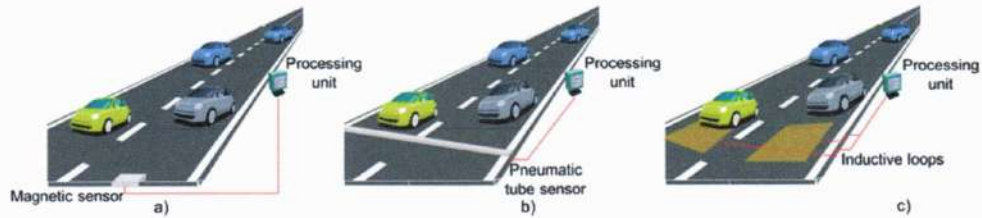
Tujuan utama ditematkannya *Fixed Sensors* adalah untuk mengumpulkan data lalu lintas, seperti misalnya :

1. Data jumlah kendaraan (volume kendaraan, komposisi kendaraan)
2. Kecepatan kendaraan (kecepatan rata-rata, over speeding, dll)
3. Kepadatan lalu lintas
4. Rata-rata *headway* (*occupancy* kendaraan, kepadatan lalu lintas, derajat kejenuhan)
5. Dan tujuan lainnya.



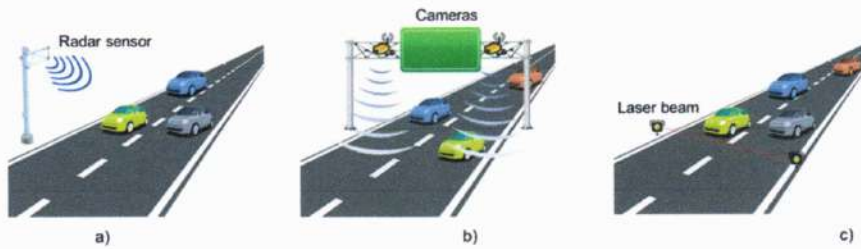
Sensor-sensor tersebut bekerja secara real-time dan akan membantu para stakeholder untuk menyediakan jaringan transportasi yang lebih baik dan lebih adaptif. *Fixed Sensor* dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang terlihat dan yang tidak terlihat (*intrusive and non-intrusive*).

1. *Intrusive*



Gambar 0.17 Sensor Intrusive

2. *Non Intrusive*



Gambar 0.18 Sensor NonIntrusive

Contoh lain *Road Sensors* dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 0.19 Road Sensors



Kategori	Tipe Sensor	Aplikasi dan Penggunaan
Intrusive (terlihat)	<i>Pneumatic road tube</i>	Digunakan untuk mendeteksi jumlah kendaraan, klasifikasi kendaraan, dan menghitung kendaraan
	<i>Inductive Loop Detector (ILD)</i>	Digunakan untuk mendeteksi pergerakan kendaraan, keberadaan kendaraan, menghitung kendaraan, dan <i>occupancy</i> kendaraan. Sinyalnya akan mencatat di dalam perangkat yang ditempatkan di sisi jalan
	<i>Magnetic sensor</i>	Digunakan untuk mendeteksi keberadaan kendaraan, dan mengidentifikasi kondisi berhenti-laju kendaraan
	<i>piezoelectric</i>	Mengklasifikasikan kendaraan, menghitung kendaraan dan mengukur beban dan kecepatan kendaraan
Non Intrusive (tak terlihat)	<i>Video Camera</i>	Mendeteksi kendaraan yang berpindah laju dan mengklasifikasikan kendaraan dari ukuran. Juga dapat mengetahui keberadaan kendaraan, <i>flow rate</i> , <i>occupancy</i> , dan kecepatan masing-masing golongan
	<i>Radar sensors</i>	Mendeteksi volume kendaraan dan kecepatan, mendeteksi arah dari kendaraan dan dapat digunakan untuk mengatur lampu lalu lintas
	<i>infrared</i>	Dapat digunakan untuk menghitung kecepatan kendaraan, ukuran kendaraan, volume kendaraan, dan <i>occupancy</i> jalur tersebut
	ultrasonic	Mentracking jumlah kendaraan, keberadaan kendaraan, dan <i>occupancy</i>
	Accoustic array sensors	Untuk membantu mengukur panjang lintasan kendaraan, keberadaan kendaraan dan kecepatan kendaraan
	Road surface conditionn sensors	Untuk mengumpulkan informasi cuaca, seperti suhu temperatur, <i>dew point</i> , <i>water film height</i> , dan kondisi jalan
	RFID (radio frequency identification)	Digunakan untuk mentracking kendaraan, biasanya digunakan di jalan tol

Kebanyakan orang menganggap kamera *Surveillance* atau CCTV adalah sensor lalu lintas. CCTV adalah kamera yang digunakan untuk memonitor saat real-time, atau merekam kondisi dari beberapa tempat yang berbeda di satu waktu yang sama. Tanpa melakukan analisis/penggunaan software/program, CCTV tidak akan menghasilkan informasi apapun, sebab data yang dihasilkan dari CCTV hanya berupa rekaman video. Untuk menghasilkan data lalu lintas, CCTV harus ditambahkan dengan beberapa perangkat atau program yang nantinya akan memproses gambar dan menghasilkan data lalu lintas yang diinginkan. Berikut ini merupakan data CCTV yang dimiliki oleh Kota Madiun berdasarkan lokasi.



no	Simpang	Jumlah Kaki Simpang	Lokasi	CCTV	Audio
1	SIMPANG PIRING / REJOAGUNG	4	JL. BASUKI RAHMAD	1	
			JL. RINGROAD	1	
			JL. YOS SUDARSO	1	
			JL. RAYA MADIUN - NGANJUK	1	
2	SIMPANG PROLIMAN	5	JL. DIPONEGORO	1	1
			JL. S. PARMAN	1	
			JL. THAMRIN	1	
			JL. RIMBA DHARMA	1	
3	SIMPANG KLEGEN	4	JL. MASTRIP	1	
			JL. THAMRIN	1	
			JL. SETIA BUDI	1	
			JL. MT HARYONO	1	
4	SIMPANG SERAYU - PANDJAITAN	4	JL. SERAYU	2	
			JL. DI PANJAITAN	2	
5	SIMPANG TE'AN	4	JL. RAYA GEGER	1	
			JL. KAPTEN TENDEAN	1	
			JL. DI PANJAITAN	1	
			JL. SUKARNO HATTA	1	
6	SIMPANG PATUNG GAJAH	4	JL. SUKARNO HATTA	2	
			JL. KALIMOSODO	1	
			JL. CILIWUNG	1	
7	SIMPANG MERAK	4	JL. SUKARNO HATTA	2	
			JL. MERAK	1	
8	SIMPANG SLEKO	4	JL. TRUNOJOYO	1	1
			JL. MAYJEND SUNGKONO	1	
			JL. MUSI	1	
			JL. H. AGUS SALIM	1	
9	SIMPANG AGUS SALIM - CITANDUI	4	JL. H. AGUS SALIM	2	
			JL. CITANDUI	1	
			JL. MERPATI	1	
10	SIMPANG SEMERU - ALUN2	4	JL. SEMERU	1	
			JL. ALUN2	2	
			JL. PANDAN	1	
11	SIMPANG GADING	3	JL. URIP SUMOHARJO	1	
			JL. RINGROAD	1	
			JL. RAYA SOLO	1	
12	SIMPANG RINGROAD - PUSPOWARNO	4	JL. RINGROAD	2	
			JL. PUSPO WARNO	1	
			JL. RAYA SIDOMULYO	1	
13	SIMPANG HAYAM WURUK	3	JL. URIP SUMOHARJO	1	
			JL. HAYAM WURUK	1	
14	SIMPANG SRITI	4	JL. URIP SUMOHARJO	1	1
			JL. MAYJEND SUNGKONO	1	
			JL. A. YANI	1	
			JL. KOL. MARHADI	1	
15	SIMPANG TUGU	4	JL. PAHLAWAN	1	1
			JL. COKROAMINOTO	1	
			JL. PANGLIMA SUDIRMAN	2	
16	SIMPANG JATIM CELL	3	JL. PANGLIMA SUDIRMAN	2	
			JL. DR. SUTOMO	1	
17	SIMPANG BALI	4	JL. PANGLIMA SUDIRMAN	2	
			JL. BALI	2	
18	SIMPANG LETKOL SUWARNO - KELAPA MANIS	4	JL. LETKOL SUWARNO	1	
			JL. KELAPA MANIS	1	
			JL. TAMAN PRAJA	1	
			JL. SUMBER KARYA	1	
19	SIMPANG JOYO	3	JL. DIPONEGORO	1	
			JL. IMAM BONJOL	1	
			JL. SLAMET RIYADI	1	
20	SIMPANG KARTINI	4	JL. DIPONEGORO	1	
			JL. DR. SUTOMO	2	
			JL. KARTINI	1	
21	SIMPANG MANDIRI	4	JL. JAWA	1	
			JL. PAHLAWAN	2	
			JL. A. YANI	1	
22	SIMPANG URIP SUMOHARJO - TIRTA RAYA	4	JL. URIP SUMOHARJO	2	
			JL. TIRTA RAYA	1	
			JL. SIDO MAKMUR	1	
23	Depan Matahari		Jl. Pahlawan	1	1
				83	5

Gambar 0.19 Data Lokasi dan Jumlah CCTV Kota Madiun

1. Keuntungan Pengumpulan Data Lalu Lintas

Kota yang memiliki fasilitas sensor lalu lintas akan mampu mengevaluasi kondisi lalu lintas di kotanya dengan mudah.



Beberapa evaluasi yang dapat dilakukan, antara lain :

- *Macroscopic* fundametal diagram (MFD)
- *OD-matrix estimation*
- Pembagian zona kota
- Tingkat homogenitas
- Pola kemacetan lalu lintas
- Memprediksi beberapa parameter lalu lintas
- Kota yang tidak memiliki sensor lalu lintas cenderung susah melakukan evaluasi-evaluasi tersebut.

2. Pengembangan Mobile Sensors

Mobile Sensor – sensor yang dapat berpindah-pindah – merupakan salah satu jenis dari sensor yang tertanam dalam kendaraan yang berarti sudah terpasang di setiap kendaraan. Dengan bantuan GPS akan mengumpulkan koordinat dari kendaraan, dan kecepatan kendaraan setiap waktu. Data ini akan digabungkan untuk mengestimasi waktu tempuh kendaraan, rute perjalanan, juga akan memberikan keluaran yang akurat seperti misalnya :

- *Average flow*
- Kepadatan rata-rata
- Kecepatan rata-rata
- Deteksi gangguan perjalanan
- Turning ratio
- Waktu siklus APILL
- Pola kemacetan
- Estimasi panjang antrian
- Matriks asal tujuan yang selalu terupdate

3. Keuntungan Dari Evaluasi Lalu Lintas

Dengan menggabungkan fixed and mobile sensor, maka akan memberikan banyak peluang untuk mengembangkan algoritma prediksi lalu lintas yang lebih baik. Google telah memulai proyek ini dengan menambahkan google maps berupa beberapa fitur, seperti estimasi waktu tempuh, atau rute perjalanan terbaik. Juga banyak metode lain yang dapat digunakan untuk memprediksi lalu lintas, lebih tepatnya prediksi yang menggabungkan aspek temporal dan ruang.



4. Pengambil Data Menggunakan Simulator

Traffic Simulators juga dapat digunakan untuk menghasilkan parameter lalu lintas suatu kota yang tidak didapatkan dari sensor lalu lintas itu sendiri. Beberapa *traffic simulator* seperti Vissim, SUMO, Aimsun, Matsim dapat menampilkan kondisi lalu lintas dari data sampling, walaupun tingkat akurasi tidak tinggi. Beberapa parameter berikut yang dibutuhkan untuk analisis lalu lintas (*reconstruct proper traffic analysis*) :

- Volume kendaraan di beberapa titik
- Distribusi kecepatan kendaraan (dengan asumsi kondisi yang hampir sama di semua titik)
- Komposisi kendaraan (dengan asumsi kondisi yang hampir sama di semua titik)
- *Turning Ratio*
- Waktu siklus / waktu nyala hijau APILL di setiap persimpangan

Sensor lalu lintas merupakan suatu alat yang dapat menyediakan evaluasi kondisi lalu lintas kota secara akurat dan dapat diandalkan. Dengan adanya data lalu lintas dari fixed dan mobile sensors akan sangat membantu pemerintah mengatur lalu lintas yang lebih baik untuk kotanya. Meskipun suatu kota belum memiliki sensor, kota tersebut tetap dapat mengevaluasi dan menganalisis kondisi lalu lintas kota dengan tingkat akurasi yang rendah dengan menggunakan *traffic simulators*. Semua saran digunakan untuk membuat kondisi lalu lintas yang lebih baik di Indonesia, dengan tujuan untuk membangun *smart city* di Indonesia.

D. Wajah Kota

Pengembangan wajah kota dapat dilakukan dengan cara pembangunan *landmark* sebagai ikon kota Madiun, penataan taman – taman kota, penambahan penanda jalan – jalan kota (signage), penambahan RTH di wilayah Kota, dan memastikan kebersihan kota. Sehingga dengan melihat wajah Kota Madiun yang indah, bersih, dan rapi semakin menambah ciri khas Kota Madiun sesuai dengan ikon Kota Madiun Kharismatik.

2.9.5 Infrastruktur Sosial

Infrastruktur sosial adalah semua yang berhubungan dengan sistem, nilai, norma, peraturan, dan pelayanan publik, yang disediakan oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah. Dengan pembangunan infrastruktur sosial dapat meningkatkan perilaku sosial dan pola pikir masyarakat. Selain itu infrastruktur sosial juga meliputi kesehatan dan pendidikan masyarakat.



Peningkatan infrastruktur sosial bertujuan untuk menjadikan masyarakat Kota Madiun menjadi lebih berkualitas. Pembangunan infrastruktur sosial dapat dilakukan dengan adanya komunitas pemuda sadar wisata, pemberian pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, penegakan hukum yang ada di masyarakat, peningkatan pelayanan publik, kebijakan publik, dan terpenuhinya norma – norma yang ada di masyarakat.

4.3. Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City Kota Madiun

Pembangunan *Smart City* merupakan usaha yang kontinu, bertahap, dan bersifat multi sektoral oleh karena itu diperlukan sebuah perencanaan berjangka waktu dan terintegrasi yang dituangkan dalam bentuk dokumen masterplan *Smart City*. Analisis kondisi pengembangan aplikasi dan perangkat lunak ini sebagai pijakan awal (*baseline*) sekaligus salah satu pertimbangan utama dalam merumuskan paket-paket pekerjaan bidang TIK yang harus dilakukan selama lima tahun ke depan.

Selain itu, mengingat pengembangan aplikasi *Smart City* pada dasarnya merupakan pengembangan dari aplikasi *e-Government* yang lingkupnya mencakup skala integrasi sehingga disebut sebagai smart government, maka diperlukan kerangka komunikasi antar sistem smart e-Government untuk saling berhubungan dan saling bekerjasama atau *interoperabel*.

Disamping itu, sistem *e-Government* lingkup serta fungsinya juga cukup besar sehingga dalam pembangunannya hampir dapat dipastikan melibatkan banyak pihak, baik pengembang maupun analis yang handal, sehingga diperlukan mekanisme komunikasi baku antar sistem, sehingga masing-masing sistem aplikasi dapat saling bersinergi untuk membentuk layanan *smart e-Government* yang lebih besar dan kompleks. Oleh karena itu, dalam membangun sistem aplikasi *smart e-Government* diperlukan standarisasi pengembangan sistem aplikasi yang akan menjamin bahwa komunikasi antar sistem tersebut dapat dilakukan oleh siapapun pengembang sistem aplikasi. Berikut adalah Standar Kebutuhan Sistem Aplikasi yang harus dipenuhi oleh setiap sistem aplikasi *smart eGovernment*:



a. Reliable

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bebas *bug/error*.

b. Interoperable

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem.

c. Scalable

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan *user* dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar.

d. User Friendly

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya.

Selain harus memenuhi standar yang harus dipenuhi, pembangunan sistem aplikasi memiliki tahapan yang dilakukan analisis untuk menentukan aplikasi apa saja yang akan diusulkan. Adapun tahapan yang harus dilakukan dalam perencanaan usulan aplikasi yaitu:

a. Penentuan Kelompok Urusan

Setiap urusan yang dimiliki oleh tiap Perangkat Daerah (PD) pada kota Madiun didapatkan dari RPJMD serta tupoksi yang mengatur untuk masing-masing kegiatan dalam PD. Urusan yang telah berhasil diidentifikasi akan dikelompokkan berdasarkan kesamaan cakupan tugas dan wewenang. Di kota Madiun, terdapat 26 PD yang telah dilakukan penggalan kebutuhan potensi sistem informasi serta data sistem informasi yang telah dibangun dan dimanfaatkan sampai saat ini. Tiap PD memiliki berbagai jumlah urusan yang berbeda-beda sesuai sasaran pada RPJMD dan tupoksi yang mengaturnya. Dalam tabel 4.2 disebutkan merupakan rekapitulasi data jumlah urusan, dan jumlah sasaran RPJMD dari tiap PD yang digunakan sebagai acuan penentuan kebutuhan aplikasi disetiap PD.



Tabel 0.2 Total Kelompok Urusan

No	Nama PD	Jumlah Urusan	Jumlah Sasaran RPJMD
1.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2	2
2.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	2	1
3.	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	1	1
4.	Sekretariat Daerah Kota Madiun	1	1
5.	Sekretariat DPRD Kota Madiun	1	1
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	2
8.	Dinas Penanaman Modal, PTSP	1	2
9.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	1
10.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	3	1
11.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)	2	1
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	1	1
13.	Dinas Pendidikan	1	1
14.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3	2
15.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda)	2	3
16.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2	2
17.	Satpol PP	1	1
18.	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	1	1
19.	Inspektorat Kota Madiun	1	1
20.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)	1	1
21.	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	1	1
22.	Dinas Perdagangan	1	1
23.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	3	2
24.	Dinas Perhubungan	1	2
25.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3	2
26.	Kecamatan	1	2
TOTAL		42	36



Berdasarkan informasi pada tabel 4.2 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah urusan pada semua PD adalah 42 urusan, dengan jumlah sasaran RPJMD sebanyak 36 sasaran.

b. Daftar Aplikasi dalam Masterplan e-Government dan Kaitannya dengan Dimensi Smart City

Kota Madiun telah mempunyai rencana pembangunan *e-Government* yang termuat dalam masterplan *e-Government*. Pada tabel dibawah ini diuraikan aplikasi apa saja yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Madiun serta usulan aplikasi yang akan dibuat sebagai acuan pengembangan di tahun 2023 dan keterkaitannya dengan dimensi-dimensi *Smart City* Kota Madiun.

Table 0.3 Daftar Aplikasi dan Domain Kota Madiun

No.	DOMAIN	OPD
1	jdih.madiunkota.go.id.	Bagian Hukum
2	hukum.madiunkota.go.id.	Bagian Hukum
3	dokum.madiunkota.go.id.	Bagian Hukum
4	umum.madiunkota.go.id.	Bagian Umum
5	lppd2020.madiunkota.go.id.	Bagian Pemerintahan
6	pemerintahan.madiunkota.go.id.	Bagian Pemerintahan
7	lppd.madiunkota.go.id.	Bagian Pemerintahan
8	ekokesra.madiunkota.go.id.	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat
9	organisasi.madiunkota.go.id.	Bagian Organisasi
10	evjab.madiunkota.go.id.	Bagian Organisasi
11	esakip2020.madiunkota.go.id.	Bagian Organisasi
12	simjab.madiunkota.go.id.	Bagian Organisasi
13	esakiplama.madiunkota.go.id.	Bagian Organisasi
14	esakip.madiunkota.go.id.	Bagian Organisasi
15	lpse.madiunkota.go.id.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan
16	adbang.madiunkota.go.id.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan
17	emonev.madiunkota.go.id.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan
18	simpadama.madiunkota.go.id.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan
19	simandor.madiunkota.go.id.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan

No.	DOMAIN	OPD
20	lpse.madiunkota.net.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan
21	apisimandor.madiunkota.go.id.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan
22	inspektorat.madiunkota.go.id.	Inspektorat
23	wbs.madiunkota.go.id.	Inspektorat
24	setdprd.madiunkota.go.id.	Sekretariat DPRD
25	dprd.madiunkota.go.id.	Sekretariat DPRD
26	bkad.madiunkota.go.id.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
27	sigma.madiunkota.go.id.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
28	sipkd.madiunkota.go.id.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
29	sipkd.madiunkota.go.id.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
30	sikuda.madiunkota.go.id.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
31	bapenda.madiunkota.go.id.	Badan Pendapatan Daerah
32	bakesbangpol.madiunkota.go.id.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
33	bpbd.madiunkota.go.id.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
34	eplanning.madiunkota.go.id.	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
35	bappeda.madiunkota.go.id.	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
36	bappeda.madiunkota.go.id.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
37	bapelitbangda.madiunkota.go.id.	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
38	simonev2020.madiunkota.go.id.	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
39	kak.madiunkota.go.id.	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
40	csr.madiunkota.go.id.	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
41	simonev.madiunkota.go.id.	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
42	simpeg.madiunkota.go.id.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
43	sik19.madiunkota.go.id.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
44	gedungdiklat.madiunkota.go.id.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
45	tesremun.madiunkota.go.id.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
46	bkd.madiunkota.net.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
47	skp.madiunkota.go.id.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



No.	DOMAIN	OPD
48	skp2021.madiunkota.go.id.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
49	bkd.madiunkota.net.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
50	bkpsdm.madiunkota.go.id.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
51	sik.madiunkota.go.id.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
52	investasi.madiunkota.go.id.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
53	perizinan.madiunkota.go.id.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
54	dpmptsp.madiunkota.go.id.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
55	oss.madiunkota.go.id.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
56	sikd.madiunkota.go.id.	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
57	perpustakaan.madiunkota.go.id.	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
58	inlis.madiunkota.go.id.	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
59	sikd2020.madiunkota.go.id.	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
60	sikd.madiunkota.net.	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
61	inlis.madiunkota.net.	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
62	umkm.madiunkota.go.id.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
63	disnaker.madiunkota.go.id.	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
64	sicaker.madiunkota.go.id.	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
65	api-sicaker.madiunkota.go.id.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
66	ppdb.madiunkota.go.id.	Dinas Pendidikan
67	disdik.madiunkota.go.id.	Dinas Pendidikan
68	lidisdik.madiunkota.go.id.	Dinas Pendidikan
69	beasiswa.madiunkota.go.id.	Dinas Pendidikan
70	latihan-ppdb.madiunkota.go.id.	Dinas Pendidikan
71	ppdb.madiunkota.net.	Dinas Pendidikan
72	capil.madiunkota.go.id.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
73	coklit.madiunkota.go.id.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
74	silandep.madiunkota.go.id.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
75	pemburu.madiunkota.go.id.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
76	profilpenduduk.madiunkota.go.id.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



No.	DOMAIN	OPD
77	takziah.madiunkota.go.id.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
78	digiform.madiunkota.go.id.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
79	profilpenduduk2021.madiunkota.go.id.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
80	ektp.madiunkota.net.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
81	capil.madiunkota.net.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
82	ayokemadiun.madiunkota.go.id.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
83	disbudparpora.madiunkota.go.id.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
84	dinsos.madiunkota.go.id.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
85	dinsosapp.madiunkota.go.id.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
86	puskesmas.madiunkota.go.id.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
87	bansos.madiunkota.go.id.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
88	silat.madiunkota.go.id.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
89	dpupr.madiunkota.go.id.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
90	disperta.madiunkota.go.id.	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
91	dlh.madiunkota.go.id.	Dinas Lingkungan Hidup
92	sisemar.madiunkota.go.id.	Dinas Lingkungan Hidup
93	ujiau.madiunkota.go.id.	Dinas Lingkungan Hidup
94	sitebas.madiunkota.go.id.	Dinas Lingkungan Hidup
95	silapling.madiunkota.go.id.	Dinas Lingkungan Hidup
96	satpol.madiunkota.go.id.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
97	dinkes.madiunkota.go.id.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
98	puskesmasdemangan.madiunkota.go.id.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
99	puskesmasngegong.madiunkota.go.id.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
100	puskesmasbanjarejo.madiunkota.go.id.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
101	puskesmassukosari.madiunkota.go.id.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
102	puskesmasmanguharjo.madiunkota.go.id.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
103	puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
104	sikda.madiunkota.go.id.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
105	rsl-asramahaji.madiunkota.go.id.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
106	rsl.madiunkota.go.id.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
107	ppkm.madiunkota.go.id.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No.	DOMAIN	OPD
108	verval.madiunkota.go.id.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
109	mobdin.madiunkota.go.id.	Dinas Perhubungan
110	api-simpkb.madiunkota.go.id.	Dinas Perhubungan
111	dashboard-dishub.madiunkota.go.id.	Dinas Perhubungan
112	ujikir.madiunkota.go.id.	Dinas Perhubungan
113	dishub.madiunkota.go.id.	Dinas Perhubungan
114	sipandu.madiunkota.go.id.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
115	appsipandu.madiunkota.go.id.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
116	disperkim.madiunkota.go.id.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
117	bakul.madiunkota.go.id.	Dinas Perdagangan
118	retribusi.madiunkota.go.id.	Dinas Perdagangan
119	perdagangan.madiunkota.go.id.	Dinas Perdagangan
120	kecamatan-manguharjo.madiunkota.go.id.	Kecamatan Manguharjo
121	sicakra.madiunkota.go.id.	Kecamatan Manguharjo
122	kecamatan-taman.madiunkota.go.id.	Kecamatan Taman
123	kecamatan-kartoharjo.madiunkota.go.id.	Kecamatan Kartoharjo
124	kelurahan-kanigoro.madiunkota.go.id.	Kelurahan Kanigoro
125	kelurahan-kelun.madiunkota.go.id.	Kelurahan Kelun
126	kelurahan-klegen.madiunkota.go.id.	Kelurahan Klegen
127	kelurahan-oroorombo.madiunkota.go.id.	Kelurahan Oro-Oro Ombo
128	kelurahan-pilangbango.madiunkota.go.id.	Kelurahan Pilangbango
129	kelurahan-rejomulyo.madiunkota.go.id.	Kelurahan Rejomulyo
130	kelurahan-sogaten.madiunkota.go.id.	Kelurahan Sogaten
131	kelurahan-sukosari.madiunkota.go.id.	Kelurahan Sukosari
132	kelurahan-tawangrejo.madiunkota.go.id.	Kelurahan Tawangrejo
133	kelurahan-banjarejo.madiunkota.go.id.	Kelurahan Banjarejo
134	kelurahan-demangan.madiunkota.go.id.	Kelurahan Demangan
135	kelurahan-josenan.madiunkota.go.id.	Kelurahan Josenan
136	kelurahan-kejuron.madiunkota.go.id.	Kelurahan Kejuron
137	kelurahan-kuncen.madiunkota.go.id.	Kelurahan Kuncen
138	kelurahan-manisrejo.madiunkota.go.id.	Kelurahan Manisrejo
139	kelurahan-mojorejo.madiunkota.go.id.	Kelurahan Mojorejo

No.	DOMAIN	OPD
140	kelurahan-pandean.madiunkota.go.id.	Kelurahan Pandean
141	kelurahan-madiunlor.madiunkota.go.id.	Kelurahan Madiun Lor
142	kelurahan-nambangankidul.madiunkota.go.id.	Kelurahan Nambangan Kidul
143	kelurahan-nambanganlor.madiunkota.go.id.	Kelurahan Nambangan Lor
144	kelurahan-ngegong.madiunkota.go.id.	Kelurahan Ngegong
145	kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id.	Kelurahan Pangongangan
146	kelurahan-winongo.madiunkota.go.id.	Kelurahan Winongo
147	kelurahan-patihian.madiunkota.go.id.	Kelurahan Patihan
148	kelurahan-manguharjo.madiunkota.go.id.	Kelurahan Manguharjo
149	kelurahan-kartoharjo.madiunkota.go.id.	Kelurahan Kartoharjo
150	kelurahan-taman.madiunkota.go.id.	Kelurahan Taman
151	pkk.madiunkota.go.id.	Tp Pkk Kota Madiun
152	bankdaerah.madiunkota.go.id.	Bumd Bank Daerah Kota Madiun
153	anekausaha.madiunkota.go.id.	Bumd Aneka Usaha
154	pdam.madiunkota.go.id.	Bumd Pdam
155	rsud.madiunkota.go.id.	Rumah Sakit Umum Daerah
156	rsudsogaten.madiunkota.go.id.	Rsud Sogaten

Table 0.4
Daftar Aplikasi Kota Madiun dan Statusnya

Nama OPD	ID	Nama Aplikasi	Status Pengembangan Sedang / Selesai dikembangkan	Status Penggunaan (tidak / belum / masih digunakan)
Bagian Organisasi	A.E.01.01	E-SAKIP (https://esakip.madiunkota.go.id/)	Sedang dikembangkan	Masih digunakan
Bagian Organisasi	A.E.01.02	PMPRB (https://pmprb.menpan.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Bagian Organisasi	A.E.01.03	Website Bagian Organisasi (https://organisasi.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Bagian Organisasi	A.E.01.04	Aplikasi Anjab&ABK / SINJAB (sinjabmadiunkota.go.id)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Bagian Hukum	A.E.02.01	JDIH (https://jdih.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Bagian Hukum	A.E.02.02	Website Bagian Hukum	Selesai dikembangkan	Masih digunakan



		(https://hukum.madiunkota.go.id/)		
Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	A.E.03.01	LPSE (https://lpse.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	A.E.03.02	SIRUP	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	A.E.03.03	INAPROC (https://inaproc.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	A.E.03.04	e-purchasing	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	A.E.03.05	e-Katalog (https://e-katalog.lkpp.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	A.E.03.06	SIKAP (https://sikap.lkpp.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	A.E.03.07	Website Bagian Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan (https://adbang.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	A.E.04.01	Website Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (https://ekokesra.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Bagian Umum	A.E.05.01	Si Cakep	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Bagian Umum	A.E.05.02	E-Ruang	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Bagian Pemerintahan	A.E.06.01	Website Bagian Pemerintah (https://pemerintahan.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A.E.07.01	Website BPBD (http://bpbd.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	A.E.08.01	E-KAK	Selesai dikembangkan	Masih digunakan



Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	A.E.08.02	Simonev (https://simonev.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	A.E.08.03	Website BAPEDALITBANGDA (https://bapelitbangda.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.01	ASB (Analisis Standar Biaya) (https://sipkd.madiunkota.go.id/asb2023)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.02	SIPD https://madiun.sipd.kemendagri.go.id/daerah	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.03	SIPKD http://sipkd.madiunkota.go.id/sipkd2022	Sedang dikembangkan	Masih digunakan
Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.04	SIM GAJI	Sedang dikembangkan	Masih digunakan
Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.05	OMSPAN https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.06	UPDATE AGENDA KEGIATAN PIMPINAN https://sipkd.madiunkota.go.id/agenda_kegiatan_pimpinan/	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.07	DID (http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/lapor_djpk/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.08	SIMPONI https://www.simpONI.kemenkeu.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.09	SIMTRADA (Sistem Informasi Transfer ke Daerah Dan Dana Desa)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.10	SIGMA https://sigma.madiunkota.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.11	SIMDA BMD	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.12	Website BKAD (https://bkad.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Keuangan dan Aset Daerah	A.E.09.13	ALADIN	Sedang dikembangkan	Masih digunakan
Badan Pendapatan Daerah	A.E.10.01	SIMPADAMA (https://simpadama.madiunkota.go.id/)	Sedang dikembangkan	Masih digunakan
Badan Pendapatan Daerah	A.E.10.02	SISMIOP	Selesai dikembangkan	Masih digunakan

Badan Pendapatan Daerah	A.E.10.03	Website BAPENDA (https://bapenda.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Pendapatan Daerah	A.E.10.04	TAPINGBOX	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.01	SIK (https://sik.madiunkota.go.id/simpeg/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.02	M-SKP (https://skp.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.03	E-Kinerja (https://ekinerja.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.04	My SAPK (SAPK)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.05	Website BKPSDM (https://bkpsdm.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.06	SI HARKA (https://siharka.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.07	IDIS BKN (https://idis.bkn.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.08	SIASN (https://siasn.bkn.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.09	e-Mutasi (https://emutasiotda.kemendagri.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.10	SIOLA (https://ula.kemendagri.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.11	AREK Online (http://www.arekkanreg2bkn.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A.E.11.12	SSCASN (https://sscasn.bkn.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan



Sumber Daya Manusia				
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A.E.12.01	Si-Permata (https://bakesbangpol.madiunkota.go.id/sipermata/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A.E.12.02	Website BAKESBANGPOL (https://bakesbangpol.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Inspektorat Daerah	A.E.13.01	SPIP (Sistem Informasi Pengendalian Intern)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Inspektorat Daerah	A.E.13.02	Website Inspektorat (https://inspektorat.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Sekretariat DPRD	A.E.14.01	e-AR (http://dprd.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Sekretariat DPRD	A.E.14.02	e-Inisiatif (http://dprd.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan
Sekretariat DPRD	A.E.14.03	Website Sekretariat DPRD (https://setdprd.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.01	Website Dinkes, PP dan KB (http://dinkes.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.02	SIST-BRO (http://sikda.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.03	KUE DAKON (kuedakon.my.id)	Sedang dikembangkan	Belum digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.04	SIHA (Sistem Informasi HIV/AIDS)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.05	SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.06	RENBut (https://renbut.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.07	SI-SDMK (https://sisdmk.kemkes.go.id/login)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan



Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.08	Aplikasi Keluarga Sehat 2.0 (PIS-PK)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.09	ASPAK (http://aspak.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.10	Pcare BPJS	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.11	E-Filca	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.12	Elsimil	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.13	E-Monev HSP (Higien dan Sanitasi Pangan)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.14	E-Monev Kualitas Kesling (TTU, TFU, PKAM, STBM, PLM, KKS)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.15	E-Puskesmas (https://epuskesmas.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.16	e-Renggar (https://e-renggar.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.17	HFIS (https://hfis.bpjs-kesehatan.go.id/hfis/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.18	IKP (https://mutufasyankes.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.19	JKN Mobile	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.20	Kampung KB	Selesai dikembangkan	Masih digunakan



Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.21	KLIK KB (https://klikkb.com/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.22	Komdat Kesmas (https://komdatkesmas.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.23	KPCPEN VAKSINASI	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.24	KRISNA	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.25	Lupis (https://lupis.bpjs-kesehatan.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.26	Monitoring PPKM	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.27	Morena	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.28	New All Record Antigen/PCR COVID-19 (https://allrecord-antigen.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.29	New Siga (https://newsiga.bkbn.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.30	E-Logistik	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.31	SIERA (https://siera.bpkp.go.id/p3dn)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.32	PWS Imunisasi (IDL, Campak Rubela)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.33	Si Gizi Terpadu - ePPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi	Selesai dikembangkan	Masih digunakan

Berencana		Berbasis Masyarakat)		
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.34	Sikelim (Sistem Informasi Kelola Limbah Medis)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.35	SIPTM	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.36	SISMAL (Sistem Informasi Malaria)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.37	SISRUTE (Sistem Rujukan Terpadu)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.38	SITKO	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.39	SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.40	SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.41	Pemantaua Wilayah Setempat (PWS) Campak	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.42	Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) ISPA / ILI	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.43	PK 21	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.44	Sehat Jiwa (Aplikasi Konsultasi Kesehatan Jiwa)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.45	SI RAJA LIMBAH	Selesai dikembangkan	Masih digunakan

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.46	SIHEPI (http://sihepi.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.47	SIKDA Generik	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.48	SILACAK (Sistem Informasi Tracing COVID-19)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.49	SILANTOR (https://silantor.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.50	Silili KEREN	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.51	Simkeswa (http://siskewa.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.52	Siperindu (https://siperindu.online/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.53	SIPGAR (https://sipgar.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.54	SIPNAP (https://sipnap.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.55	SIPP BPJS (https://sipp.bpjs-kesehatan.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.56	SISCOBIKES (http://siscobikes.pjk.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.57	Siskohatkes (https://siskohatkes.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.58	Sistem Informasi Promkes (https://promkes.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.59	SITRUST HIV	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.60	Statistik Rutin (http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.61	Surveilans PD3I (http://pd3i.org/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.62	Sistem Pelaporan INM Puskesmas	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.63	SITRUS TB	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.64	SITASIA (Sistem Informasi Program Kusta dan Frambusia)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.65	SIMONA (https://simona.ke.mkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.66	E-KOHORT (https://ekohort.ke.mkes.go.id/)	Selesai Dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.67	ASIK	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.68	APLIKASI KOMUNIKASI DATA / KOMDAT(https://komdat.kemkes.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.69	SIRIKA (http://sirika.bkkbn.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A.E.15.70	Rumah Dataku	Selesai dikembangkan	Masih digunakan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A.E.16.01	SILAT (www.silat.madiunkota.go.id)	Selesai dikembangkan	Tidak digunakan (sudah beralih ke aplikasi Lapormilik pusat)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A.E.16.02	SIMBG	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A.E.16.03	Website DPUPR (https://dpupr.madiunkab.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	A.E.17.01	Sisan Baline	Sedang dikembangkan menjadi Aplikasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Masih digunakan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	A.E.17.02	Website Disperkim (https://disperkim.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A.E.18.01	SIMFONI PPA (https://kekerasan.kemenppa.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A.E.18.02	SIDEGAN (https://www.sites.google.com/view/sidegan-kotamadiun)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A.E.18.03	PUSKESOS (https://puskesos.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A.E.18.04	SIKS-NG (https://siks.kemensos.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A.E.18.05	MADIUN MONITORING (dinsosapp.madiunkota.go.id)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A.E.18.06	Website Dinas Sosial P3A (dinsos.madiunkota.go.id)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	A.E.19.01	E-KAMI	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	A.E.19.02	SiCAKER (sicaker.madiunkota.go.id)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	A.E.19.03	Website DISNAKER (https://disnaker.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	A.E.19.04	SISKOTKLN (http://siskotkln.bn p2tki.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Pendidikan	A.E.20.01	Be SMART Kota Madiun (https://beasiswa.m adiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Pendidikan	A.E.20.02	Aplikasi LI (https://lidisdik.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Pendidikan	A.E.20.03	PPDB (https://ppdb.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Pendidikan	A.E.20.04	Website Dinas Pendidikan (https://disdik.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Pendidikan	A.E.20.05	DAPODIK (https://dapo.kemdikbud.go.id/)	Selesai Dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Pendidikan	A.E.20.06	AKM Kelas (https://pusmendik.kemdikbud.go.id/ak mkelas/)	Selesai Dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	A.E.21.01	Website Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (https://disperta.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Lingkungan Hidup	A.E.22.01	SILAPLING (silapling.madiunkota.go.id)	Sedang dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Lingkungan Hidup	A.E.22.02	Website Dinas Lingkungan Hidup (https://dlh.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Lingkungan Hidup	A.E.22.03	SITEBAS (Sistem Informasi Terpadu Bank Sampah)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.23.01	SIK TERPUSAT	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.23.02	Aplikasi Digiform	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.23.03	SILANDEP (SISTEM INFORMASI LAYANAN DUKCAPIL DAN PA)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.23.04	Web Intranet Disdukcapil (capil.madiunkota.net)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.23.05	BCARD	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.23.06	BENROLLER	Selesai dikembangkan	Masih digunakan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.23.07	Website Dispendukcapil (https://capil.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.23.08	Web Service Pemanfaatan Data DWH Terpusat	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A.E.23.09	Klik WA	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Perhubungan	A.E.24.01	E-Kir (http://ujikir.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Perhubungan	A.E.24.02	Website Dinas Perhubungan (https://dishub.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Perhubungan	A.E.24.03	CSS Bank Jatim	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Perhubungan	A.E.24.04	e-TLE (https://etle.jatim.polri.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.25.01	Aplikasi Edu (edu.madiunkota.go.id)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.25.02	agenda.madiunkota.go.id	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.25.03	servicedesk (servicedesk dan klik wa.net)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.25.04	e-surat	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.25.05	Syslog	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.25.06	LAPOR SP4N (https://kotamadiun.lapor.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.25.07	Madiun Dashboard (https://dashboard.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.25.08	Website Dinas Komunikasi dan Informatika (https://Dinas Komunikasi dan Informatika.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.25.09	PPID https://ppid.madiunkota.go.id/	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.25.10	Penyimpanan Arsip Bersama	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Komunikasi dan Informatika	A.E.25.11	TTE (Tanda Tangan Elektronik)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A.E.26.01	MASS Madiun (https://perizinan.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A.E.26.02	OSS (https://oss.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A.E.26.03	WEBGIS DPMPSTSP (https://perizinan.madiunkota.go.id/webgis/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A.E.26.04	PETA SEBARAN INVESTASI (https://investasi.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A.E.26.05	Website DPMPSTSP (https://perizinan.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	A.E.27.01	Website Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga (https://disbudparpora.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A.E.28.01	iMadiun	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A.E.28.02	SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A.E.28.03	INLIS.LITE (inlislite.madiunkota.go.id)	sedang dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A.E.28.04	Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (https://perpustakaan.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A.E.28.05	SIKD (https://sikd.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Perdagangan	A.E.29.01	E-Retribusi	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Dinas Perdagangan	A.E.29.02	Bumu	Selesai dikembangkan	Masih digunakan



Dinas Perdagangan	A.E.29.03	Website Dinas Perdagangan (https://perdagangan.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A.E.30.01	Website Satpol PP dan Damkar (https://satpol.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A.E.30.02	BBM Satpol PP	Sedang dikembangkan	Masih digunakan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A.E.30.03	aplikasi Gakda	Sedang dikembangkan	masih digunakan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A.E.30.04	SIM Satpol PP Kota Madiun (sim.polppmadiunkota.id)	Sedang dikembangkan	masih
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A.E.30.05	Lek Pakar	Sedang dikembangkan	belum digunakan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	A.E.31.01	E-SITI	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	A.E.31.02	SIM-RS	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	A.E.31.03	SISMADAK	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	A.E.31.04	Pendekar Hati	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	A.E.31.05	INACBGS	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	A.E.31.06	SI-JASPEL	Sedang dikembangkan	Masih digunakan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	A.E.31.07	Website RSUD Kota Madiun (http://rsud.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Kecamatan Manguharjo	A.E.32.01	SICAKRA	Sedang dikembangkan	Masih digunakan
Kecamatan Manguharjo	A.E.32.02	Website Kecamatan Manguharjo (https://kecamatan-manguharjo.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Kecamatan Kartoharjo	A.E.33.01	E-Surprais (e-surprais.epizy)	Sedang dikembangkan	Masih digunakan
Kecamatan Kartoharjo	A.E.33.02	Website Kecamatan Kartoharjo (https://kecamatan-kartoharjo.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Kecamatan Kartoharjo	A.E.33.03	SKM-Karto	Sedang dikembangkan	Masih digunakan

7

Puskesmas Manguharjo	A.E.34.01	Website Puskesmas Manguharjo (https://puskesmas.manguharjo.madiun.kota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan
Puskesmas Sukosari	A.E.35.01	Website Puskesmas Sukosari (https://puskesmas.sukosari.madiunkota.go.id/)	Selesai dikembangkan	Masih digunakan

Tahun 2023				
No	Nama Sistem Informasi	PD	Keterangan	Dimensi
1	Aplikasi Data Gedung Pemerintah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Aplikasi yang dapat menampilkan data-data mengenai gedung pemerintah	<i>Smart governance</i>
2	Aplikasi List Kelengkapan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Aplikasi yang digunakan untuk mengecek kelengkapan dari gedung dan bangunan	<i>Smart governance</i>
3	Aplikasi List Progress Pemantauan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Aplikasi yang dapat menunjukkan mengenai progres dari pemantauan yang sudah dilakukan ke lapangan	<i>Smart governance</i>
4	SIM Kebutuhan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Sistem informasi untuk dapat mengelola kebutuhan dan menyesuaikan PAK dengan kebutuhan anggaran, Fitur: data anggaran data inventaris	<i>Smart governance</i>

1

Tahun 2023				
No	Nama Sistem Informasi	PD	Keterangan	Dimensi
			data pengadaan data PAK	
5	Aplikasi update informasi ketersediaan gedung diklat	BKD	aplikasi mampu memberikan informasi mengenai gedung diklat yang masih tersedia beserta dengan tanggal dan waktunya, mengupdate data ketersediaan gedung diklat, menginputkan data gedung diklat.	<i>Smart governance</i>
6	Sistem Informasi Pelaporan Pemeliharaan Fasilitas Umum	Kecamatan	Sistem informasi pelaporan warga terhadap fasilitas umum yang rusak, sengaja dirusak, atau membutuhkan fasilitas tambahan	<i>Smart governance</i>
7	Integrasi agenda untuk seluruh sekpri	Sekretariat Daerah	Integrasi data untuk sekpri	<i>Smart governance</i>
9	SIM GAKDA	SATPOL PP		<i>Smart governance</i>
10	Apresiasi Seniman (SIM)	Dinas Pariwisata	Sistem informasi untuk menampilkan dan mengapresiasi seniman	<i>Smart society</i>
13	SIM Inventarisasi	Dinas Pertanian dan Pangan	Sistem informasi yang membantu dalam mengelola inventarisasi OPD	<i>Smart governance</i>

Tahun 2023				
No	Nama Sistem Informasi	PD	Keterangan	Dimensi
16	Aplikasi Baca Online Yuk!	Dinas Perpustakaan	Aplikasi perpustakaan untuk membaca buku secara online	<i>Smart society</i>
17	SIM Sosialisasi Kearsipan	Dinas Perpustakaan	Penjadwalan sosialisasi kearsipan. Memasukkan data target dan realisasi pencapaian tiap sosialisasi dengan OPD lain, untuk memastikan bahwa menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai dengan yang diharapkan	<i>Smart governance</i>
18	Dashboard Persebaran Hasil Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dasboard yang berisi informasi mengenai titik-titik persebaran hasil industri	<i>Smart economy</i>
19	Dashboard Pemetaan	Dinas Kesehatan	terkait masing-masing urusan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit	<i>Smart governance</i>
20	Dashboard Kesehatan Kota Madiun	Dinas Kesehatan	Menampilkan visualisasi berkaitan dengan kesehatan, angka kematian, dan keluarga berencana	<i>Smart governance</i>



Tahun 2023				
No	Nama Sistem Informasi	PD	Keterangan	Dimensi
21	SIM Pameran Dagang	Dinas Perdagangan	Sistem informasi yang mampu memberikan informasi mengenai pameran dagang, promosi produk dalam negeri	<i>Smart economy</i>
22	Dashboard Konflik	Bakesbangpol	Dashboard yang menampilkan visualisasi konflik yang terjadi di kota Madiun	<i>Smart society</i>
23	RTHKP Virtual 360	Dinas Lingkungan Hidup	Aplikasi yang dapat menampilkan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dengan vitur 360. aplikasi ini dapat menjadi sarana edukasi, hiburan maupun sumber informasi bagi masyarakat	<i>Smart environment</i>
24	Dashboard Kependudukan untuk <i>Summary Executive</i>	Dispendukcapil	dashboard ini berisikan informasi mengenai jumlah penduduk, jenis kelamin, usia, dan persebaran penduduk	<i>Smart governance</i>
25	Aplikasi Leger Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Aplikasi yang dapat memudahkan dalam melakukan leger jalan. Leger (jalan) bermakna	<i>Smart governance</i>



Tahun 2023				
No	Nama Sistem Informasi	PD	Keterangan	Dimensi
			"catatan tentang perkembangan ruas jalan"	
26	DASHBOARD TREND INVESTASI ESS	DMPTSP	Menyajikan data untuk stakeholder penting seperti Bupati mengenai data trend investasi yang ada di Madiun	<i>Smart economy</i>
27	Dashboard DPMPTSP	DPMPTSP	Dashboard pelayanan DPMPTSP	<i>Smart governance</i>
28	LPPD (laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah)	Sekretariat Daerah	(laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah)	<i>Smart governance</i>
29	E-Monitoring Operasi	Satpol PP	Daftar petugas, sasaran operasi, lokasi, keterangan, serta dokumentasi sebelum, ketika, dan setelah penertiban. Juga terdapat grafik untuk menunjukkan tren penertiban, serta peta penertiban yang pernah dilakukan (sebagai referensi untuk penyidikan penertiban selanjutnya).	<i>Smart governance</i>
32	SIM Hasil Monitoring	Dinas Pertanian dan Pangan	Sistem informasi yang mampu untuk menyimpan dan menampilkan	<i>Smart economy</i>

7

Tahun 2023				
No	Nama Sistem Informasi	PD	Keterangan	Dimensi
			hasil dari monitoring di lapangan	
33	SIM Perencanaan Khusus Internal	Dinas Pertanian dan Pangan	Sistem Informasi perencanaan dalam dinas	<i>Smart governance</i>
34	Aplikasi pencarian partisipasi tenaga perempuan di seluruh Madiun	Dinas Sosial	Aplikasi pencarian tenaga perempuan	<i>Smart economy</i>
35	SIM Penjadwalan dan Penugasan	Inspektorat	Untuk memudahkan koordinasi dengan OPD yang lain	<i>Smart governance</i>
36	Aplikasi Perundang-undangan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Mengumpulkan peraturan-peraturan yang berlaku seperti UU, PERMEN, Kebijakan	<i>Smart governance</i>
37	MITS (Madiun Intelegent Traffic Systems)	Dinas Perhubungan	Sistem lampu merah cerdas. Fitur : jika macet di sisi arah kanan maka lampu hijau otomatis lebih lama analisis kemacetan	<i>Smart living</i>
38	SIM Kebakaran	Satpol PP	Pendeteksian adanya potensi kebakaran dengan memanfaatkan sensor panas pada titik rawan kebakaran dan penerimaan secara online (versi website)	<i>Smart living</i>

4.4. Rencana Penguatan Literasi *Smart City* Kota Madiun

Pengertian literasi menurut UNESCO adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi dan menghitung, menggunakan materi cetak dan tulisan yang terkait dengan berbagai bidang. Jenis literasi dibedakan menjadi:

1. Literasi Teknologi
2. Literasi Informasi
3. Literasi Media
4. Literasi Global
5. Literasi Kompetensi Sosial Dan Tanggungjawab.

Selain literasi melalui <https://madiunkota.go.id/>, penguatan literasi *Smart City* dilaksanakan paralel dengan penguatan komponen *Smart City* lainnya, seperti penguatan infrastruktur dan suprastruktur. Penguatan literasi dilaksanakan berkesinambungan melalui *bimtek*, *focus group discussion*, sosialisasi, dan seminar tentang *Smart City*. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* yang terkait. Penguatan literasi *Smart City* sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan aparat tentang pentingnya implementasi *Smart City* agar dapat tersampaikan dengan baik.

4.4.1 Penguatan Literasi Masyarakat

Penguatan literasi masyarakat terhadap *Smart City* dapat dilakukan melalui:

1. Sosialisasi melalui Kelompok Informasi Masyarakat, Forum Komunikasi Kelompok Sosial maupun jaringan informasi lain yang sudah ada.
2. Melakukan kampanye massif melalui produksi konten di media massa, baik online dan offline, serta media sosial tentang gerakan pengembangan *Smart City*, program dan tahapan implementasinya.
3. Membangun sinergi *pentaholic* (akademik, bisnis, pemerintah, media dan komunitas) melalui forum *Smart City*.

4.4.2 Peningkatan Kapasitas SDM Aparat

Peningkatan kapasitas SDM aparat diperlukan bukan hanya untuk meningkatkan literasi *Smart City* di kalangan aparat, tetapi juga untuk menjamin keberhasilan pengembangan dan implementasi *Smart City* di Kota Madiun. Peningkatan kapasitas SDM aparat untuk mendukung *Smart City* dilakukan melalui:

1. Pelatihan pengelolaan operasional situs web OPD
2. Pelatihan pengisian konten situs web OPD



3. Pelatihan pengelolaan data pengaduan (LAPOR dan Form Pengaduan Layanan Masyarakat)
4. Pelatihan PPID
5. Sosialisasi Program Kota Madiun *Smart City*
6. Sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer
7. Sosialisasi Masterplan *Smart City* Kota Madiun
8. Pelatihan operasional dan pemeliharaan jaringan komputer lokal
9. Pelatihan jaringan berbasis teknologi mikrotik, Cisco dan juniper
10. Pelatihan keamanan komputer
11. Pelatihan pemrograman aplikasi berbasis web dan *mobile (android dan IOS)*
12. Pelatihan pengembangan website
13. Pelatihan windows server
14. Pelatihan pengelolaan system database (MySQL, Oracle, dan PostgreSQL)
15. Pelatihan operasional aplikasi-aplikasi yang telah dibangun
16. Pelatihan pengolahan data statistik dan infografis
17. Pelatihan pengelolaan SPSE (penunjang *e-procurement*)

Selanjutnya sosialisasi *Smart City* juga akan berhasil jika dimasukkan sebagai kegunaan dalam bentuk pelayanan untuk masyarakat. Pelayanan secara baik dan cepat melalui konsep *Smart City* akan membawa *Smart City* masuk ke tengah masyarakat dan akan diterima oleh masyarakat secara wajar dan pada akhirnya bisa bermanfaat secara ekonomi kepada masyarakat.

1

BAB V

PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY* KOTA MADIUN

Roadmap Implementasi Program Pembangunan *Smart City*, dimensi yang menjadi fokus utama dalam pembangunan *Smart City* Kota Madiun adalah dimensi *Smart Branding* yaitu bahwa pembangunan *branding* Kota Madiun ini akan bertumpu pada tiga identitas Kota Madiun, yakni:

1. kuliner Pecel;
2. budaya dan olah raga Pencak Silat; dan
3. pusat industri dan pendidikan kereta api nasional.

Kota Madiun yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pelayanan wilayah Jawa Timur bagian barat, menjadi pusat pelayanan bagi kawasan sekitar (eks Karesidenan Madiun. Hal ini didukung akses berupa gerbang tol serta stasiun besar kereta api yang tidak terlalu jauh dari pusat ekonomi kota. Potensi sebagai wilayah yang strategis dan pengembangan potensi lokal diharapkan mampu membuka peluang bisnis bagi investor, khususnya sektor pariwisata, perdagangan dan jasa untuk masuk berinvestasi ke Kota Madiun

Dari potensi-potensi dan peluang tersebut yang disandingkan dengan isu pembangunan *Smart City* maka disepakati *quick win* program pembangunan *Smart City* berupa program pembangunan *Peceland*.

5.1 Quick Win : Peceland

Peceland merupakan kawasan pariwisata yang mengedepankan edukasi tentang kuliner khas, budaya, dan ikon Kota Madiun. Kuliner yang menjadi ciri khas Kota Madiun adalah Pecel.

Kota Madiun juga dikenal sebagai Kota Pendekar dengan adanya 14 (empat belas) perguruan pencak silat yang tersebar diseluruh kota Madiun. Selain itu Kota Madiun juga terdapat industri kereta api terbesar di Asia Tenggara yaitu PT. INKA yang luasnya mencapai 22 hektar. *Peceland* ini akan dikembangkan dengan 3 (tiga) ikon tersebut yaitu: Pecel, Pencak Silat, dan Kereta Api.

Lokasi *Peceland* berada di Jalan Tirtaraya, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo. Lahan yang disiapkan untuk pembangunan *Peceland* adalah sekitar 16 (enam belas) Ha. Pembangunan *Peceland* ini dimulai dengan pelelangan lahan. Setelah lahan telah disepakati, tahap selanjutnya adalah *urban farming* atau penanaman bahan-bahan pembuatan pecel yaitu sayur-sayuran dan bahan-bahan pembuatan sambel kacang.

Selanjutnya dengan pembangunan musium pecel tempo dulu, galeri oleh-oleh, serta sarana yang unik atau *instagramable*, wisata air sungai, transportasi *traincel* untuk berkeliling, dan pembangunan aplikasi e-*Peceland* berbasis android GPS dimana aplikasi ini untuk memudahkan pengunjung mengecek keberadaan posisi pengunjung.

Sesuai dengan slogan "*Green and Farm*" tujuan utama dari *PeceLand* adalah membuat pengunjung interaktif, terdapat miniature produksi sambel pecel dan miniature pabrik gula tebu, di sekelilingnya ada tanaman pelengkap pecel berupa sayur-sayuran yang sedikit berbeda yaitu sayuran toga juga ada tanaman pendukung termasuk kacang tanah dan tebu. Konsepnya pengunjung dapat memilih dan memetik sayur-sayuran serta mengolah atau membuat sambel pecel sesuai keinginan mereka.

Program pembangunan *Peceland* merupakan program pembangunan dalam *roadmap* jangka pendek Tahun 2019-2020 yang kemudian akan dilakukan pengembangan dalam jangka menengah 2019-2023 dan jangka panjang 2020-2028. *Roadmap* pembangunan *Peceland* akan dipaparkan sebagaimana tercantum dalam tabel *roadmap implementasi* pembangunan jangka pendek (*quick win*) Kota Madiun: *Peceland*.



Roadmap Implementasi Pembangunan Jangka Pendek (Quick Win) Kota Madiun: Peceland

Tabel 5.1 Roadmap Implementasi Program Pembangunan Jangka Pendek: Peceland

ID	Program	Tujuan dan Sasaran	Indikator Keberhasilan	Penanggung jawab	Pelaksana	Kerjasama	Pembiayaan	Monev	Timeline	Kode Ref RPJMD	Program RPJMD
QW01	Urban Farming	Penanaman bahan olahan pecel	Banyaknya jenis sayuran bahan pecel	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja dan KUM.	Kecamatan, Kelurahan, BKAD, Bapelitbangda, Dinas Tenaga Kerja dan KUM, Dinkes Pengendalian Penduduk & KB, Bagian Hukum, dan pelaku usaha	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap triwulan (3 bulan)	2019 (Perencanaan) 2020 (Pembangunan) 2021-2028 (Pengembangan)	205(15)	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
QW02	Pengolahan Sambel Pecel : Pembangunan Fisik Rumah Produksi Sambel Pecel Penyiapan Sumber Daya Manusia	Pengenalan variasi proses pembuatan bumbu pecel	Meningkatnya pemahaman masyarakat	Dinas PUTR	Dinas Tenaga Kerja dan KUM, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Disbudparpora	Kecamatan, Kelurahan, BKAD, Bapelitbangda, Dinas Tenaga Kerja dan KUM, Dinkes Pengendalian Penduduk & KB, Bagian Hukum, dan pelaku usaha	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020 (Pembangunan) 2021-2028 (Pengembangan)	216(15)	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya



QW03	Pembangunan Galeri/ Museum Pecel Tempo Doeloe dan Museum Silat	Pengenalan dan edukasi sejarah pecel Madiun	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan branding pecel Kota Madiun semakin luas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Disbudparpora , Dinas PUTR	Kecamatan, Kelurahan, BKAD, Bapelitbangda, Dinas Tenaga Kerja dan KUM, Dinkes Pengendalian Penduduk & KB, Bagian Hukum, dan pelaku usaha	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020 (Pembangunan) 2021-2028 (Pengembangan)	216(15)	ProgramPengelolaan Kekayaan Budaya
QW04	Pembangunan Galeri Oleh-Oleh	Pengenalan kuliner dan kerajinan khas Kota Madiun	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan branding Kota Madiun semakin luas	Dinas Koperasi dan UMKM	Disbudparpor, Dinas Perdagangan	Kecamatan, Kelurahan, BKAD, Bapelitbangda, Dinas Tenaga Kerja dan KUM, Dinkes Pengendalian Penduduk & KB, Bagian Hukum, dan pelaku usaha	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020 (Pembangunan) 2021-2028 (Pengembangan)	216(15)	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
QW05	Pembangunan sarana dan prasana yang <i>instagramable</i>	Meningkatkan antusiasme pengunjung di Kota Madiun	Meningkatnya jumlah pengunjung	Disbudparpora	Dinas PU dan Tata Ruang	Kecamatan, Kelurahan, BKAD, Bapelitbangda, Dinas Tenaga Kerja dan KUM, Dinkes, Pengendalian Penduduk & KB, Bagian Hukum, dan pelaku usaha	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020 (Pembangunan) 2021-2028 (Pengembangan)	302(15)	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata
QW06	Pembangunan	Meningkatka	Meningkatnya	Disbudparp	Dinas	Kecamatan,	APBD dan	Monev	2019 (Perenc	302(15)	Program



	Wisata air/sungai	n antusiasme pengunjung di Kota Madiun	jumlah pengunjung	ora	Lingkungan Hidup, Dinas PU dan Tata Ruang	Kelurahan, BKAD, Bapelitbangda, Dinas Tenaga Kerja dan KUM, Dinkes, Pengendalian Penduduk & KB, Bagian Hukum, dan pelaku usaha	investor	dilakukan setiap bulan	anaan) 2020 (Pembangunan) 2021-2028 (Pengembangan)		Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata
QW07	Pengembangan kebun tebu	Sarana Pembelajaran pengolahan gula merah secara tradisional	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan proses pembuatan gula merah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Lingkungan Hidup, Disbudparpora	Kecamatan, Kelurahan, BKAD, Bapelitbangda, Dinas Tenaga Kerja dan KUM, Dinkes, Pengendalian Penduduk & KB, Bagian Hukum, dan pelaku usaha	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap triwulan (3bulan)	2020-2028	205(15)	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
QW08	Pemanfaatan dan pengolahan sampah organik menjadi kompos	Penguraian sampah organik	Penurunan jumlah sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Disbudparpora	Masyarakat, UKM, Dinkes, Pengendalian Penduduk & KB, kecamatan, kelurahan	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2020-2028	205(18)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
QW09	Traincel (Angkutan Wisata didalam Kawasan	Memudahkan akses keliling PeceLand	Meningkatnya jumlah pengunjung	Dinas Perhubungan	Disbudparpora	Dinas Tenaga Kerja dan KUM, Pelaku usaha	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap triwulan (3bulan)	2019 (Perencanaan) 2020 (Pembangunan) 2021-2028 (Pengembangan)	209(16)	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan



	PeceLand)										
QW10	Aplikasi e-PeceLand	Memudahkan akses pengunjung	Meningkatnya jumlah pengunjung	Dinas Komunikasi dan Informatika	Disbudparpora	Dinas Tenaga Kerja dan KUM, Pelaku usaha	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap triwulan (3bulan)	2019 (Perencanaan) 2020 (Pembangunan) 2021-2028 (Pengembangan)	302(15)	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata



Dari tabel *roadmap* diatas pada akhir tahun 2020 dilakukan identifikasi pencapaian pembangunan *Peceland*. Adapun data identifikasi yang telah dilakukan, didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 5.2. Data Identifikasi Pencapaian Pembangunan *Peceland*

ID	Program Quick Win	Tujuan dan Sasaran	Timeline	OPD	Program/ Kegiatan/ Jenis Kegiatan	Tahun Pelaksanaan							Keterangan	
						2019		2020			2021*			Dst
						Realisasi	Anggaran	Sudah	Belum	Anggaran	Target	Anggaran		
QW1	Urban farming	Penanaman bahan olahan pecel	2019 (perencanaan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/ Kegiatan Peningkatan Produktivitas Pertanian/ Jenis Kegiatan:	-	-							
			2020 (pembangunan)		a. Pengadaan Bibit/Benih Tanaman untuk Alokasi <i>Peceland</i>			√		134.400.000		171.700.000		APBD
			2021-2028 (pengembangan)		b. Upah tenaga kerja pertanian untuk penunjang <i>Peceland</i>				√	20.400.000		85.000.000		APBD-P
					c. Pengadaan Alat pertanian (<i>Cultivator</i>)				√	23.625.000				APBD-P
					d. Pembuatan Tandon Air				√	5.748.000				APBD-P



					e. Pengadaan dan pemasangan instalasi irigasi drip								25.000.000				
				Dinas Lingkungan Hidup													
				Dinas Tenaga Kerja dan KUM													
QW2	Pengolahan sambel pecel:	Pengenalan variasi proses pembuatan bumbu pecel	2019 (perencanaan)	Dinas PUTR	Penyusunan FS Peceland	-	-	on proses	-	500.000.000							
	Pembangunan fisik rumah produksi sambel pecel		2020 (pembangunan)	Dinas Tenaga Kerja dan KUM													
	Penyiapan sumber daya manusia		2021-2028 (pengembangan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian						√							
				Dinas Lingkungan Hidup													
				Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga													Masih dalam tahap koordinasi internal OPD
QW3	Pembangunan Galeri/Museum Pecel Tempo Doeloe dan Museum Silat	Pengenalan dan edukasi sejarah pecel Madiun	2019 (perencanaan)	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah													
			2020 (pembangunan)	Disbudparpora													
			2021-2028 (pengembangan)	Dinas PUTR	Penyusunan FS Peceland	-	-	on proses	-	500.000.000							



					Pelebaran Jl. Tirta Raya (Sebelah API)	√	192.600.000							
					Penyusunan FS <i>Peceland</i>	-	-	on proses	-	500.000.000				
					UKL UPL Peningkatan Jl. Tirta Raya	-	-	on proses	-	49.350.000				
					Pemeliharaan berkala Jl. Paket I (didalamnya ada penyerapan Jl. Tirta Raya)	-	-	on proses	-	4.615.400.000				
					Pembangunan Jalan Tirta Raya (Pintu masuk area <i>Peceland</i>)	-	-	-	-	-	8.000.000.000			
QW06	Pembangunan wisata air/sungai	Meningkatkan antusiasme pengunjung di Kota Madiun	2019 (perencanaan)	Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga										Masih dalam tahap koordinasi internal OPD
			2020 (pembangunan)	Dinas Lingkungan Hidup										
			2021-2028 (pengembangan)	Dinas PU dan Tata Ruang	Penyusunan FS <i>Peceland</i>	-	-	on proses	-	500.000.000				
QW07	Pengembangan kebun tebu	Sarana pembelajaran pengolahan gula merah secara tradisional	2020-2028	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					√					
				Dinas Lingkungan Hidup										
				Dinas Kebudayaan,										Masih dalam tahap



Hasil analisa atas identifikasi capaian tahapan *Quick Win Peceland* sampai dengan tahun 2020, *Peceland* belum mampu menunjukkan capaian sebagaimana yang diharapkan. Dari 10 (sepuluh) *Quick Win* yang direncanakan dapat terlaksana pada Tahun 2020, hanya ada 6 (enam) program yang terlaksana. Dan itupun masih sebatas pada tahapan perencanaan, yakni penyusunan dokumen kajian dan *Grand Design*. Tahapan-tahapan lain yang sudah dilakukan di lokasi *Peceland* dalam bentuk penanaman pohon.

Uraian lebih rinci tahapan-tahapan yang sudah dilakukan tercantum dalam tabel capaian program *quick win smart city* Kawasan *peceland*.

Tabel 5.3.
Capaian Program Quick Win Smart City Kawasan Peceland

NO	PROGRAM SMART CITY	PROGRAM RPJMD	PD Penanggung jawab	PD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	<i>Urban Farming</i>	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja dan KUM.	sampai dengan tahap penanaman
2	Pengolahan Sambel Pecel : Pembangunan Fisik Rumah Produksi Sambel Pecel Penyiapan Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas PUTR	Dinas Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Disbudparpora	belum terlaksana. Pembangunan Fisik baru tahapan FS <i>Peceland</i>
3	Pembangunan Galeri/ Museum Pecel Tempo Doeloe dan Museum Silat	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Disbudparpora, Dinas PUTR	belum terlaksana. Pembangunan Fisik baru tahapan FS <i>Peceland</i>
4	Pembangunan Galeri Oleh-Oleh	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Tenaga Kerja dan KUM.	Disbudparpora, Dinas Perdagangan	belum terlaksana. Pembangunan Fisik baru tahapan FS <i>Peceland</i>
5	Pembangunan sarana dan prasana yang <i>instagramable</i>	Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas PU dan Tata Ruang, Bapelitbangda	sampai dengan tahap perencanaan berupa Kajian dan FS <i>Peceland</i>
6	Pembangunan wisata air/sungai	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR.	belum terlaksana. Pembangunan Fisik baru tahapan FS <i>Peceland</i>
7	Pengembangan kebun tebu	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Lingkungan Hidup, Disbudparpora	belum terlaksana

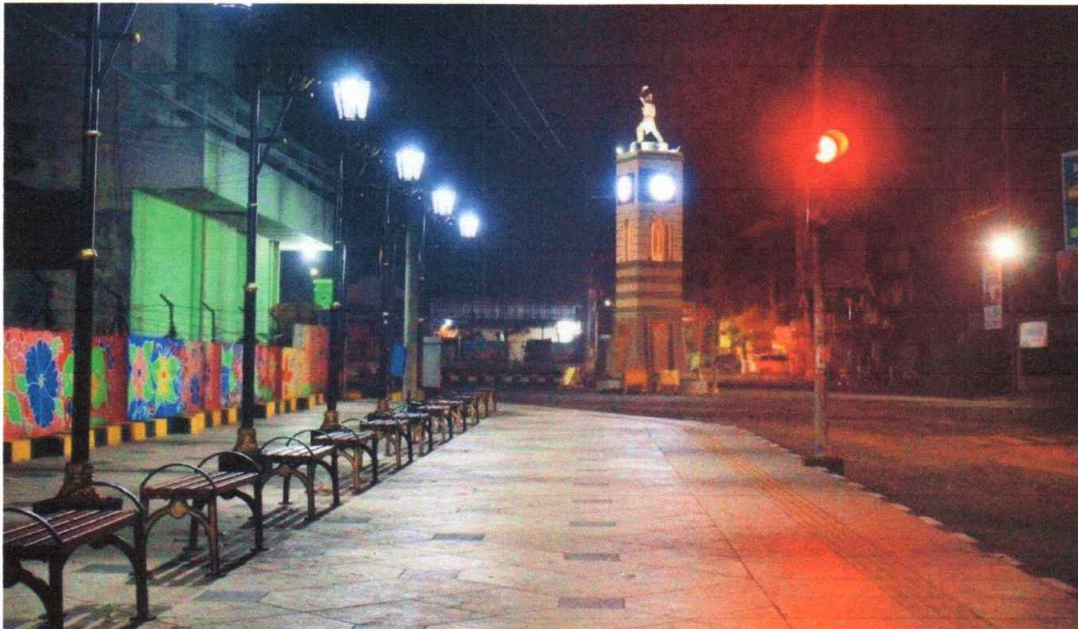


8	Pemanfaatan dan pengolahan sampah organik menjadi kompos	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Disbudparpora	belum terlaksana
9	<i>Traincel</i> (Angkutan Wisata didalam Kawasan PeceLand)	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan	Disbudparpora	belum terlaksana
10	Aplikasi <i>e-PeceLand</i>	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	Dinas Komunikasi dan Informatika	Disbudparpora	belum terlaksana

Pandemi *Covid-19* menyebabkan adanya realokasi dan *refocusing* program dan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Madiun sebesar Rp.147.165.988.148,- (seratus empat puluh tujuh milyar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dari 241 (dua ratus empat puluh satu) kegiatan pada belanja rutin maupun prioritas yang beralih ke Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai cadangan anggaran yang sewaktu-waktu bisa didayagunakan dalam penanggulangan *Covid-19* di Kota Madiun. Pengalihan anggaran ini berdampak pada program dan kegiatan tidak berjalan optimal.

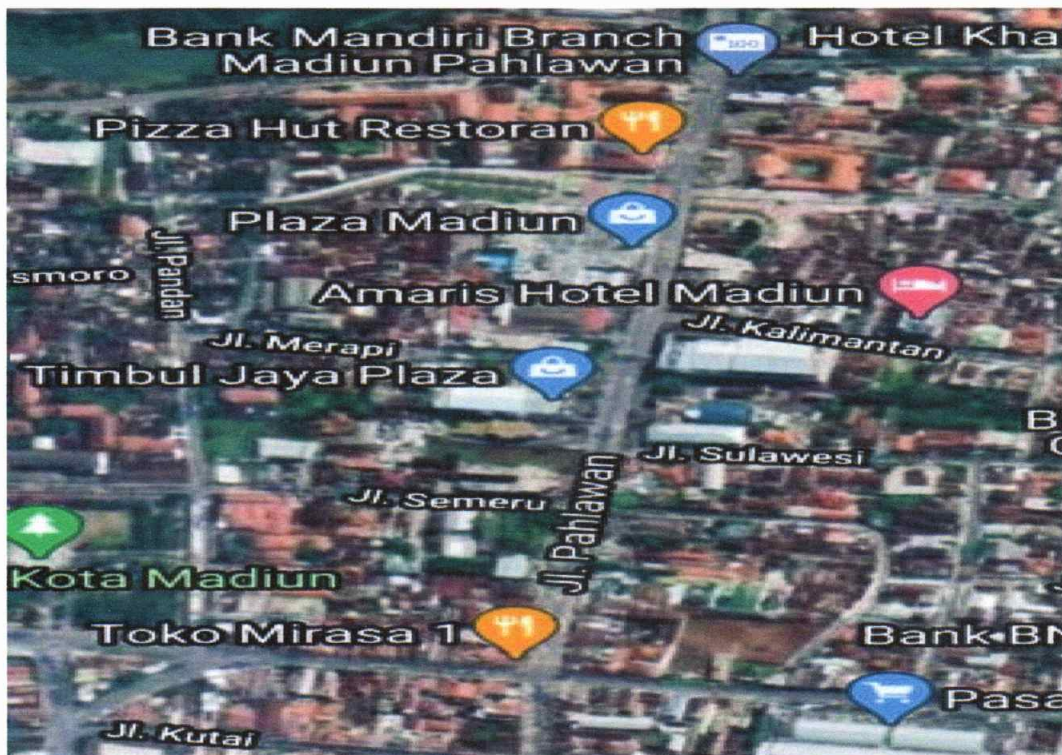
Namun demikian, kebijakan Pemerintah Daerah Kota Madiun selain penyediaan BTT untuk *covid-19*, belanja kegiatan yang bersifat pengungkit perekonomian di Kota Madiun masih tetap dilaksanakan. Hal ini tampak dari tetap berjalannya penataan Kawasan di simpang lima patung pendekar/proliman Diponegoro dan Kawasan *Pahlawan Street Center* (PSC).

Simpang lima patung pendekar/Proliman Diponegoro ditandai dengan berdirinya Tugu Pendekar sebagai *landmark* Kota Madiun sekaligus identitas Kota Madiun sebagai Kota Pendekar pada tahun 2019. Tahun 2020 di Kawasan tersebut dilakukan penataan berupa zona pedestrian dan Pusat Jajanan Serba Ada (pujasera) dan kuliner khas yang *instagramable* (sisi timur Jalan Diponegoro dan Jalan Rimba Dharma). Memanfaatkan saluran primer yang dilakukan penutupan dengan *box culvert* diharapkan penataan kawasan ini akan mampu menampilkan pusat jajanan serta kuliner khas Kota Madiun di sisi timur Kota Madiun. Gambar dari area *Pahlawan Street Center* (PSC) ini adalah sebagai berikut.



Gambar Tugu Pendekar dan Pedestrian Proliman

Sedangkan Kawasan Jalan Pahlawan yang saat ini dikenal sebagai *Pahlawan Street Centre (PSC)* adalah kawasan perdagangan dan jasa yang direncanakan sebagai wisata kota dan wisata belanja. Kawasan *PSC* dapat dilihat dari gambar berikut :



Gambar Jalan Pahlawan

↗



Gambar Balaikota di area *PSC* pada malam hari

Berdasarkan pertimbangan dipancangkan sebagai berikut:

1. pelaksanaan *Peceland* sebagai *quick win* belum optimal;
2. pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan realokasi dan *refocusing* anggaran, yang berdampak pada pelaksanaan rencana program kegiatan yang telah direncanakan; dan
3. penataan kawasan wisata dan bisnis di Kawasan *pahlawan street centre (PSC)* yang sudah terlaksana

maka Tim *Smart City* Kota Madiun mengambil kesepakatan untuk mengalihkan *locus Quick Win Smart City* Kota Madiun dari Kawasan wisata *Peceland* ke Kawasan *Pahlawan Street Center (PSC)* Jalan Pahlawan.

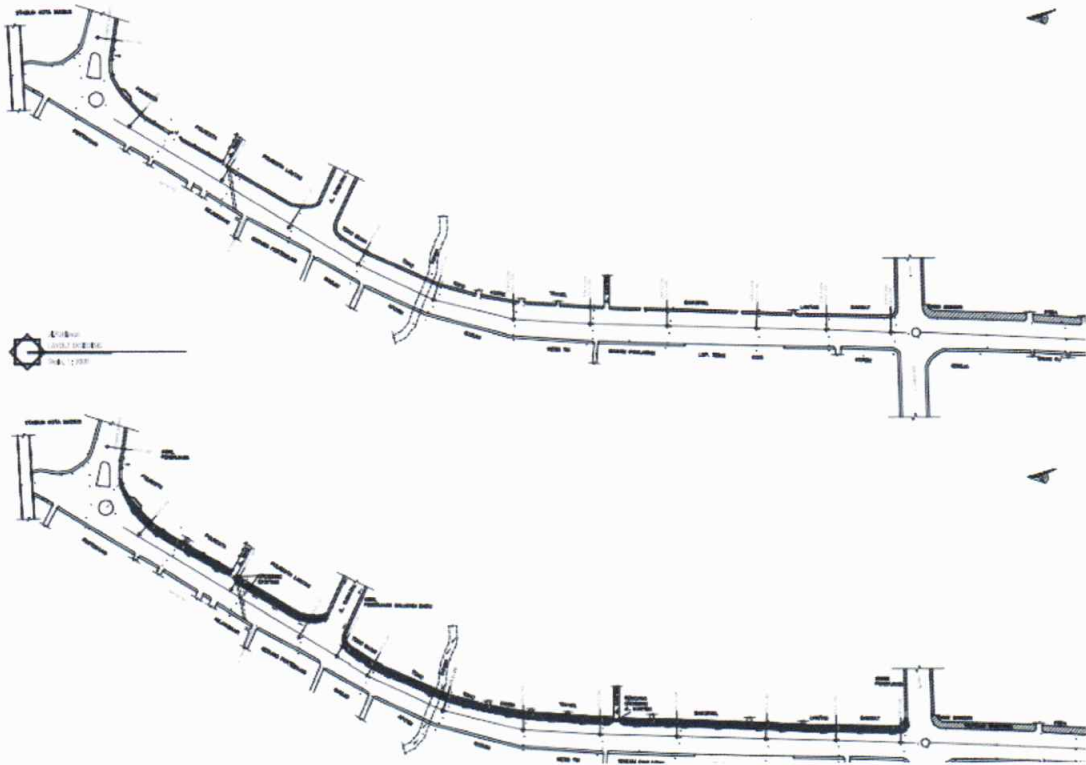
2. *Pahlawan Street Center (PSC)* Sebagai *Locus Baru Quick Win Smart City* Kota Madiun

Kawasan *Pahlawan Street Centre (PSC)* dipilih sebagai *Quick Win* dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

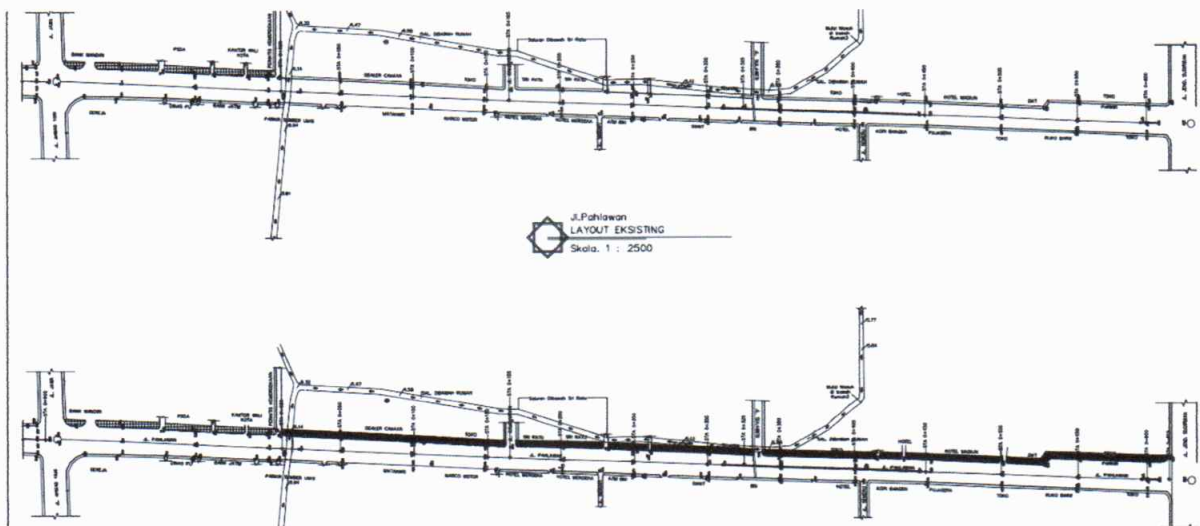
1. merupakan kawasan yang direncanakan sebagai wisata kota dan wisata belanja. Rencana tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW;
2. merupakan kawasan yang pemanfaatannya sebagai pusat perbelanjaan, perbankan, dan perkantoran pemerintahan/TNI/Polri/Swasta dengan bentuk bangunan kolonial dan bangunan modern;
3. kemudahan untuk mengakses dan ketersediaan fasilitas transportasi massal (stasiun kereta api);
4. *Pahlawan Street Center (PSC)* telah menjadi ikon baru dari Kota Madiun.



Pada awal Tahun 2019, Jalan Pahlawan menjadi Kawasan *Car Free Day (CFD)* yang mampu menjadi pembangkit perekonomian. Tahun 2019 menjadi awal dari penataan pada kawasan tersebut yang direncanakan menjadi pusat wisata dan *landmark*.



Gambar Rencana Pedestrian *Pahlawan Street Centre (PSC)* Sisi Utara



Gambar Pedestrian *Pahlawan Street Centre (PSC)* Sisi Selatan

✓

Pembangunan *Pahlawan Street Center (PSC)* dimulai pada tahun 2019 dengan tahapan perencanaan pedestrian dan prasarana pendukungnya (Sumber Umis dan Sumber Wangi). Tahap selanjutnya dilakukan pembangunan yang dimulai dari perempatan Jalan Jawa sampai dengan Jalan Panglima Sudirman. Tahun 2020 pembangunan dilanjutkan dengan pembangunan pedestrian mulai dari Pertigaan Jalan Kopol Sunaryo (sisi barat stasiun Kereta Api Madiun) sampai perempatan Jalan Jawa.

Penataan kawasan pada saluran Sumber Umis dilaksanakan pada tahun 2019 dengan fokus penataannya dari sisi Jalan Perintis Kemerdekaan sampai Jalan Pandan. Tahun 2020 dilanjutkan dengan penataan Saluran Sumber Umis di Jalan Perintis Kemerdekaan. Peningkatan kualitas Kawasan PSC dengan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana dilakukan pada tahun 2019 dan 2020. Bentuk pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana tersebut diantaranya penanaman pohon, bis wisata, *speedtable*, marka, rambu penunjuk arah, jalur sepeda, penataan unsur-unsur *landscape* seperti lampu penerangan, lampu hias, Patung Merlion, miniatur Ka'bah, gazebo, kursi taman, toilet, penyediaan akses *wi-fi*, tempat sampah dan lainnya.

Penyediaan prasarana tersebut diharapkan akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung di *PSC*. Sebagai upaya untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pengunjung di *PSC*, dilakukan pemecahan arus kendaraan dengan rekayasa lalu lintas yang melintas ke *PSC*. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban kinerja ruas Jalan Pahlawan. Selain itu, kehadiran personil pendukung seperti Satuan Polisi Pamong Praja, tenaga kesehatan, tenaga kebersihan akan semakin memberikan kenyamanan bagi pengunjung.

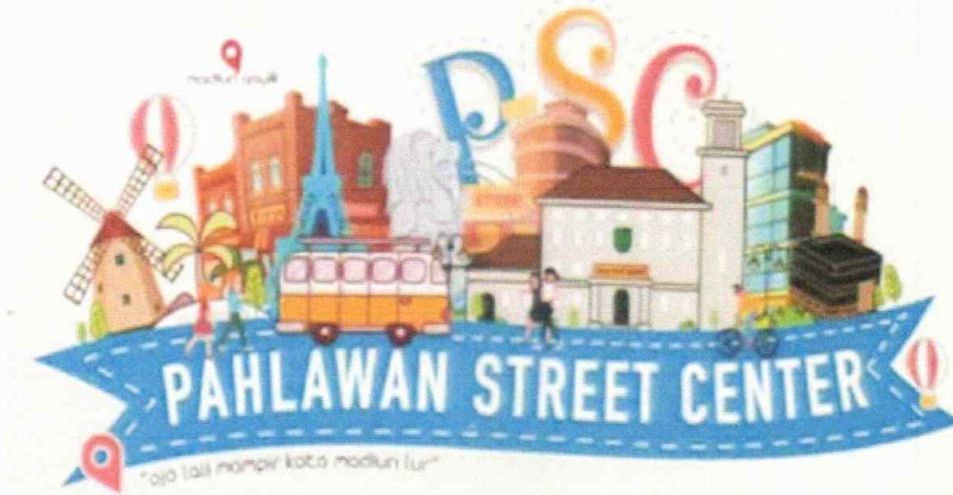
PSC yang merupakan destinasi wisata baru di Kota Madiun akan terus dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya. Rencana yang akan dilaksanakan untuk pengembangan *PSC* adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.
Rencana Pengembangan PSC

No.	Rencana Pengembangan PSC	Keterangan
1	Penyediaan amenitas yang mendukung PSC sebagai destinasi wisata	Penyediaan kantong parkir di Jalan Jawa dan Jalan Pahlawan
2	Pembangunan ikon-ikon wisata dunia di Kawasan sumber umis	Berupa miniature Menara Eiffel Perancis, Jam Bigben Inggris, dan Kincir Angin Belanda.
3	Pasar seni	



4	Stand wisata berbentuk gerobak	Menyediakan souvenir, sambel pecel, nasi pecel, dan produk-produk UMKM Kota Madiun
5	pembangunan wisata air di saluran sumber umis	Berupa sungai buatan



Gambar Branding Pahlawan Street Center (PSC)

Secara ringkas jenis kegiatan dari lintas perangkat daerah yang bersinergi mewujudkan PSC sebagai *quick win* dari *Smart City* adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.
Jenis Kegiatan di PSC

No	Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Uraian	Keterangan
1	Dinas PU dan Tata Ruang	1. Program Pembangunan Saluran Drainase Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase	
		Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Saluran Sumber Umis	
		2. Program Pengendalian banjir	
		Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong2	Paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Sumber Umis dan infrastruktur penunjang yang <i>instagramable</i>
		3. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
		Pemeliharaan berkala jalan	
		Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan Pahlawan	paket kegiatan perencanaan pedestrian di Jl.Pahlawan
Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan Pahlawan			

		Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan Pahlawan (trotoar)	pembangunan pedestrian di sepanjang Jalan Pahlawan beserta infrastruktur pendukung seperti : kursi, payung
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Infrastruktur Penunjang Di <i>Pahlawan Street Center</i> Dan Sumber Umis	
		Bibit pohon	Sepanjang pedestrian dan pinggir jalan pahlawan
		Bibit tanaman hias	Sepanjang pedestrian dan Planter median jalan pahlawan Sumber Umis
		Kursi klasik	Sepanjang pedestrian dan Planter median jalan pahlawan Sumber Umis
		Planter	Sepanjang pedestrian Jl. Pahlawan
		Bahan baku bangunan	
		Dekorasi kota	
		Lampion	Jl. Pahlawan (Lampion Tunggal), Rumah Dinas Walikota dan Sumber Umis
		Tiang Lampion	Jl. Pahlawan (Lampion Tunggal), Rumah Dinas Walikota dan Sumber Umis
		Tiang Lampu Klasik	Sepanjang pedestrian Jl. Pahlawan
		<i>Traffic Light</i> Klasik	Perempatan Tugu
		Pot bunga	Sepanjang pedestrian Jl. Pahlawan
Lampu PJU LED 65 Watt (<i>Bolard</i>)	Sepanjang Jl. Pahlawan		
3	Dinas Perhubungan	Pengadaan Marka Jalan	
		Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Bus wisata
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu lintas	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	
4	Dinas Kominfo	Layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra pemda	pemasangan akses <i>free wifi</i> di PSC
5	Dinas Kesehatan KB dan Pengendalian Penduduk	Kegiatan Pembinaan Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional, Dasar dan Rujukan untuk yg P3k	posko kesehatan di PSC
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu	



6	Dinas Kebudayaan, Parpora	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya	fasilitasi pertunjukan seni budaya di <i>Car Free Day</i> Jl. Pahlawan (sebelum menjadi <i>PSC</i>)
		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya	Festival Silat, Festival Pecel dsb
			Becak wisata khas Madiun
7	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	pengadaan troli dorong, bahan kain seragam dan barang dagangan, untuk pemanfaatannya akan diserahkan kepada UMKM / PKL yang berjualan di area Sumber Umis, Sumber Wangi, <i>Pahlawan Street Center</i>
		Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima	
8	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan sampah di <i>PSC</i>	terdapat 3 (tiga) <i>shift</i> pembersihan di kawasan Jl.Pahlawan
			khusus <i>PSC</i> disediakan tenaga yang stand by di lokasi dan penambahan frekuensi pembersihan sampah
			Penyediaan tempat sampah (bin) dari kayu yang unik dengan motif/ bentuk berkonsep <i>PSC</i>
			Pengadaan smart bin dan mobil <i>Road Sweeper</i>
9	Satpol PP	1. Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	
		Kegiatan Penertiban dan Evaluasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Mendukung kegiatan pengamanan dan penertiban di <i>PSC</i> dengan personil anggota Regu Praja Wibawa 24 jam / 3 shift, masing2 shift 4 orang
		Kegiatan Pengamanan Kegiatan Pemerintah	Mendukung kegiatan pengamanan dan penertiban di <i>PSC</i> dengan personil anggota Petugas Tindak Internal (PTI) 2 (dua) orang dan Patwal Patroli 6 (enam) orang
		2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	
		Kegiatan Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat	Mendukung kegiatan pengamanan dan penertiban di <i>PSC</i> dengan personil anggota Upahan Linmas 10 (sepuluh) orang sebagai Pendekar Waras
		3. Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan bahaya Kebakaran	
		Kegiatan Pencegahan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran	Mendukung kegiatan pengamanan dan penertiban di <i>PSC</i> dengan personil anggota Relawan Kebakaran 6 (enam) orang
		Kegiatan Operasi dan Evaluasi Penanggulangan Pemadam Kebakaran	
		4. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Mendukung kegiatan pengamanan dan penertiban di PSC dengan personil anggota Upahan Linmas 28 (dua puluh delapan) orang sebagai Pendekar Waras
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Mendukung kegiatan pengamanan dan penertiban di PSC dengan personil anggota Regu Praja Wibawa 24 (dua puluh empat) jam / 3 (tiga) shift, masing-masing shift 4 (empat) orang.

Uraian lebih rinci dalam rangka mewujudkan *Pahlawan Street Centre* (PSC) sebagai *Quick Win Smart City* Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.6.
Rencana Program *Quick Win Smart City* : *Pahlawan Street Center*

No	Kegiatan Pengembangan di PSC		Dimensi Smart	Program RPJMD	Perangkat Daerah
	Telah Dilaksanakan	Rencana			
1	2	3	4	5	6
1	wisata kuliner (modern dan tradisional)		<i>Smart Economy</i>	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Madiun
2	Gerobak Perdagangan (lapak UMKM tradisional dan modern)	galeri ekonomi kreatif	<i>Smart Economy</i>	Program Pengembangan UMKM	Dinas Tenaga Kerja Dan KUM
3	ATM	Galeri untuk top up pembayaran elektronik (Link Aja, OVO, Gopay, Shopeepay, dll)	<i>Smart Economy</i>	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Madiun
4		<i>Urban Farming</i>	<i>Smart Economy</i>	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Madiun
5	Festival Pecel dan Lomba Cipta Menu serta even budaya dan pemuda		<i>Smart Branding</i>	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Madiun
6	- Pertunjukan seni bela diri Pencak Silat - Becak wisata khas Kota Madiun Wisata sepeda - Parade Senja		<i>Smart Branding</i>	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Madiun
7	Icon 6 (enam) negara Pembangunan pedestrian di Jl.Pahlawan Pembangunan Saluran Sumber Umis	Infrastruktur arung jeram/Tubing	<i>Smart Branding</i>	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun

8		Virtual Museum	Smart Branding	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Madiun
9	- Galeri Ekonomi Kreatif (galeri 6 negara) Pembangunan Kawasan wisata yang <i>instagramable</i>		Smart Branding	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Madiun
10	- Cowork space			Program Pengembangan UMKM	Dinas Tenaga Kerja Dan KUM
11	- Pengadaan troli bahan kain seragam dan barang dagangan	Penyediaan penjual pecel aneka menu/ varian	Smart Branding	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan
12	Taman Sumber Umis dan Sumber Wangi		Smart Branding	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Madiun
13	Outdoor Learning Center		Smart Society	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
14	Tempat Bermain Anak		Smart Society	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Madiun
15		Videotron	Smart Society	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Madiun
16	- Panggung Terbuka untuk pemuda - Parade senja		Smart Society	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Madiun
17	Anjungan Dokumen Mandiri		Smart Governance	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun
18		Pos Kesehatan	Smart Governance	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Madiun
19	Hotline 112		Smart Governance	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Madiun
20	Pengamanan dan penertiban di PSC yang melibatkan unsur : Regu Praja Wibawa, PTI, Patwal Patroli, Linmas, Pendekar Waras, Pemadam Kebakaran	Pendekar menjadi <i>security</i> ; Pos Keamanan Pendekar dan Petugas Keamanan berbaju pendekar	Smart Living	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun
21	Halte bis Mabour, Tempat Parkir Sepeda, Tempat Parkir kendaraan		Smart Living	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
22	Transportasi wisata berupa bis wisata				
23	Pemetaan Rute Bus Mabour, Pemetaan Rute Sepeda Wisata	, Persewaan Sepeda / paket wisata sepeda	Smart Living	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Madiun
24	Penanaman Pohon berbunga		Smart Living	Program Peningkatan Prasarana, Sarana	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

				Dan Utilitas Umum (Psu)	Permukiman Kota Madiun
25		<i>Humidifier</i> (alat pelembap udara)	<i>Smart Environment</i>	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
26	Penyediaan Tempat sampah terpilah	<i>Smart Bin, Road Sweeper</i>	<i>Smart Environment</i>	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
27		Petugas Kebersihan berbaju pendekar	<i>Smart Environment</i>		Dinas Lingkungan Hidup



Roadmap Pembangunan Program Smart Governance

Jangka Menengah dan Jangka Panjang akan diuraikan pada tabel dibawah ini

Tabel 5.7.

Roadmap Implementasi Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Smart Governance

Master Plan Perwal 32/2020		ID	Review Master Plan Berbasis P-RPJMD					Pelaksana	Kerjasama	Anggaran							Capaian Kinerja Program						Pembayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline
Program Smart City	Indikator Smart City		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Keberhasilan			2019	2020	2021	2022	2023	2024 - 2028	Thn ke 1	Thn ke 2	Thn ke 3	Thn ke 4	Thn ke 5	Thn ke 6-10				
																						23			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	Standart Pelayanan Minimal (SPM)		Pendidikan Dasar							24.000.000.000	24.000.000.000														
		Gov1S1P1	Pengelolaan Pendidikan	Gov1S1P1A.1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Gov1S1P1A.1 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	SD di Wilayah Kota Madiun			13.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	50.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pembangunan)	
					Gov1S1P1A.2 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	SD di Wilayah Kota Madiun			500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pembangunan)	
					Gov1S1P1A.3 Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	SD di Wilayah Kota Madiun			500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pembangunan)	



				Gov1S1P1 A.4 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	SD di Wilayah Kota Madiun		600.000.000	700.000.000	750.000.000	3.500.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
				Gov1S1P1B. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	SMP di Wilayah Kota Madiun		10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	50.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan						6.200.000.000	6.200.000.000												
	Gov2S1P1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Gov2S1P1A. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Gov2S1P1A.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3 Kecamatan, 27 Kelurahan, Masyarakat		250.000.000	450.000.000	500.000.000	2.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
				Gov2S1P1A.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3 Kecamatan, 27 Kelurahan, Masyarakat		60.000.000	60.000.000	60.000.000	300.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)



					Gov2SIP1 A.3 Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Meningk atnya Akses dan Mutu Pelayana n Kesehata n	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Dinas Kesehat an, Pengend alian Pendud uk dan Keluarg a Berenca na	3 Kecama tan, 27 Kelurah an, Masyar akat			75.000.0 00	75.000.0 00	75.000.0 00	400.000. 000	8 0 %	8 5 %	9 0 %	9 5 %	10 0%	10 0%	APBD	Monev dilaku kan setiap bulan	2019 (Perenca naan) 2020- 2028 (Pengem bangan)
					Gov2SIP1 A.4 Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Balita	Meningk atnya Akses dan Mutu Pelayana n Kesehata n	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Dinas Kesehat an, Pengend alian Pendud uk dan Keluarg a Berenca na	3 Kecama tan, 27 Kelurah an, Masyar akat			30.000.0 00	200.000. 000	20.000.0 00	500.000. 000	8 0 %	8 5 %	9 0 %	9 5 %	10 0%	10 0%	APBD	Monev dilaku kan setiap bulan	2019 (Perenca naan) 2020- 2028 (Pengem bangan)
					Gov2SIP1 A.5 Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidika n Dasar	Meningk atnya Akses dan Mutu Pelayana n Kesehata n	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Dinas Kesehat an, Pengend alian Pendud uk dan Keluarg a Berenca na	3 Kecama tan, 27 Kelurah an, Masyar akat			10.000.0 00	80.000.0 00	80.000.0 00	200.000. 000	8 0 %	8 5 %	9 0 %	9 5 %	10 0%	10 0%	APBD	Monev dilaku kan setiap bulan	2019 (Perenca naan) 2020- 2028 (Pengem bangan)
					Gov2SIP1 A.6 Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Meningk atnya Akses dan Mutu Pelayana n Kesehata n	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Dinas Kesehat an, Pengend alian Pendud uk dan Keluarg a Berenca na	3 Kecama tan, 27 Kelurah an, Masyar akat			125.000. 000	220.000. 000	220.000. 000	1.000.00 0.000	8 0 %	8 5 %	9 0 %	9 5 %	10 0%	10 0%	APBD	Monev dilaku kan setiap bulan	2019 (Perenca naan) 2020- 2028 (Pengem bangan)
					Gov2SIP1 A.7 Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Meningk atnya Akses dan Mutu Pelayana n Kesehata n	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Dinas Kesehat an, Pengend alian Pendud uk dan Keluarg a Berenca na	3 Kecama tan, 27 Kelurah an, Masyar akat			10.000.0 00	10.000.0 00	10.000.0 00	50.000.0 00	8 0 %	8 5 %	9 0 %	9 5 %	10 0%	10 0%	APBD	Monev dilaku kan setiap bulan	2019 (Perenca naan) 2020- 2028 (Pengem bangan)

					Gov2SIP1 A.8 Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Meningk atnya Akses dan Mutu Pelayana n Kesehata n	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Dinas Kesehat an, Pengend alian Pendud uk dan Keluarg a Berenca na	3 Kecama tan, 27 Kelurah an, Masyar akat			4.000.00 0	9.000.00 0	9.000.00 0	50.000.0 00	8 0 %	8 5 %	9 0 %	9 5 %	10 0%	10 0%	APBD	Monev dilaku kan setiap bulan	2019 (Perenca naan) 2020- 2028 (Pengem bangan)
					Gov2SIP1 A.9 Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Meningk atnya Akses dan Mutu Pelayana n Kesehata n	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Dinas Kesehat an, Pengend alian Pendud uk dan Keluarg a Berenca na	3 Kecama tan, 27 Kelurah an, Masyar akat			4.000.00 0	30.000.0 00	30.000.0 00	150.000. 000	8 0 %	8 5 %	9 0 %	9 5 %	10 0%	10 0%	APBD	Monev dilaku kan setiap bulan	2019 (Perenca naan) 2020- 2028 (Pengem bangan)
					Gov2SIP1 A.10 Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Meningk atnya Akses dan Mutu Pelayana n Kesehata n	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Dinas Kesehat an, Pengend alian Pendud uk dan Keluarg a Berenca na	3 Kecama tan, 27 Kelurah an, Masyar akat			40.000.0 00	170.000. 000	170.000. 000	750.000. 000	8 0 %	8 5 %	9 0 %	9 5 %	10 0%	10 0%	APBD	Monev dilaku kan setiap bulan	2019 (Perenca naan) 2020- 2028 (Pengem bangan)
					Gov2SIP1 A.11 Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulo sis	Meningk atnya Akses dan Mutu Pelayana n Kesehata n	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Dinas Kesehat an, Pengend alian Pendud uk dan Keluarg a Berenca na	3 Kecama tan, 27 Kelurah an, Masyar akat			20.000.0 00	220.000. 000	20.000.0 00	1.000.00 0.000	8 0 %	8 5 %	9 0 %	9 5 %	10 0%	10 0%	APBD	Monev dilaku kan setiap bulan	2019 (Perenca naan) 2020- 2028 (Pengem bangan)
					Gov2SIP1 A.12 Pengelolaa n Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Meningk atnya Akses dan Mutu Pelayana n Kesehata n	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Dinas Kesehat an, Pengend alian Pendud uk dan Keluarg a Berenca na	3 Kecama tan, 27 Kelurah an, Masyar akat			150.000. 000	325.000. 000	325.000. 000	1.500.00 0.000	8 0 %	8 5 %	9 0 %	9 5 %	10 0%	10 0%	APBD	Monev dilaku kan setiap bulan	2019 (Perenca naan) 2020- 2028 (Pengem bangan)



					Gov2S1P1 A.13 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3 Kecamatan, 27 Kelurahan, Masyarakat		5.500.000 0.000	2.200.000 0.000	2.200.000 0.000	25.000.000 0.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020- 2028 (Pengembangan)
			Lingkungan Sehat Perumahan							2.800.000 0.000	2.800.000 0.000												
		Gov3S1P1	Kawasan Permukiman	Gov3S1P1A.1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	Gov3S1P1A.1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Prosentase Kawasan Permukiman yang tidak Kumuh	Dinas Perkim	DPU, Bapelitbangda, 3 Kecamatan, 27 Kelurahan, Masyarakat		2.800.000 0.000	2.800.000 0.000	2.800.000 0.000	10.000.000 0.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD, CSR	Monev dilakukan setiap tribulan (3 bulan)	2019 (Perencanaan) 2020 (Pembangunan) 2021- 2028 (Pengembangan)
			Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat							1.500.000 0.000	1.500.000 0.000												



		Gov4S1P1	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Gov4S1P1A. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Gov4S1P1A.1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelegen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Konflik Horizontal di dalam Masyarakat	Kesbangpol	3 Kecamatan, 27 Kelurahan, Masyarakat		1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	6.000.000.000	75%	80%	85%	90%	95%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
			Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat				1.700.000.000			1.700.000.000													



		Gov5S IP1	Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Gov5S1P 1A. Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Gov5S1P1 A.1 s/d 5 5 Sub Kegiatan	Meningkatnya Penegakan Hukum Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat, Penegakan Peraturan PerUndang- Undangan Daerah dan Peraturan Walikota Serta Peraturan PerUndang- Undangan Lainnya	Prosentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketertarikan, Keindahan) yang Diselesaikan	Satpol PP	3 Kecamatan, 27 Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Masyarakat		1.700.00 0.000	3.600.00 0.000	4.500.00 0.000	6.000.00 0.000	7 5 %	8 0 %	8 5 %	9 0 %	95 %	10 0%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020- 2028 (Pengembangan)
			Pelayanan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial							4.000.00 0.000	4.000.00 0.000												
		Gov6S IP1	Pemberdayaan Sosial	Gov6S1P 1A. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Gov6S1P1 A.1 s/d 4 4 Sub Kegiatan	Meningkatnya PMKS yang dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar Minimal	Prosentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPS, Dinas Perdagangan, Masyarakat,		2.200.00 0.000	3.500.00 0.000	3.500.00 0.000	10.000.0 00.000	8 0 %	8 5 %	9 0 %	9 5 %	10 0%	10 0%	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020- 2028 (Pengembangan)



		Gov6S1P2	Rehabilitasi Sosial	Gov6S1P2A. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Gov6S1P2A.1 s/d 77 Sub Kegiatan	Meningkatkannya PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan Dasar Minimal	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan			1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	5.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
				Gov6S1P2B. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Gov6S1P2B.1 s/d 55 Sub Kegiatan	Meningkatkannya PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan Dasar Minimal	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan			240.000.000	400.000.000	400.000.000	2.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
		Gov6S1P3	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Gov6S1P3A. Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Gov6S1P3A.1 s/d 33 Sub Kegiatan	Meningkatkannya PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan Dasar Minimal	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan			7.500.000	7.500.000	7.500.000	40.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
				Gov6S1P3B. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Gov6S1P3B.1 s/d 44 Sub Kegiatan	Meningkatkannya PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan Dasar Minimal	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan			8.900.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	40.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)

		Gov6S1P4	Penanganan Bencana	Gov6S1P4A. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Gov6S1P41 s/d 2 2 Sub Kegiatan	Meningkatnya PMKS yang dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar Minimal	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPBD, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan		300.000.000	500.000.000	500.000.000	2.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
		Gov7S1P1	Penanggulangan Bencana	Gov7S1P1A. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Gov7S1P1A. 1 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terwujudnya Peningkatan Responsifitas Dalam Menangani Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	BPBD	Satpol PP, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Kelurahan		95.000.000	95.000.000	95.000.000	400.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
				Gov7S1P1B. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gov7S1P1B. 1 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			BPBD	Satpol PP, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Kelurahan		100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD dan investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
Pembangunan Sarana Layanan Publik	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan							2.800.000.000	2.500.000.000												



		Gov8S1P1	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Gov8S1P1A. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan	Gov8S1P1A.1 s/d 2 Sub Kegiatan	Meningkatnya Prosentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Akurasi Database Kependudukan	Dinas Kependudukan & Capil	Masyarakat			350.000.000	350.000.000	350.000.000	1.500.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
		Gov8S1P2	Pencatatan Sipil	Gov8S1P2A. Pelayanan Pencatatan Sipil	Gov8S1P2A.1 s/d 2 Sub Kegiatan	Meningkatnya Prosentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Prosentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan & Capil	Masyarakat			550.000.000	400.000.000	400.000.000	2.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
		Gov8S1P3	Pendaftaran Penduduk	Gov8S1P3A. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Gov8S1P3A.1 s/d 2 Sub Kegiatan	Meningkatnya Prosentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Prosentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Dinas Kependudukan & Capil	Masyarakat			220.000.000	230.000.000	250.000.000	1000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
Pembangunan Sarana Layanan Publik	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Peningkatan Ketatausahaan Perangkat Daerah Dan Pelayanan Publik							500.000.000	500.000.000													



		Gov9S1P1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Gov9S1P1A. Penataan Organisasi	Gov9S1P1A.1 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Bagian Organisasi	Semua OPD		670.000.000	750.000.000	750.000.000	3.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
Efisiensi Kebutuhan Sarana	Jumlah Layanan Publik yang Menerapkan Paperless		Penyediaan, Peningkatan SDM, Dan Layanan Arsip Daerah							200.000.000	200.000.000												
		Gov10S1P1	Pengelolaan Arsip	Gov10S1P1A. Pengelola Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Gov9S1P1A.1 Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Daerah	Meningkatnya Tertib Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Semua OPD		200.000.000	340.000.000	340.000.000	1.500.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
Efisiensi Kebutuhan Sarana	Jumlah Layanan Publik yang Menerapkan Paperless		Pengelolaan Aplikasi Informatika							550.000.000	550.000.000												



		Gov11 SIP1	Aplikasi Informatika	Gov11S1 P1A. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Gov11S1P 1A.1 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan secara Elektronik	Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	Semua OPD			460.000.000	460.000.000	460.000.000	2.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
					Gov11S1P 1A.2 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan secara Elektronik	Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	Semua OPD	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.500.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
Penguatan Layanan	Prosentase Permintaan Layanan Publik Dan SDM Layanan	Gov12 SIP1	Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik	Gov12S1 P1A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan	Gov12S1P 1A.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kecamatan	Semua OPD, Kelurahan, Masyarakat	20.000.000.000	20.000.000.000	22.700.000.000	22.700.000.000	22.700.000.000	100.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)



			Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Penurunan Kasus-Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	DPMPTSP, DLH, Dinas Perkim, DPUTR	1.000.000.000	1.200.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	7.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
Keterbukaan Informasi Publik	Prosentase Jumlah Website Informasi Publik		Pengembangan Komunikasi Dan Media Massa							285.000.000	285.000.000													
		Gov13 SIP1	Informasi dan Komunikasi Publik	Gov13S1 P1A. Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Gov13SIP 1A.1 Pelayanan Informasi Publik	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Presentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	Dinas Kominfo	Semua OPD, Masyarakat			150.000.000	250.000.000	250.000.000	1.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
Pelatihan Staf Perencana	Prosentase Staf yang Telah Mengikuti Pelatihan		Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah							230.000.000	230.000.000													



		Gov14 SIP1	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Gov14S1 P1A. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Gov14S1P 1A.1 Peminanaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Presentase perangkat daerah yang dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan	Bapelitb angda	Semua OPD		87.000.000	87.000.000	87.000.000	300.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020 (Pembangunan) 2021-2028 (Pengembangan)
		Gov14 SIP2	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Gov14S1 P2A. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Gov14S1P 2A.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Bapelitb angda	Semua OPD		150.000.000	175.000.000	175.000.000	800.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020 (Pembangunan) 2021-2028 (Pengembangan)
Evaluasi Kebutuhan Peningkatan SDM	Prosentase Frekwensi Pelatihan Staf		Peningkatan Kapasitas Aparatur							1.800.000.000	1.800.000.000												
		Gov15 SIP1	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Gov15S1 P1A. Pengembangan Kompetensi Teknis	Gov15S1P 1A.1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	Prosentase Realisasi Pengembangan SDM	BKPSDM	ASN		950.000.000	950.000.000	1.300.000.000	5.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)

				Gov15S1 P1B. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Gov15S1P 1B.1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	Prosentase Realisasi Pengembangan SDM	BKPSDM	ASN			1.700.000.000	3.100.000.000	3.100.000.000	10.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
		Gov15 SIP2	Kepegawaian Daerah	Gov15S1 P2A. Pengembangan Kompetensi ASN	Gov15S1P 2A.1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	IKM Perangkat Daerah	BKPSDM	ASN			50.000.000	400.000.000	400.000.000	2.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
Sosialisasi Draft Kebijakan Daerah	Prosentase Draft Kebijakan yang Telah Disetujui		Penataan Peraturan Perundang-undangan							550.000.000	550.000.000													
		Gov16 SIP1	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Gov16S1 P1A. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Gov16S1P 1A.1 Pendokum entasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum	Semua OPD, DPRD Kota Madiun			200.000.000	250.000.000	250.000.000	1.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
					Gov16S1P 1A.2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum	Semua OPD, DPRD Kota Madiun, Masyarakat			380.000.000	380.000.000	380.000.000	1.500.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)



Tabel 5.8.
Roadmap Implementasi Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Smart Branding

Master Plan Perwal 32/2020		ID	Review Master Plan Berbasis P-RPJMD					Pelaksana	Kerjasama	Anggaran							Capaian Kinerja Program						Pembinaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline
Program Smart City	Indikator Smart City		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Keberhasilan			2019	2020	2021	2022	2023	2024 - 2028	Thn ke 1	Thn ke 2	Thn ke 3	Thn ke 4	Thn ke 5	Thn ke 6-10				
																						1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Pendataan dan Penetapan Cagar Budaya	Prosentase Pendataan Dan Penetapan Cagar Budaya Milik Kota Madiun di Tingkat Nasional Maupun Mancanegara		Pengelolaan Kekayaan Budaya							250.000.000	700.000.000														
		Brd1SIP1	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Brd1SIP1A. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Brd1SIP1A.1 Pengembangan Cagar Budaya	Meningkatkannya Kelestarian Budaya Daerah	Prosentase Benda/Bangunan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Dikbudparpora	Budaya, Komunitas, Seniman, Bapelitbangda, Kecamatan, Kelurahan			200.000.000	90.000.000	90.000.000	500.000.000	70%	75%	80%	85%	90%	100%	APBD dan Investor	Money dilakukan setiap tribulan (3 bulan)	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)	

Pengembangan City Tour	Prosentase Peningkatan Jumlah Wisatawan	Brd4S1P1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Brd4S1P1A. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Brd4S1P1.1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, Dikbudparpora, Masyarakat	1.000.000.000	1.000.000.000	1.300.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020 (Pengadaan) 2021-2028 (Pengembangan)
Promosi Even Kota	Prosentase Peningkatan Jumlah Wisatawan		Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam Negeri							880.000.000	200.000.000													
		Brd5S1P1	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Brd5S1P1A. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Brd5S1P1A.1 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata	Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi	Dikbudparpora	Bapelitbangda, BKAD, UMKM, Dewan Kesenian, Paguyuban UMKM, PUPR, Dinas Perkim			140.000.000	225.000.000	225.000.000	1.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020 (Pengadaan) 2021-2028 (Pengembangan)
					Brd5S1P1A.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata	Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi	Dikbudparpora	Bapelitbangda, BKAD, UMKM, Dewan Kesenian, Paguyuban UMKM, PUPR, Dinas Perkim	125.000.000	125.000.000	125.000.000	265.000.000	265.000.000	1.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020 (Pengadaan) 2021-2028 (Pengembangan)

		Brd7S1P1	Pelayanan Penanaman Modal	Brd7S1P1A. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Brd7S1P1A.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	DPMPPTSP	Pelaku Usaha, Tim Koordinasi Pelayanan Perizinan,			500.000.000	240.000.000	240.000.000	1.250.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020 (Pengadaan) 2021-2028 (Pengembangan)
					Brd7S1P1A.2 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	DPMPPTSP	Pelaku Usaha, Tim Koordinasi Pelayanan Perizinan,			18.800.000	150.000.000	150.000.000	750.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020 (Pengadaan) 2021-2028 (Pengembangan)
Pengembangan Market Place Daerah	Tersedia Market Place Daerah		Pengelolaan Pasar Rakyat							6.000.000.000	1.300.000.000													

		Brd8S1P1	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Brd8S1P1A. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Brd8S1P1A.1 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan	Jumlah Produk Perdagangan yang Dipromosikan	Dinas Perdagangan			155.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020 (Pengadaan) 2021-2028 (Pengembangan)
		Brd8S1P2	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Brd8S1P2A. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Brd8S1P2A.1 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan	Presentase Pasar yang dikelola Sarana Distribusinya	Dinas Perdagangan	Pedagog, BKAD,		1.200.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
Pembangunan Spot Berkreasi Untuk Anak Muda	Prosentase Tersedianya Fasilitas Bagi Anak Muda		Pembinaan Pemuda Dan Olah Raga							200.000.000	1.200.000.000												
		Brd9S1P1	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Brd9S1P1A. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Brd9S1P1A.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olah Raga yang Mampu Bersaing di Tingkat Regional dan Nasional	Jumlah Mendali yang Diraih di Bidang Olah Raga	Dikbudparpora	Dinas Pendidikan, Bagian Hukum, BKAD, Bapelitbangda, Masyarakat		2.000.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	10.000.000.000	75%	80%	85%	90%	95%	100%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020 (Pengadaan) 2021-2028 (Pengembangan)



Tabel 5.9.
Roadmap Implementasi Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Smart Economy

Master Plan Perwal 32/2020		ID	Review Master Plan Berbasis P-RPJMD					Pelaksana	Kerjasama	Anggaran							Capaian Kinerja Program						Pembinaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline
Program Smart City	Indikator Smart City		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Keberhasilan			2019	2020	2021	2022	2023	2024 - 2028	Thn ke 1	Thn ke 2	Thn ke 3	Thn ke 4	Thn ke 5	Thn ke 6-10				
																						23			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Sambel Pecel Berkualitas	Prosentase Peningkatan Produk Kota Madiun yang Telah Bersertifikasi		Pengembangan Industri Kecil Menengah							75.000.000	56.000.000														
		Eco1S1P1	Perencanaan dan Pengembangan Industri	Eco1S1P1A. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Eco1S1P1A.1 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	Prosentase Tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	Disnaker, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	UMKM, Pelaku Usaha, DPMPPTSP, Dinas Perdagangan			250.000.000	85.000.000	85.000.000	500.000.000	75%	80%	85%	90%	95%	100%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)	
				Eco1S1P1A.2 Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	Prosentase Tersedianya Dokumen Induk Perindustrian	Disnaker Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	UMKM, Pelaku Usaha, DPMPPTSP, Dinas Perdagangan			60.000.000	117.000.000	117.000.000	500.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)		

					Eco1S1P1 A.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	Prosentase Tersedianya Dokumen Industri	Disnaker, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	UMKM, Pelaku Usaha, DPMPPTSP, Dinas Perdagangan			240.000.000	240.000.000	240.000.000	900.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)	
		Eco1S1P2	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Eco1S1P2A. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKO dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Eco1S1P2A.1 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	Prosentase IKM yang Mengikuti Publikasi Produk	Disnaker, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Pelaku Usaha, DPMPPTSP, Bagian Hukum, Dinas Kominfo			400.000.000	400.000.000	400.000.000	2.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)	
Sentra Produk Unggulan	Prosentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat Akan Produk Unggulan Kota Madiun		Dana Kelurahan									2.700.000.000	2.700.000.000												
		Eco2S1P1	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Eco2S1P1a. Pemberdayaan Kelurahan	Eco2S1P1a.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Kecamatan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terkomodir dalam RKPD	Kecamatan	Bapelitbangda, DPRD, BKAD, Tokoh Masyarakat, RT/RW, Organisasi Wanita/PKK, Kelurahan			3.700.000.000	2.300.000.000	3.000.000.000	10.000.000.000										



			Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	DPMPPTSP	DPUTR, Dinas Perkim, Bapelitbangda, DLH, Kecamatan, Dinas Perhubungan, Pol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
Pengembangan Urban Farming	Prosentase Tersedianya Taman Dengan Sayur-Sayuran Bahan Pecenl		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat							10.000.000	1.240.000.000													
		Eco3 SIP1	Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Eco3SIP1A. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Eco3SIP1A.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Efektifitas Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Petani, Bagian Hukum			325.000.000	50.000.000	50.000.000	500.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
					Eco3SIP1A.2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Efektifitas Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Petani, Bagian Hukum			1.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	5.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)



		Eco3S1P2	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Eco3S1P2A. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Eco3S1P2A.1 Penyediaan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Petani, Bagian Hukum, Dinas Perdagangan	65.000.000	65.000.000	170.000.000	180.000.000	190.000.000	500.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
Pemberdayaan Komunitas Usia Produktif	Prosentase Terwujudnya Pemberdayaan Komunitas Usia Produktif		Pembinaan Pemuda Dan Olah Raga							310.000.000	175.000.000													
		Eco4S1P1	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Eco4S1P1A. Penyadaran Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Eco4S1P1A.1 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olah Raga yang Mampu Bersaing di Tingkat Regional dan Nasional	Jumlah Pemuda Berprestasi	Dispbudparpora	Dinas Pendidikan, Disbudparpora, Masyarakat			700.000.000	475.000.000	475.000.000	2.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap tribulan (3 bulan)	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)



Kerjasama Dengan Bank/ Lembaga Keuangan Fintech sebagai Penyedia	Persentase Terjalinya Kerjasama Dengan Bank/ Lembaga Keuangan	Eco8 S1p1	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Eco8 S1p1A. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Eco8 S1p1A. 1 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Semua Perangkat Daerah	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.500.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap tribulan (3 bulan)	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
					Eco8 S1p1A. 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitas Perengkapan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Semua Perangkat Daerah	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap tribulan (3 bulan)	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)

Tabel 5.10.
Roadmap Implementasi Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Smart Living

Master Plan Perwal 32/2020		ID	Review Master Plan Berbasis P-RPJMD					Pelaksana	Kerjasama	Anggaran						Capaian Kinerja Program						Fembiayaan	Monit oring dan Ewalu asi	Timeline	
Program Smart City	Indikat or Smart City		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran	Indikat or Keberhasi lan			2019	2020	2021	2022	2023	2024 - 2028	Th n ke 1	Th n ke 2	Th n ke 3	Th n ke 4	Th n ke 5	Th n ke 6-10				
1	2		3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				20
Pengelol aan Air Hujan	Menuru nnya Wabah Penyakit Akibat Air Hujan		Pencegah an Dan Pengenda lian Penyakit							15.500.000.000	500.000.000														



		Liv1 S1P1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Liv1S1P1 A. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Liv1S1P1 A.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat	Indeks Keluarga Sehat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Masyarakat, Dinas Kominfo			500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
					Liv1S1P1 A.2 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak Menular	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat	Indeks Keluarga Sehat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Masyarakat, Dinas Kominfo			750.000.000	750.000.000	750.000.000	3.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
					Liv1S1P1 A.3 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat	Indeks Keluarga Sehat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Masyarakat, Dinas Kominfo			100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
		Liv1 S1P2	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Liv1S1P2 A. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Liv1S1P2 A.1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat	Prosentase UMKM yang Mengalami Kenaikan Strata	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Masyarakat, Dinas Kominfo	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)



		Liv5 SIP1	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Liv5SIP1 A. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Liv5SIP1 A.1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kesiagaan Pengendalian Bahaya Kebakaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satpol PP	Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, BPBD, DPUPR, Masyarakat			888.000.000	770.000.000	770.000.000	3.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD		2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (untuk mengembalik fungsi jalan)	Menurunkan Jumlah Kemacetan Kota		Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota							350.000.000	300.000.000													



		Liv6 Slp1	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Walikota Serta Peraturan Perundang-undangan Lainnya	Persentase Kasus K3 (Ketertiban Ketrampilan Keindahan) yang Diselesaikan	Pol PP	Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, BPBD, DPUPR, Masyarakat, dpmppts P, Bapelitbangda		400.000. 000	1.200.00 0.000	8.800.00 0.000	5.000.00 0.000	80 %	85 %	90 %	95 %	10 0%	10 0%	APBD		2019 (Perencanaan) 2020- 2028 (Pengembangan)
--	--	--------------	---	--	---	--	--	--------	---	--	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	------	--	--

Tabel 5.11.
Roadmap Implementasi Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Smart Society

Master Plan Perwal 32/2020		ID	Review Master Plan Berbasis P-RPJMD					Pelaksana	Kerjasama	Anggaran						Capaian Kinerja Program						Pembayaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline			
Program Smart City	Indikator Smart City		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Keberhasilan			2019	2020	2021	2022	2023	2024 - 2028	Th n k e 1	Th n k e 2	Th n k e 3	Th n k e 4	Th n k e 5	Th n k e 6- 10				23	24	25
Komunikasi Dua Arah Pemerintah Dan Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat	Soc1 SIP1	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Soc1SIP1A. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Soc1SIP1A. 1 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Kecamatan Taman	Prosentase Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	200.000 .000	200.000 .000	200.000 .000	200.000 .000	200.000 .000	800.000 .000	8 0 %	8 5 %	9 0 %	9 5 %	10 0 %	10 0 %	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020- 2028 (Pengembangan)					



		Soc2 S3P3	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Soc2 S3P3A. Pemberdayaan Kelurahan	Soc2 S3P3A. 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Pemangku Kepentingan Kecamatan	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPDP	Kecamatan	Bapelitbangda, BKAD, Setwan, RT/RW, LPMK, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Masyarakat	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.250.000.000	75%	80%	85%	90%	95%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap tribulan (3 bulan)	2019 (Perencanaan) 2020 (Penyusunan) 2021-2028 (Pengembangan)
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Cluster Masyarakat	Terjamahnya Lokasi Cluster		Pelayanan Pertama							120.000.000	120.000.000													
		Soc3 S1P1	Penatagunaan Tanah	Soc3S1P1A. Penggunaan Tanah yang Hamperannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Soc3S1P1A. 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Sehat	Prosentase Penatagunaan Tanah	Dinas Perkim	BKAD, DPMPPT, DPUPR, Badan Pertanahan			120.000.000	120.000.000	120.000.000	400.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)	
		Soc3 S2P2	Penyenggaraan Penataan Ruang	Soc3S2P2A. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Soc3S2P2A. 1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang yang Sesuai RT.RW	Prosentase Ketaatan Terhadap RT.RW	DPUPR	Bapelitbangda, Dinas Perkim, DLH, DPMPPT, Kecamatan, Kelurahan, Bagian Hukum			800.000.000	800.000.000	800.000.000	2.000.000.000	75%	80%	85%	90%	95%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap tribulan (3 bulan)	2019 (Perencanaan) 2020 (Penyusunan) 2021 (Penetapan) 2022-2028 (Pengembangan)



				Soc3S2P2B. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Soc3S2P2B.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang yang Sesuai RT.RW	Presentase Ketaatan Terhadap RT.RW	DPUPR	Bapelitbangda, Dinas Perkim, DLH, DPMPPTSP, Kecamatan, Kelurahan, Bagian Hukum		300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.200.000.000	75%	80%	85%	90%	95%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
				Soc3S3P2C. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Soc3S3P2C.1 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikasi Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Gedung Pemerintah	Presentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	DPUPR	Bapelitbangda, Dinas Perkim, DLH, DPMPPTSP, Kecamatan, Kelurahan, Bagian Hukum		200.000.000	200.000.000	200.000.000	1.000.000.000									
	Soc3S3P3	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Soc3S3P3A. Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Soc3S3P3A.1 Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Gedung Pemerintah	Persentase Bangunan Gedung sesuai Ketentuan	DPUPR	DPMPPTSP, DLH, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, Pol PP, Kecamatan, Kelurahan	200.000.000	200.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	1.100.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020 (Pembangunan) 2021-2028 (Pengembangan)



		Soc6 S1P1	Peningkatan Kualitas Keluarga	Soc6S1P1A. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Sub Kegiatan	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender	Prosentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Semua OPD, Masyarakat			50.000.000	50.000.000	50.000.000	250.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap tribulan (3 bulan)	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
				Soc6S1P1B. Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang	Soc6S1P1B.1 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif Bagi Keluarga dalam	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender	Prosentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Semua OPD, Masyarakat			100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap tribulan (3 bulan)	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Meningkatkan Kemampuan Guru Dan Tenaga Kependidikan		Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan							1.800.000.000	700.000.000													



		Soc7 SIP1	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Soc7S1P1A. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Soc7S1P1A.1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Terwujudnya Peningkatan dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Tenaga Pendidik Bersertifikat Yang Berprestasi	Dinas Pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, DPMPSTSP			1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	7.500.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap tribulan (3 bulan)	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)	
			Pengelolaan Pendidikan	Soc7S2P2A. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Soc7S2P2A.1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, DPMPSTSP			150.500.000	150.500.000	150.500.000	750.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap tribulan (3 bulan)	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)	
Pengembangan Kreatifitas Civitas Akademik	Meningkatkan Kualitas Sekolah Dan Perguruan Tinggi	Soc8 SIP1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Soc8S1P1A.1. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Soc8S1P1A.1 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, DPMPSTSP			6.175.000.000	6.175.000.000	6.175.000.000	20.000.000.000										
Diseminasi Produk Hukum	Meningkatkan Rasio Aman terhadap Hukum Yang Ada		Penataan Peraturan Perundang-undangan									1.000.000.000	870.000.000												



				Soc10S1P1B. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Soc10S1P1 B.1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Terwujudnya Peningkatan Responsifitas Dalam Menangani Bencana	Prosentase Korban Bencana yang Ditangani	BPBD	OPD terkait, Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat			70.000.000	70.000.000	70.000.000	350.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap tahun (3 bulan)	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
Sistem Keamanan Mandiri Warga	Menurunnya Tingkat Kriminalitas		Peningkatan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran							700.000.000	800.000.000													
		Soc11 S1P1	Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Soc11 S1P1A. Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran	Soc11 S1P1A. 1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kesiagaan Pengendalian Bahaya Kebakaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pol PP	DLH, DPUTR, Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat			850.000.000	850.000.000	850.000.000	4.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)

Tabel 5.8.



Roadmap Implementasi Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Smart Environment

Master Plan Perwal 32/2020		ID	Review Master Plan Berbasis P-RPJMD					Pelaksana	Kerjasama	Anggaran							Capaian Kinerja Program						Pembinaan	Monitoring dan Evaluasi	Timeline
Program Smart City	Indikator Smart City		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Keberhasilan			2019	2020	2021	2022	2023	2024 - 2028	Thn ke 1	Thn ke 2	Thn ke 3	Thn ke 4	Thn ke 5	Thn ke 6-10				
																						1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Pengembangan Teknologi Untuk Sistem Monitoring Kualitas Air Dan Udara	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara Yang Baik		Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup							150.000.000	525.000.000														
		Env1SIP1	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Env1SIP1A. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Env1SIP1A.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	Dinas Lingkungan Hidup	DPMPPTSP, Pelaku Usaha, Masyarakat			550.000.000	550.000.000	550.000.000	2.500.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pembangunan)	



					Env1SIP 1A.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	Dinas Lingkungan Hidup	DPMPPTS P, Pelaku Usaha, Masyarakat			380.000. 000	380.000. 000	380.000. 000	1.500.00 0.000	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	10 0%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap tribulan (3 bulan)	2019 (Perencanaan) 2020- 2028 (Pengembangan)
				Env1SIP 1B. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Env1SIP 1B.1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	Dinas Lingkungan Hidup	DPMPPTS P, Pelaku Usaha, Masyarakat			300.000. 000	300.000. 000	300.000. 000	1.500.00 0.000	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	10 0%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap tribulan (3 bulan)	2019 (Perencanaan) 2020- 2028 (Pengembangan)
Pemantauan Kualitas Air Sungai	Meningkatnya Kualitas Air		Penataan, Pengawasan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup							480.000. .000	200.000. 000													



		Env2 S1P1	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Env2S1P 1A. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Env2S1P 1A.1 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Prosentase Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaku usaha, Masyarakat			650.000.000	650.000.000	650.000.000	3.000.000.000	70%	75%	80%	85%	90%	100%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap tribulan (3 bulan)	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
Penambahan RTH di Wilayah Kota Madiun	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat		Pengelolaan RTH, PJU Dan Pemakaman							1.470.000.000	11.470.000.000													
		Env3 S1P1	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Env3S1P 1A. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Env3S1P 1A.1 Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Sehat	Prosentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perkim	DPU, DPMPSTP, Masyarakat			19.000.000.000	19.000.000.000	19.000.000.000	50.000.000.000	80%	85%	90%	95%	100%	100%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap tribulan (3 bulan)	2019 (Perencanaan) 2020 (Pengadaan) 2021-2028 (Pengembangan)
		Env3 S2P2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Env3S2P 2A. Pengelola Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Env3S2P 2A. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Prosentase Jumlah KEHATI Lokal Daerah	Dinas Lingkungan Hidup				125.000.000	125.000.000	125.000.000	750.000.000	70%	75%	80%	85%	90%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)



				Env4 S2P2B. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Env4 S2P2B. 1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Terwujudnya Peningkatan Responsibilitas dalam Menangani Bencana	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	BPBD	BKAD, Bapelitbangda, Dinas Perkim, DPUTR, Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat	150.000.000	50.000.000	70.000.000	60.000.000	130.000.000	600.000.000	70%	75%	80%	85%	90%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
Pemantauan Pencemaran Udara Oleh Industri Komersial	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara Yang Baik		Penataan, Pengawasan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup							74.000.000	143.000.000													
		Env5 S1P1	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Env5S1P 1A. Penyimpanan Sementara Limbah B3	Env5S1P 1A.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Prosentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup	DPMPSTP, Dinas Perhubungan, DLH, DPUPR, Pelaku Usaha			250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.000.000.000	70%	75%	80%	85%	90%	100%	APBD	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)



		Env5 S2P2	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Env5S2P 2A. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Env5S2P 2A.1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Prosentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup	DPMPSTP, Dinas Perhubungan, DLH, DPUPR, Pelaku Usaha			190.000.000	190.000.000	190.000.000	1.000.000.000	70%	75%	80%	85%	90%	100%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)
Reduksi Sampah di Sumber Sampah Rumah Tangga	Penurunan Sampah Rumah Tangga		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan							2.700.000.000	3.200.000.000													
		Env6 S1P1	Pengelolaan Persampahan	Env6S1P 1A. Pengelola Sampah	Env6S1P 1A.1 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Prosentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dinas Lingkungan Hidup	DPMPSTP, Dinas Perhubungan, DLH, DPUPR, Masyarakat			240.000.000	240.000.000	240.000.000	2.000.000.000	70%	75%	80%	85%	90%	100%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020-2028 (Pengembangan)



					Env6S1P 1A.2 Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Prosentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dinas Lingkungan Hidup	DPMP P, Dinas Perhubungan, DLH, DPUPR, Masyarakat			2.700.00 0.000	2.700.00 0.000	2.700.00 0.000	15.000.0 00.000	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	10 0%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020- 2028 (Pengembangan)
Program Sosialisasi Kepada Masyarakat Dan Pelaku Usaha Untuk Memfaatkan Sumber Energi Alternatif Yang Tersedia	Meningkatkan Penggunaan Energi Alternatif	Env7 S1P1	Pengelolaan Persampahan	Env7S1P 1A. Pengelolaan Sampah	Env7S1P 1A.1 Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pangangkutan, Pengolahan, Dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPS T/SPA Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Prosentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dinas Lingkungan Hidup	DPMP P, Dinas Perhubungan, DLH, DPUPR, Masyarakat			5.454.00 0.000	5.454.00 0.000	5.454.00 0.000	20.000.0 00.000	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	10 0%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020- 2028 (Pengembangan)
Sosialisasi Kepada Masyarakat Mengenai Lingkungan Hidup	Tingkat Kesehatan Masyarakat	Env8 S1p1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Env8 S1p1A. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Env8 S1p1A. 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat	Indeks Keluarga Sehat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Bapelitb angka, Masyarakat			500.000. 000	625.000. 000	110.000. 000	2.000.00 0.000	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	10 0%	APBD dan Investor	Monev dilakukan setiap bulan	2019 (Perencanaan) 2020- 2028 (Pengembangan)



BAB VI PENUTUP

Review/Perubahan Master Plan Smart City ini merupakan penyempurnaan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Daerah menuju *Smart City yang berbasis pada Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun 2019-2023*. Perubahan *Master Plan Smart City* ini disampaikan Program Inisiatif dan kerangka kerja *Smart City* dengan fokus pada peningkatan branding Daerah dengan pengembangan pariwisata, wajah kota, dan bisnis daerah agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga kualitas hidup masyarakatnya pun menjadi lebih berkualitas.

Dalam buku ini juga dipaparkan profil serta kondisi Daerah yang mencakup visi dan misi Daerah, visi misi *Smart City*, strategi pembangunan *Smart City*, rencana aksi, dan *Roadmap* atau peta jalan pembangunan *Smart City* yang akan dijadikan sebagai landasan implementasi *Smart City* Daerah yang diuraikan menjadi 6 (enam) dimensi *Smart City*, yaitu:

1. *Smart Governance*;
2. *Smart Branding*;
3. *Smart Economy*;
4. *Smart Living*;
5. *Smart Society*; dan
6. *Smart Environment*.

Setiap inisiatif yang terdapat dalam *Roadmap Smart City* Daerah dijabarkan secara rinci sehingga bisa dijadikan sebagai panduan yang holistik bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan implementasi inisiatif *Smart City*. Dokumen *Master Plan Smart City* Daerah ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen hidup dan fleksibel yang harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kebutuhan masyarakat Daerah, serta perubahan-perubahan yang terjadi pada Pemerintah Daerah termasuk semua instansi Perangkat Daerah yang tercakup di dalamnya serta adanya perubahan regulasi. Selain itu, yang lebih penting lagi adalah bahwa *Master Plan Smart City* ini harus selalu selaras dengan visi, misi, dan kebutuhan Pemerintah Daerah serta masyarakat Daerah. Pada akhirnya, dokumen *Master Plan Smart City* ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan strategis dalam membangun *Smart City* di Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

